



Laporan Perekonomian Provinsi Bali

Mei **2023**



Download Materi.



WWW.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Lenda Timur
No. 4 Denpasar



20
23

Laporan Perekonomian **PROVINSI BALI**

*Untuk Informasi Lebih Lanjut Dapat Menghubungi : Grup Perumusan & Implementasi KEKDA
Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah & Provinsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali*

VISI BANK INDONESIA

"Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju."

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia;
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah;
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

"Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi)"

VISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan konstruktif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional"

MISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang Rupiah dan keandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan"

...Memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat...

(Salah satu dari lima tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Bali Mei 2023 ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal maupun eksternal Bank Indonesia, mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan pemerintah, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali.

Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah, khususnya Provinsi Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional, serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai Rupiah. Pemulihan pariwisata Bali merupakan indikator perbaikan kinerja pariwisata secara nasional, dan peningkatan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali menjadi penyumbang utama devisa pariwisata bagi negara dan mendukung kestabilan nilai Rupiah. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta upaya pengendalian inflasi di daerah guna mencapai target inflasi nasional.

Berbagai kajian dilakukan Bank Indonesia sebagai wujud kepedulian terhadap dinamika perekonomian daerah. Diseminasi hasil kajian juga terus dilakukan kepada seluruh *stakeholders* terkait, guna mendorong kemajuan perekonomian daerah. Bank Indonesia mendukung upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan transformasi ekonomi Bali yang hijau, tangguh dan sejahtera.

Laporan Perekonomian Provinsi Bali, merupakan kajian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang disusun untuk memaparkan berbagai data dan informasi, mengenai perekonomian daerah Provinsi Bali kepada seluruh pihak terkait. *Stakeholders* dapat memanfaatkan informasi dari Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini sesuai dengan kepentingan masing-masing, dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Provinsi Bali di masa depan. Kami berharap akan munculnya ide-ide kreatif dan konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian-kajian lebih lanjut.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan, antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian/Lembaga terkait, Perbankan, Akademisi, Asosiasi, Pelaku usaha dan Masyarakat Bali. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini masih jauh dari sempurna. Berbagai saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas dari kajian ini. Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Denpasar, 28 Mei 2023

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BALI

TTD

Trisno Nugroho
Direktur Eksekutif



DAFTAR ISI

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

1

1.1.	KINERJA PEREKONOMIAN BALI TRIWULAN I 2023	2
1.2.	PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI PENGELUARAN	4
1.2.1.	KONSUMSI	4
1.2.2.	INVESTASI	6
1.2.3.	EKSPOR DAN IMPOR	6
1.3.	PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI LAPANGAN USAHA	8
1.3.1.	PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM	9
1.3.2.	PERDAGANGAN	10
1.3.3.	TRANSPORTASI	11
1.3.4.	KONSTRUKSI	12
1.3.5.	PERTANIAN	12

BAB II

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

18

2.1.	PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DI WILAYAH BALI	20
2.2.	APBD PROVINSI BALI	21
2.2.1.	PENDAPATAN APBD PROVINSI BALI	21
2.2.1.1.	ANGGARAN PENDAPATAN	21
2.2.1.2.	REALISASI PENDAPATAN	21
2.2.2.	BELANJA APBD PROVINSI BALI	22
2.2.2.1.	ANGGARAN BELANJA	22
2.2.2.2.	REALISASI BELANJA DAN TRANSFER	22
2.3.	APBD GABUNGAN KABUPATEN/KOTA DI BALI	24
2.3.1.	PENDAPATAN APBD GABUNGAN KABUPATEN/KOTA DI BALI	24
2.3.1.1.	ANGGARAN PENDAPATAN	24
2.3.1.2.	REALISASI PENDAPATAN	25
2.3.2.	BELANJA DAN TRANSFER APBD GABUNGAN KABUPATEN/KOTA DI BALI	26
2.3.2.1.	ANGGARAN BELANJA DAN TRANSFER	26
2.3.2.2.	REALISASI BELANJA DAN TRANSFER	26
2.4.	APBN DI BALI	28

BAB III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

30

3.1.	PERKEMBANGAN INFLASI	32
3.2.	INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA	33
3.3.	INFLASI MENURUT KOTA.....	40
3.4.	INFLASI PEDESAAN	41
3.5.	KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI	41
3.6.	TRACKING INFLASI TRIWULAN II 2023	42

BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

50

4.1.	KINERJA PERBANKAN	52
4.1.1.	DANA PIHAK KETIGA.....	52
4.1.2.	PENYALURAN KREDIT	52
4.1.3.	<i>LOAN TO DEPOSIT RATIO</i> (LDR)	55
4.2.	KINERJA KEUANGAN KORPORASI	55
4.2.1.	SUMBER KERENTANAN KORPORASI	55
4.2.2.	KONDISI PERKEMBANGAN KORPORASI	56
4.2.3.	PENYALURAN KREDIT KORPORASI	57
4.3.	KINERJA KEUANGAN RT	58
4.3.1.	SUMBER KERENTANAN RT	58
4.3.2.	KONDISI PERKEMBANGAN RT	58
4.3.3.	PENYALURAN KREDIT RT	59
4.3.3.1.	PENYALURAN KPR DAN KPA	59
4.3.3.2.	PENYALURAN KKB DAN KREDIT MULTIGUNA	60
4.4.	AKSES KEUANGAN DAN UMKM.....	61

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

64

5.1.	PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DI PROVINSI BALI	66
5.2.	PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DI PROVINSI BALI	66
5.2.1.	SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA	66
5.2.2.	SISTEM PEMBAYARAN RETAIL	67
5.2.3.	PENYELENGGARA TRANSFER DANA BUKAN BANK (PTDBB)	69
5.4.	PERKEMBANGAN TRANSAKSI KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB) DI BALI	70
5.5.	UPAYA DALAM MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN	70
5.5.1.	SISTEM PEMBAYARAN TUNAI	70
5.5.2.	SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI	71

BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

76

6.1.	KETENAGAKERJAAN	78
6.2.	KESEJAHTERAAN	81
6.2.1.	PERKEMBANGAN ANGKA KEMISKINAN	81
6.2.2.	KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN	81
6.2.3.	KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK	82
6.2.4.	PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI	82
6.2.5.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	84

BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

86

7.1.	PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA DAN NASIONAL	88
7.1.1.	PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA 2023	88
7.1.2.	PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2023	90
7.1.3.	PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI BALI 2023	91
7.1.4.	RISIKO PERTUMBUHAN EKONOMI	96
7.1.5.	PRAKIRAAN INFLASI 2023	96

BOKS	
BOKS 1 NARASI TUNGGAL: DO'S AND DON'TS PARIWISATA	14
BOKS 2 MENGANTISIPASI POTENSI DAMPAK EL NINO DI PROVINSI BALI	46
BOKS 3 IMPLEMENTASI DEKLARASI G20 2022 BALI: TRANSISI MENUJU TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN, TRANSFORMASI DIGITAL, DAN ARSITEKTUR KESEHATAN GLOBAL DI PROVINSI BALI	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perkembangan Ekonomi Bali dan Nasional	3
Grafik 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Indonesia Triwulan IV 2022	3
Grafik 1.3.	Perkembangan Level PDRB ADHK Bali 2019-2022	3
Grafik 1.4.	Perkembangan Penyaluran Total Kredit Konsumsi RT	5
Grafik 1.5.	Perkembangan Impor Barang Konsumsi	5
Grafik 1.6.	Perkembangan Penyaluran Kredit KPR/A	5
Grafik 1.7.	Perkembangan Ekspektasi Konsumen di Provinsi Bali	5
Grafik 1.8.	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali	6
Grafik 1.9.	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Gabungan Kabupaten/Kota di Bali	6
Grafik 1.10.	Perkembangan Nilai Investasi PMDN di Bali	7
Grafik 1.11.	PMDN di Bali Menurut Sektor	7
Grafik 1.12.	Pangsa PMDN di Bali pada Triwulan IV 2022	7
Grafik 1.13.	Perkembangan Nilai Investasi PMA di Bali	7
Grafik 1.14.	Skala Likert Hasil Liaison Kondisi Investasi Triwulan I 2023	7
Grafik 1.15.	Perkembangan Impor Barang Modal	7
Grafik 1.16.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali	8
Grafik 1.17.	Negara Asal Penyumbang Wisatawan Mancanegara Periode Triwulan I 2023	8
Grafik 1.18.	Perkembangan Nilai Ekspor Barang	8
Grafik 1.19.	Pertumbuhan Impor Barang Berdasarkan Klasifikasi Broad Economic Categories (BEC)	8
Grafik 1.20.	Perkembangan Kunjungan Wisatawan Domestik ke Bali	10
Grafik 1.21.	Perkembangan TPK Hotel Bintang di Bali	10
Grafik 1.22.	Perkembangan SKDU Kegiatan Usaha di Bali	11
Grafik 1.23.	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Konsumsi dan LU Perdagangan	11
Grafik 1.24.	Perkembangan Jumlah Maskapai Internasional ke Bali	11
Grafik 1.25.	Perkembangan Jumlah Kedatangan Kargo Melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai	12
Grafik 1.26.	Perkembangan SKDU Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Bali	12
Grafik 1.27.	Perkembangan Penyaluran Kredit pada LU Konstruksi (Lokasi Poyek)	12
Grafik 1.28.	Perkembangan Kegiatan Usaha pada Sektor Konstruksi	12
Grafik 1.29.	Perkembangan NTP Provinsi Bali	13
Grafik 2.1.	Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Pemprov Bali s.d Triwulan I 2023	22
Grafik 2.2.	Komponen Penyumbang Pendapatan Pemprov Bali Posisi Triwulan I 2023	22
Grafik 2.3.	Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemprov Bali	22
Grafik 2.4.	Perkembangan Realisasi Total Belanja Pemprov Bali	23
Grafik 2.5.	Komponen Penyumbang Belanja Pemprov Bali Posisi Triwulan IV 2022	23
Grafik 2.6.	Perkembangan Realisasi Belanja Modal Pemprov Bali	23
Grafik 2.7.	Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Bali s.d. Triwulan I 2023	26
Grafik 3.1.	Inflasi Kota di Bali (%yoy)	33
Grafik 3.2.	Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (%yoy)	33
Grafik 3.3.	Likert Scale Harga Jual di Provinsi Bali	33
Grafik 3.4.	Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Bali	34
Grafik 3.5.	Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Bali	34
Grafik 3.6.	Perkembangan Harga Beras (Rp/Kg)	34
Grafik 3.7.	Perkembangan Harga Bawah Merah (Rp/Kg)	34

Grafik 3.8. Inflasi Triwulanan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Prov. Bali	35
Grafik 3.9. Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Prov. Bali	35
Grafik 3.10. Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali	35
Grafik 3.11. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Prov. Bali	35
Grafik 3.12. Inflasi Triwulanan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga di Provinsi Bali	36
Grafik 3.13. Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga di Provinsi Bali	36
Grafik 3.14. Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali	36
Grafik 3.15. Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali	36
Grafik 3.16. Inflasi Triwulanan Transportasi di Provinsi Bali	37
Grafik 3.17. Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali	37
Grafik 3.18. Inflasi Triwulanan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%.qtq)	37
Grafik 3.19. Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%.yoy)	37
Grafik 3.20. Inflasi Triwulanan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%.qtq)	38
Grafik 3.21. Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%.yoy)	38
Grafik 3.22. Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (%.qtq)	38
Grafik 3.23. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (%.yoy)	38
Grafik 3.24. Inflasi Triwulanan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (%.qtq) ..	39
Grafik 3.25. Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (%.yoy) ...	39
Grafik 3.26. Inflasi Triwulanan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (%. qtq)	39
Grafik 3.27. Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (%. yoy)	39
Grafik 3.28. Perkembangan Inflasi Pedesaan (ytd)	40
Grafik 3.29. Perkembangan Harga Minyak Mentah Global (USD/Barel)	43
Grafik 3.30. Perkembangan Pola Perkembangan Harga Canang Sari di Provinsi Bali (%mtm)	43
Grafik 3.31. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi dan Indeks Ekspektasi Konsumen	43
Grafik 3.32. Perkembangan Pertumbuhan Penjualan Eceran Konsumsi Rumah Tangga	43
Grafik 4.1. Perkembangan Aset Perbankan	52
Grafik 4.2. Perkembangan DPK Perbankan	52
Grafik 4.3. Pangsa Kepemilikan DPK	53
Grafik 4.4. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Kepemilikan	53
Grafik 4.5. Perkembangan DPK Perseorangan dan Indeks Penghasilan	53
Grafik 4.6. Perkembangan DPK Korporasi dan Kondisi Kegiatan Usaha	53
Grafik 4.7. Perkembangan DPK Korporasi dan Kondisi Kegiatan Usaha	53
Grafik 4.8. Perkembangan Kinerja Penyaluran Kredit Perbankan	54
Grafik 4.9. Perkembangan Kredit Modal Kerja dan Skala Likert	54
Grafik 4.10. Pangsa masing-masing kategori kredit di Provinsi Bali	54
Grafik 4.11. Perkembangan Kredit Sektoral	54
Grafik 4.12. Perkembangan NPL Kredit	55
Grafik 4.13. Perkembangan Perbandingan NPL dan LAR Kredit	55
Grafik 4.14. Perkembangan LAR Kredit	55
Grafik 4.15. Perkembangan LDR	55

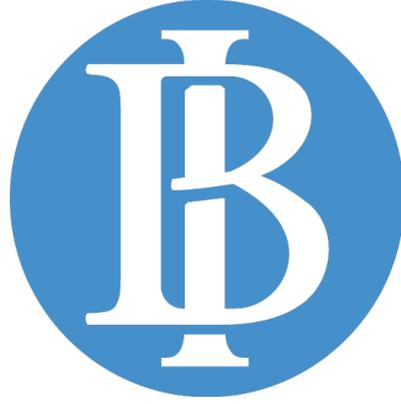
Grafik 4.16. Pangsa Wisatawan Mancanegara Bali Tahun 2019	56
Grafik 4.17. Pangsa Wisatawan Mancanegara Bali Tahun 2023 (data Triwulan I tahun 2023)	56
Grafik 4.18. Perkembangan Pangsa Impor Barang	56
Grafik 4.19. Perkembangan Skala <i>Likert</i> Penjualan Domestik dan Penjualan Ekspor	56
Grafik 4.20. Kondisi Rentabilitas Korporasi	57
Grafik 4.21. Kondisi Likuiditas Korporasi	57
Grafik 4.22. Perkembangan Kredit Korporasi	57
Grafik 4.23. Perkembangan Kredit Korporasi Sektoral	57
Grafik 4.24. Perkembangan NPL Kredit Korporasi	58
Grafik 4.25. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Periode Agustus 2022	58
Grafik 4.26. Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)	58
Grafik 4.27. Perkembangan Kredit Rumah Tangga	59
Grafik 4.28. Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	59
Grafik 4.29. Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	61
Grafik 4.30. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral	61
Grafik 4.31. Perkembangan NPL Kredit UMKM Sektoral	61
Grafik 5.1. Aliran Uang Kartal di Provinsi Bali	66
Grafik 5.2. Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Bali	67
Grafik 5.3. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Bali	67
Grafik 5.4. Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Bali	67
Grafik 5.5. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Bali	67
Grafik 5.6. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Bali	68
Grafik 5.7. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Bali	68
Grafik 5.8. Volume Transaksi Kartu ATM/Debit Berdasarkan Jenis Transaksi	68
Grafik 5.9. Volume Transaksi Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi	68
Grafik 5.10. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik (UE) di Bali	69
Grafik 5.11. Perkembangan Jumlah Uang Elektronik (UE) di Bali	69
Grafik 5.12. Perkembangan Transaksi QRIS di Bali	69
Grafik 5.13. Perkembangan Jumlah Merchant dan Pengguna QRIS di Bali	69
Grafik 5.14. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Bali	70
Grafik 6.1. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama	80
Grafik 6.2. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal	81
Grafik 6.3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Penduduk di Provinsi Bali	82
Grafik 6.4. Perkembangan Rasio Gini Bali dan Nasional	83
Grafik 6.5. Distribusi Pendapatan per Kapita Penduduk	83
Grafik 6.6. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)	83
Grafik 6.7. Penerbangan NTP Bali dan Nasional	83
Grafik 6.8. Pertumbuhan NTP Bali	83
Grafik 6.9. Perbandingan IT dan IB Bali	83
Grafik 6.10. Perbandingan Indeks IPM Bali dengan Nasional	84
Grafik 7.1. Perkembangan <i>Pencarian Google Indonesia Travel</i>	91
Grafik 7.2. <i>Event Analysis</i> Kunjungan Wisatawan Ke Bali	92
Grafik 7.3. Jumlah <i>International Direct Flight</i> Ke Bali hingga April 2023	92
Grafik 7.4. Indeks Keyakinan Konsumen (sd Apr'23)	93
Grafik 7.5. Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (sd Apr'23)	93
Grafik 7.6. Indeks Ekspektasi Penghasilan (sd Apr'23)	93

Grafik 7.7. Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (sd Apr'23)	93
Grafik 7.8. Hasil <i>Likert Scale</i> Proyeksi Investasi satu tahun ke depan	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Pengeluaran (% yoy)	5
Tabel 1.2.	Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Lapangan Usaha (% yoy)	9
Tabel 2.1.	Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Wilayah Bali Tahun 2022-2023	20
Tabel 2.2.	Realisasi Belanja Pemerintah di Wilayah Bali Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	20
Tabel 2.3.	Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Bali Tahun 2023 dan Realisasi s.d. Triwulan I 2023	21
Tabel 2.4.	Pagu APBD Provinsi Bali Tahun 2023 dan Realisasi Belanja s.d. Triwulan I 2023	23
Tabel 2.5.	Pagu Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Bali Tahun 2022-2023	24
Tabel 2.6.	Target Anggaran dan Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022-2023	25
Tabel 2.7.	Realisasi Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota di Bali s.d. Triwulan I 2022-2023	25
Tabel 2.8.	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota di Bali s.d. Triwulan I 2022-2023	25
Tabel 2.9.	Pagu Anggaran Pemerintah di Wilayah Bali Tahun 2022-2023	27
Tabel 2.10.	Pagu Anggaran Belanja dan Transfer 9 Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022-2023	27
Tabel 2.11.	Realisasi Belanja 9 Kabupaten/Kota di Bali s.d. Triwulan I 2022-2023	27
Tabel 2.12.	Persentase Realisasi Belanja 9 Kabupaten/Kota di Bali s.d. Triwulan I 2022-2023	28
Tabel 2.13.	Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Bali Tahun 2022-2023	28
Tabel 3.1.	Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran	40
Tabel 3.2.	Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran	40
Tabel 3.3.	Pelaksanaan Kegiatan Rutin Pengendalian Inflasi Mingguan di Wilayah Provinsi Bali	42
Tabel 3.4.	Pelaksanaan HLM dan Rapat Koordinasi TPID Sepanjang Periode Berjalan	43
Tabel 4.1.	Perkembangan Kredit KPR+KPA	59
Tabel 4.2.	Perkembangan NPL Kredit KPR+KPA	60
Tabel 4.3.	Perkembangan Kredit KKB dan Kredit Multiguna	60
Tabel 4.4.	Perkembangan NPL Kredit KKB dan Kredit Multiguna	61
Tabel 4.5.	Perkembangan Nominal Kredit UMKM Spasial	62
Tabel 4.6.	Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Spasial	62
Tabel 4.7.	Perkembangan NPL Kredit UMKM Spasial	62
Tabel 5.1.	Aktivitas transaksi domestik dan internasional pada PTDBB di Provinsi Bali pada tahun 2020-2022	70
Tabel 6.1.	Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Bali sampai dengan Agustus 2022	78
Tabel 6.2.	Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja (Ribuan Orang)	79
Tabel 6.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	79
Tabel 6.4.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	79
Tabel 6.5.	Penduduk Bali yang Bekerja Menurut LU (Ribuan Orang)	80
Tabel 6.6.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (dalam %)	81
Tabel 6.7.	Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bali 2018 – 2022	82
Tabel 6.8.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	82
Tabel 7.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	89
Tabel 7.2.	Daftar destinasi wisata terpopuler di dunia tahun 2023 menurut <i>Trip Advisor</i>	95



INDIKATOR PEREKONOMIAN BALI

TW IV 2022
6,61%

TW I 2023
6,04%

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemulihan ekonomi Bali tetap berlanjut pada triwulan I 2023 dengan pertumbuhan positif sebesar 6,04% (yoy), dari 6,61% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

TW IV 2022
6,20%

TW I 2023
5,46%

PERKEMBANGAN INFLASI

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi triwulan IV 2022 yang tercatat 6,20% (yoy).

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

ANGKATAN KERJA (Juta Orang)

Agustus 2021	Februari 2022	Agustus 2022	Februari 2023
2,58	2,68	2,74	2,73

KEMISKINAN (%)

Maret 2021	September 2021	Maret 2022	September 2022
4,53	4,72	4,57	4,53

PENGANGGURAN TERBUKA (%)

Agustus 2021	Februari 2022	Agustus 2022	Februari 2023
5,37	4,84	4,80	3,73

GINI RATIO (%)

Maret 2021	September 2021	Maret 2022	September 2022
0,378	0,375	0,363	0,362

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

INFLOW

TW IV 2022	TW I 2023
1,57	4,06
Rp Triliun	Rp Triliun

OUTFLOW

TW IV 2022	TW I 2023
4,21	2,26
Rp Triliun	Rp Triliun

NET INFLOW/ OUTFLOW

TW IV 2022 NET INFLOW	TW I 2023 NET OUTFLOW
1,80	2,63
Rp Triliun	Rp Triliun

NOMINAL KLIRING

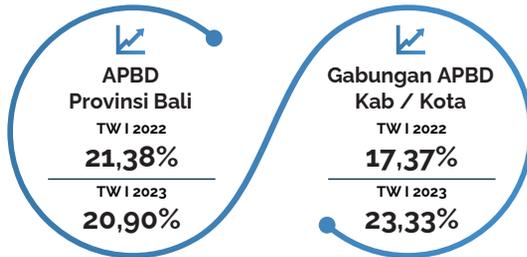
TW IV 2022	TW I 2023
8,83	8,06
Rp Triliun	Rp Triliun

VOLUME KLIRING

TW IV 2022	TW I 2023
238	194
Ribu Lembar	Ribu Lembar

KEUANGAN PEMERINTAH

SERAPAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH



SERAPAN REALISASI BELANJA DAERAH



TW I 2022
15,41%
TW I 2023
20,53%



TW I 2022
3,06%
TW I 2023
15,58%



TW I 2022
9,44%
TW I 2023
12,33%



TW I 2022
9,90%
TW I 2023
15,38%

STABILITAS SISTEM KEUANGAN

KREDIT RUMAH TANGGA (Pertumbuhan)

TW IV 2022 | TW I 2023
2,57% (yoy) | **3,85%** (yoy)



KREDIT RUMAH TANGGA (NPL)

TW IV 2022 | TW I 2023
1,47% (yoy) | **1,52%** (yoy)



KREDIT KORPORASI NON KEUANGAN (Pertumbuhan)

TW IV 2022 | TW I 2023
5,43% (yoy) | **-3,68%** (yoy)



KREDIT KORPORASI NON KEUANGAN (NPL)

TW IV 2022 | TW I 2023
7,95% (yoy) | **7,69%** (yoy)



KREDIT UMKM (Pertumbuhan)

TW IV 2022 | TW I 2023
5,63% (yoy) | **4,29%** (yoy)



KREDIT UMKM (NPL)

TW IV 2022 | TW I 2023
2,51% (yoy) | **2,53%** (yoy)



PROSPEK PEREKONOMIAN BALI

PERTUMBUHAN EKONOMI

TAHUN 2023
4,5% s.d 5,3%
(yoy)



INFLASI

TAHUN 2023
3±1%
(yoy)

Kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 6,04% (yoy), melandai dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 6,61% (yoy).

Realisasi pendapatan dan belanja pemerintah di Provinsi Bali mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2023

Perekonomian Bali pada triwulan I 2023 tercatat masih tumbuh meskipun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekonomi Provinsi Bali tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,04% (yoy), melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,61% (yoy). Perlambatan ekonomi Bali dipengaruhi oleh normalisasi kunjungan wisatawan domestik pasca berlalunya periode HBKN Natal dan tahun baru 2023, libur sekolah akhir tahun, dan menurunnya kunjungan pelaku MICE *event* mancanegara berakhirnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Sejalan dengan itu, penambahan pembangunan infrastruktur pada triwulan I 2023 relatif lebih rendah pasca pembangunan infrastruktur untuk mendukung KTT G20 yang menyerap anggaran dalam jumlah besar pada 2022. Meskipun demikian, semakin meningkatnya jumlah maskapai internasional yang membuka rute penerbangan langsung ke Bali turut menjaga pertumbuhan berbagai lapangan usaha (LU) terkait pariwisata tetap kuat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Bali tercermin dari perlambatan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada Investasi dan Ekspor Luar Negeri (LN), namun justru terjadi peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah.

PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH

Perbaikan kinerja fiskal Provinsi Bali tercermin dari total realisasi belanja Pemerintah (total APBD dan APBN) yang mencapai Rp8,70 triliun atau tumbuh 39,04% (yoy) pada triwulan I 2023, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp6,26 triliun. Hal ini didorong oleh peningkatan pembiayaan program-program daerah di Provinsi Bali yang lebih banyak pada awal periode. Lebih lanjut, realisasi total pendapatan fiskal di Provinsi Bali tercatat sebesar Rp9,87 triliun pada triwulan I 2023, meningkat sebesar 25,69% (yoy) dibandingkan triwulan tahun sebelumnya, dipengaruhi melajunya kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang triwulan laporan. Hal ini juga sejalan dengan upaya dan kolaborasi Pemerintah Daerah dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui perluasan metode pembayaran pajak dan/atau retribusi, intensifikasi pajak daerah, dan sebagainya.

PERKEMBANGAN INFLASI

Realisasi inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar 6,20% (yoy). Sebagian besar kelompok komoditas mengalami tekanan inflasi tahunan pada triwulan I 2023, dengan tekanan harga tertinggi berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti dengan kelompok Transportasi, serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Lebih lanjut, realisasi inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2023 masih lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi Nasional yang tercatat sebesar 4,97% (yoy). Selanjutnya pada triwulan II 2023, tekanan inflasi diperkirakan kembali mengalami penurunan, terutama didorong oleh melandainya inflasi pada kelompok Makanan Minuman dan Tembakau. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali akan terus menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga agar inflasi Provinsi Bali tahun 2023 dapat terus menurun mendekati sasaran inflasi nasional sebesar 3±1%.

Realisasi inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar 6,20% (yoy).

PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Tingkat intermediasi perbankan provinsi Bali pada triwulan I 2023 terpantau tetap baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Berlanjutnya pemulihan ekonomi Bali turut mendukung peningkatan kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit yang tetap tumbuh positif di Bali, dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Kinerja pembiayaan UMKM dalam juga tetap kuat seiring dengan semakin pulihnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang mendorong pemulihan aktivitas dunia usaha. Perkembangan tersebut turut didukung berbagai program stimulus yang diberikan oleh pemerintah bagi pelaku usaha kategori kecil dan menengah.

Tingkat intermediasi perbankan pada tahun 2022 semakin mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan risiko kredit yang terjaga.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Transaksi sistem pembayaran tunai di Provinsi Bali menunjukkan aliran uang kartal perbankan pada posisi inflow ke Bank Indonesia. Selanjutnya, transaksi sistem pembayaran non tunai di Provinsi Bali yakni RTGS, SKNBI, Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit dan Uang Elektronik melanjutkan tren pertumbuhan sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi Provinsi Bali hingga triwulan I 2023.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai dengan berbagai program strategis, mulai dari inovasi layanan kas untuk penyeteroran dan penukaran uang, hingga sosialisasi dan experience user QRIS di berbagai kegiatan.

Kinerja sistem pembayaran Provinsi Bali secara keseluruhan melanjutkan tren pertumbuhan pada triwulan I 2023 sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada periode berjalan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Februari 2023 dalam tren menurun, didukung dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Optimisme perbaikan perekonomian Provinsi Bali tahun 2023 didorong oleh pemulihan pariwisata sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang mempermudah masuknya wisatawan ke Bali. Oleh karena itu, perekonomian Provinsi Bali tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada rentang 4,50%-5,30% dan tekanan inflasi 2023 terjaga pada sasaran inflasi nasional 3%±1%.

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

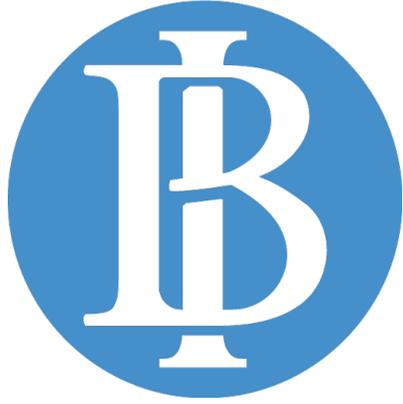
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Februari 2023 semakin menurun, didukung oleh pembukaan kembali kegiatan usaha di tengah aktivitas pariwisata yang semakin membaik. Perbaikan TPT juga tercermin pada tren *job vacancy index* yang kian membaik. LU utama dengan pertumbuhan serapan tenaga kerja tertinggi adalah LU Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, Transportasi dan Pergudangan, serta Akmamin, sementara LU dengan pangsa serapan tenaga kerja terbesar adalah Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan, Akmamin, dan Konstruksi.

Sejalan dengan membaiknya TPT, kondisi kesejahteraan masyarakat di Bali juga menunjukkan peningkatan, yang terkonfirmasi dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2), serta membaiknya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di Bali. Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2022 juga menunjukkan tren peningkatan.

PROSPEK PEREKONOMIAN BALI TAHUN 2023

Perekonomian Bali pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,50% – 5,30% (yoy), berpotensi mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh 4,84% (yoy). Ekonomi Bali diproyeksikan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan optimisme semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali. Dari sisi pengeluaran, meningkatnya Konsumsi RT dan Konsumsi Pemerintah, serta tetap terjaganya pertumbuhan Ekspor Jasa menjadi salah penggerak pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2023. Sementara dari sisi lapangan usaha, LU Transportasi, LU Perdagangan, dan LU Pertanian diperkirakan mengalami akselerasi dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2023.

Sejalan dengan hal di atas, tekanan inflasi Bali diproyeksikan menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional 3%±1% (yoy). Ke depan tetap diperlukan langkah-langkah antisipatif yang strategis serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan pelaku usaha, guna mencegah terjadinya lonjakan tekanan harga lebih lanjut sehingga kenaikan tekanan inflasi hingga akhir tahun dapat dikendalikan.



TABEL INDIKATOR

PERTUMBUHAN EKONOMI (% , yoy)

INDIKATOR	2020				2020	2021				2021	2022				2022	2023
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (% , yoy)																
A. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	-1.24	-11.06	-12.36	-12.20	-9.33	-9.80	2.83	-2.93	0.51	-2.47	1.43	3.05	8.09	6.61	4.84	6.04
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.26	-2.11	-1.72	-0.28	-0.98	-0.18	0.48	-0.30	1.00	0.26	-2.69	0.71	2.44	-4.25	-0.92	-0.85
Pertambangan dan Penggalian	3.24	-0.10	-8.21	-11.02	-4.28	-7.37	-1.51	3.04	6.50	0.07	1.62	4.06	2.18	5.05	4.60	1.73
Industri Pengolahan	-7.58	-7.50	-3.39	-7.24	-6.44	-2.50	1.04	-6.97	8.68	0.09	16.17	12.58	2.01	-6.49	5.63	1.24
Pengadaan Listrik dan Gas	8.07	-21.05	-23.96	-26.96	-16.49	27.00	0.18	2.74	10.62	-5.08	7.66	15.40	22.46	18.05	16.02	28.81
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.71	-0.14	-1.16	-6.77	-0.51	-6.79	-6.70	-3.09	0.95	-3.96	-0.20	5.45	11.50	-8.97	-0.51	1.29
Konstruksi	2.53	-2.42	-4.58	-4.89	-2.42	-2.56	-0.46	0.72	0.51	-0.45	1.65	3.68	7.63	4.21	3.78	-0.51
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1.78	-5.89	-10.21	-9.96	-7.05	-7.43	0.00	-1.12	3.68	-1.25	5.96	3.29	8.20	7.43	5.72	4.39
Transportasi dan Pergudangan	-6.38	-39.75	-40.27	-40.36	-32.06	-36.18	1.96	-15.79	-10.73	-17.50	3.21	11.14	35.37	39.36	21.55	36.23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9.32	-33.13	-34.72	-31.87	-27.50	-24.79	3.53	-9.14	-5.92	-10.20	0.31	8.36	25.69	22.56	13.84	18.95
Informasi dan Komunikasi	7.21	5.91	6.14	5.42	6.16	4.99	4.01	0.05	2.05	2.74	-0.05	0.23	-0.77	-1.73	-0.58	0.11
Jasa Keuangan dan Asuransi	7.35	-7.28	-7.20	-10.20	-4.48	-10.14	1.84	-2.11	-2.00	-3.30	3.02	6.63	9.64	13.10	8.10	11.20
Real Estate	3.26	1.74	-1.80	-1.10	0.48	-2.51	1.59	0.47	2.41	0.49	0.97	0.00	2.21	5.87	2.32	0.37
Jasa Perusahaan	0.15	-4.45	-6.13	-5.67	-4.08	-5.47	1.39	-7.53	-1.08	-3.20	3.88	4.34	13.89	12.14	8.51	6.08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.39	-1.00	-0.98	-6.46	-0.73	-15.80	17.55	-1.89	3.10	0.74	-9.27	-8.87	-0.18	3.16	-3.61	0.78
Jasa Pendidikan	-0.23	-0.11	-1.45	-1.43	-0.83	-3.56	3.49	-0.14	2.75	0.68	-2.11	-4.77	-4.75	2.37	0.02	1.62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.86	3.42	-0.01	1.24	2.84	0.40	8.89	6.71	7.00	5.73	1.56	0.03	1.65	0.56	0.85	1.84
Jasa lainnya	-2.66	-7.09	-7.70	-8.15	-6.45	-4.81	3.95	-6.78	-0.18	-2.00	6.23	5.66	13.55	12.85	9.55	7.23
B. Berdasarkan Pengeluaran:	-1.24	-11.06	-12.36	-12.20	-9.33	-9.80	2.83	-2.93	0.51	-2.47	1.43	3.05	8.09	6.61	4.84	6.04
1. Pengeluaran Konsumsi	0.78	-4.08	-4.00	-4.58	-3.06	-5.75	3.60	-0.28	1.99	-0.07	1.82	2.21	2.47	4.74	3.33	6.97
1. a. Konsumsi Rumah Tangga	2.07	-4.27	-5.43	-6.68	-3.65	-3.78	1.73	-1.08	3.90	0.15	2.51	4.08	4.53	4.74	4.04	6.92
1. b. Konsumsi LNPR	-4.67	-4.81	-4.10	-2.13	-3.94	-3.83	4.03	2.75	9.30	3.00	5.59	13.82	14.81	10.04	11.06	9.09
1. c. Konsumsi Pemerintah	-6.91	-2.98	3.50	3.75	0.09	-20.57	13.32	3.20	-5.69	-1.55	-5.13	-7.94	-8.41	4.17	-1.25	6.89
2. Investasi	-2.78	-14.14	-17.50	-11.84	-11.65	-8.07	-2.98	0.35	-5.84	-4.26	-6.98	3.96	9.43	8.58	2.64	-0.72
2. a. PMTB	-2.66	-14.14	-17.57	-11.95	-11.67	-8.25	-3.14	0.25	-5.96	-4.40	-7.10	3.97	9.42	8.61	2.62	-0.76
2. b. Perubahan Inventori	-26.97	-15.48	0.12	16.96	-8.29	39.14	32.25	21.87	19.65	27.79	12.13	3.63	10.48	4.01	7.50	4.68
3. Neraca Perdagangan Bersih																
3. a. Ekspor Luar Negeri	-19.59	-9.370	-9.430	-9.321	-7.6.33	-9.130	11.23	0.93	20.48	-70.63	8.428	354.25	810.01	814.06	554.56	561.83
3. b. Impor Luar Negeri	-41.28	-89.50	-92.86	-93.80	-78.26	-91.94	-68.61	-51.22	-42.30	-82.55	-10.10	560.68	1151.80	1072.22	599.81	1080.17
3. c. Net Ekspor Antar Daerah	-10.10	-9.6.85	-9.327	-8.0.78	-73.31	-9.2.87	-34.79	14.515	-2.16	-56.03	-10.04	1524.87	271.09	450.68	387.69	1304.72
C. Ekspor																
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	138.48	80.28	99.67	122.79	441.22	121.87	121.34	112.87	148.70	504.78	140.22	155.83	154.08	160.92	611.04	225.27
g Nilai Ekspor Nonmigas (% , yoy)	-8.15	-41.71	-24.64	-16.90	-22.39	-11.99	51.15	13.25	21.09	14.41	15.05	28.42	38.87	8.22	21.05	60.66
D. Impor																
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	46.97	10.50	12.00	12.41	81.88	13.73	8.12	6.16	7.88	35.89	7.74	20.26	26.74	25.30	80.04	26.56
g Nilai Impor Nonmigas (% , yoy)	-21.48	-81.91	-84.18	-82.59	-69.11	-70.77	-22.64	-48.63	-36.54	-56.17	-43.60	149.45	333.86	221.23	123.03	243.08
E. Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy)	3.04	2.18	0.95	0.80	0.80	0.84	0.58	1.40	2.07	2.07	2.41	5.75	6.85	5.81	5.81	5.46

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU/ ADHB (Rp Miliar)

INDIKATOR	2020				2020	2021				2021	2022				2022	2023
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
EKONOMI MAKRO REGIONAL (ATAS DASAR HARGA BERLAKU)																
Produk Domestik Regional Bruto (Rp Miliar)																
A. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	59,842	53,782	54,743	55,534	223,901	52,767	56,152	53,929	56,953	219,800	55,235	60,677	62,564	65,654	244,129	63,628
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,240	8,464	8,446	8,685	33,835	8,222	8,664	8,634	9,021	34,542	8,267	9,035	9,264	9,115	35,681	8,730
Pertambangan dan Penggalian	548	529	536	521	2,133	511	523	555	560	2,148	527	560	584	611	2,283	566
Industri Pengolahan	3,528	3,533	3,669	3,699	14,430	3,474	3,627	3,482	4,137	14,721	4,192	4,263	3,684	4,017	16,155	4,394
Pengadaan Listrik dan Gas	151	115	110	117	494	110	115	113	130	468	119	133	144	157	554	158
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	107	107	108	103	426	102	102	106	106	415	102	108	122	100	432	106
Konstruksi	5,944	5,832	5,927	5,982	23,686	5,887	5,940	6,145	6,195	24,167	6,202	6,431	6,993	6,767	26,394	6,393
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,133	5,110	5,014	5,013	20,269	4,799	5,171	5,073	5,303	20,345	5,200	5,565	5,805	6,019	22,588	5,745
Transportasi dan Pergudangan	5,450	3,275	3,416	3,449	15,590	3,184	3,391	2,826	3,029	12,430	3,390	4,271	4,915	5,819	18,395	6,243
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,796	9,140	9,427	9,754	41,117	9,131	9,473	8,629	9,392	36,624	9,483	10,698	11,531	12,288	43,999	12,228
Informasi dan Komunikasi	3,477	3,495	3,641	3,647	14,261	3,678	3,683	3,704	3,785	14,849	3,754	3,765	3,735	3,774	15,029	3,816
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,610	2,287	2,352	2,285	9,534	2,363	2,435	2,445	2,440	9,683	2,634	2,884	2,971	2,993	11,482	3,142
Real Estate	2,487	2,476	2,476	2,491	9,930	2,447	2,539	2,516	2,592	10,095	2,507	2,593	2,669	2,867	10,636	2,638
Jasa Perusahaan	650	631	645	647	2,573	622	650	607	655	2,534	666	703	727	771	2,867	734
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,137	3,165	3,191	3,255	12,747	2,722	3,852	3,210	3,421	13,205	2,547	3,641	3,376	3,798	13,362	2,752
Jasa Pendidikan	3,161	3,231	3,374	3,421	13,187	3,088	3,392	3,401	3,572	13,452	3,071	3,282	3,308	3,700	13,362	3,218
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,447	1,440	1,423	1,472	5,781	1,490	1,598	1,551	1,607	6,245	1,550	1,650	1,625	1,663	6,489	1,621
Jasa lainnya	977	951	990	991	3,909	937	998	933	1,009	3,876	1,025	1,093	1,111	1,195	4,423	1,145
B. Berdasarkan Pengeluaran:	59,842	53,782	54,743	55,534	223,901	52,767	56,152	53,929	56,953	219,800	55,235	60,677	62,564	65,654	244,129	63,628
1. Pengeluaran Konsumsi	36,553	36,718	37,854	39,897	151,023	34,730	38,576	38,181	41,190	152,677	36,093	40,877	41,517	45,178	163,665	40,702
1. a. Konsumsi Rumah Tangga	30,947	29,479	29,833	29,699	119,958	30,173	30,466	30,037	31,431	122,107	31,548	33,165	33,601	34,962	133,276	35,652
1. b. Konsumsi LNPRT	796	740	755	765	3,056	771	779	785	851	3,185	833	925	961	998	3,717	962
1. c. Konsumsi Pemerintah	4,810	6,499	7,267	9,434	28,009	3,785	7,331	7,359	8,909	27,384	3,712	6,787	6,955	9,218	26,672	4,088
2. Investasi	17,946	16,459	16,582	16,962	67,949	17,165	16,548	17,252	16,713	67,678	16,806	17,852	19,608	19,311	73,576	17,745
2. a. PMTB	17,836	16,346	16,467	16,844	67,494	17,036	16,417	17,130	16,584	67,167	16,662	17,711	19,465	19,171	73,009	17,586
2. b. Perubahan Inventori	110	113	115	118	456	129	131	123	128	511	144	140	142	140	567	159
3. Neraca Perdagangan Bersih	5,343	605	306	-1,325	4,929	872	1,028	-1,504	-950	-554	6,025	15,010	28,385	6,248	55,668	11,681
3. a. Ekspor Luar Negeri	19,979	1,433	1,530	1,697	24,639	1,657	1,672	1,560	2,034	6,923	3,012	7,505	14,192	19,363	44,072	19,999
3. b. Impor Luar Negeri	3,497	612	315	337	4,761	287	200	162	205	854	272	1,376	2,121	2,542	6,311	3,250
3. c. Net Ekspor Antar Daerah	-11,140	-216	-908	-2,685	-14,949	-498	-444	-2,902	-2,779	-6,623	2,741	6,129	12,071	-15,656	5,285	-11,568

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA KONSTAN/ ADHK (% , yoy)

INDIKATOR	2020				2020	2021				2021	2022				2022	2023
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
A. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	38,611	35,807	36,380	36,724	147,521	34,826	36,819	35,314	36,912	143,870	35,323	37,944	38,170	39,356	150,793	37,464
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,147	5,345	5,327	5,451	21,269	5,137	5,371	5,311	5,505	21,324	4,999	5,409	5,440	5,285	21,133	4,971
Pertambangan dan Penggalian	351	338	341	332	1,363	325	333	352	354	1,364	331	347	359	371	1,408	341
Industri Pengolahan	2,378	2,377	2,459	2,477	9,692	2,319	2,402	2,287	2,692	9,700	2,694	2,704	2,333	2,517	10,248	2,726
Pengadaan Listrik dan Gas	86	66	63	67	283	63	66	65	74	268	68	76	80	87	311	87
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	85	85	85	82	337	79	79	83	83	324	79	84	92	75	330	79
Konstruksi	4,011	3,931	3,982	3,986	15,910	3,908	3,912	4,011	4,007	15,838	3,973	4,056	4,317	4,190	16,536	3,945
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,600	3,581	3,534	3,504	14,219	3,332	3,581	3,495	3,633	14,041	3,530	3,699	3,781	3,876	14,887	3,660
Transportasi dan Pergudangan	2,658	1,754	1,827	1,827	8,066	1,696	1,789	1,538	1,631	6,654	1,751	1,988	2,083	2,260	8,081	2,367
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,175	5,389	5,571	5,768	23,903	5,396	5,579	5,062	5,427	21,464	5,413	6,045	6,362	6,645	24,466	6,430
Informasi dan Komunikasi	3,019	3,038	3,159	3,159	12,375	3,170	3,160	3,160	3,224	12,714	3,168	3,167	3,136	3,168	12,640	3,172
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,748	1,559	1,598	1,551	6,457	1,571	1,588	1,565	1,520	6,243	1,618	1,693	1,716	1,720	6,747	1,800
Real Estate	1,884	1,873	1,871	1,877	7,505	1,837	1,903	1,880	1,922	7,541	1,854	1,903	1,921	2,035	7,713	1,861
Jasa Perusahaan	440	427	435	436	1,737	416	433	402	431	1,681	432	451	458	483	1,824	458
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,217	2,218	2,218	2,237	8,890	1,866	2,607	2,176	2,306	8,956	1,693	2,376	2,172	2,382	8,624	1,709
Jasa Pendidikan	2,150	2,192	2,271	2,303	8,917	2,073	2,269	2,268	2,366	8,977	2,030	2,161	2,160	2,436	8,787	2,104
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,023	1,009	990	1,020	4,042	1,027	1,099	1,057	1,091	4,274	1,043	1,099	1,074	1,095	4,311	1,060
Jasa lainnya	640	623	647	647	2,558	610	647	603	646	2,506	648	684	685	729	2,746	694
B. Berdasarkan Pengeluaran:	38,611	35,807	36,380	36,724	147,521	34,826	36,819	35,314	36,912	143,870	35,323	37,944	38,170	39,356	150,793	37,464
1. Pengeluaran Konsumsi	24,339	24,293	25,147	26,277	100,056	22,940	25,167	25,078	26,800	99,985	23,358	25,723	25,697	28,071	102,849	25,083
1. a. Konsumsi Rumah Tangga	20,968	19,993	20,386	20,254	81,602	20,176	20,339	20,166	21,045	81,727	20,682	21,169	21,080	22,044	84,975	22,117
1. b. Konsumsi LNPR	519	484	496	502	2,001	499	503	509	549	2,061	527	573	585	604	2,289	575
1. c. Konsumsi Pemerintah	2,851	3,816	4,266	5,520	16,454	2,265	4,324	4,402	5,206	16,198	2,149	3,981	4,032	5,423	15,585	2,390
2. Investasi	12,633	11,293	11,304	11,579	46,809	11,614	10,957	11,343	10,903	44,817	10,803	11,391	12,412	11,839	46,445	10,765
2. a. PMTB	12,585	11,241	11,250	11,523	46,599	11,547	10,888	11,278	10,835	44,548	10,728	11,320	12,340	11,768	46,155	10,686
2. b. Perubahan Inventori	48	52	53	57	210	67	69	65	68	269	75	72	72	71	289	78
3. Neraca Perdagangan Bersih	1,639	220	-71	-1,132	656	272	695	-1,107	-792	-932	3,587	9,083	17,113	-553	29,230	54,872
3. a. Ekspor Luar Negeri	11,182	899	932	997	14,009	973	1,000	940	1,201	4,114	1,794	4,541	8,556	11,581	26,472	11,873
3. b. Impor Luar Negeri	2,269	408	210	225	3,112	183	128	102	130	543	165	846	1,280	1,537	3,828	1,941
3. c. Net Ekspor Antar Daerah	-7,273	-270	-793	-1,904	-10,241	-519	-176	-1,945	-1,863	-4,503	1,629	3,695	7,277	-10,597	2,003	-8,314

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA (% , yoy)

Kabupaten/Kota	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jembrana (% , yoy)	6.11	5.69	6.05	6.19	5.96	5.28	5.59	5.56	-4.98	-0.65	2.98
Tabanan (% , yoy)	6.12	6.45	6.53	6.19	6.14	5.37	5.71	5.58	-6.17	-1.97	2.94
Badung (% , yoy)	7.64	6.82	6.98	6.24	6.81	6.08	6.73	5.81	-16.55	-6.74	9.97
Gianyar (% , yoy)	7.08	6.82	6.80	6.30	6.31	5.46	6.01	5.62	-8.40	-1.07	4.04
Klungkung (% , yoy)	6.25	6.05	5.98	6.11	6.28	5.32	5.48	5.42	-6.38	-0.23	3.12
Bangli (% , yoy)	6.20	5.94	5.83	6.16	6.24	5.31	5.48	5.45	-4.10	-0.33	2.79
Karangasem (% , yoy)	5.93	6.16	6.01	6.00	5.92	5.06	5.44	5.50	-4.49	-0.56	2.58
Buleleng (% , yoy)	6.78	7.15	6.96	6.07	6.02	5.38	5.60	5.51	-5.80	-1.22	3.11
Denpasar (% , yoy)	7.51	6.96	7.00	6.14	6.51	6.05	6.42	5.82	-9.43	-0.91	5.06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU/ ADHB (Rp Miliar)

Kabupaten/Kota	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jembrana	6.973	7.770	9.020	10.198	11.168	12.116	13.137	14.137	13.439	13.510	14.532
Tabanan	11.470	12.967	15.066	16.996	18.630	20.377	22.128	23.796	22.258	22.010	23.681
Badung	27.201	31.790	37.273	42.429	47.208	52.344	57.791	62.836	49.014	44.804	55.290
Gianyar	13.605	15.368	17.909	20.140	22.113	24.224	26.460	28.520	25.865	25.836	27.944
Klungkung	4.398	4.900	5.676	6.426	7.112	7.785	8.459	9.100	8.451	8.529	9.210
Bangli	3.363	3.779	4.382	4.946	5.457	5.977	6.490	6.994	6.716	6.799	7.338
Karangasem	8.232	9.293	10.785	12.233	13.411	14.598	15.886	17.087	16.408	16.488	17.669
Buleleng	16.927	19.144	22.355	25.170	27.690	30.319	32.927	35.362	33.306	33.337	35.805
Denpasar	25.819	29.389	34.210	38.424	42.384	46.836	51.375	55.456	49.559	49.588	54.650

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA KONSTAN/ ADHK (Rp Miliar)

Kabupaten/Kota	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jembrana	6.366	6.728	7.135	7.576	8.028	8.452	8.924	9.420	8.951	8.893	9.158
Tabanan	10.500	11.178	11.908	12.645	13.421	14.142	14.949	15.783	14.809	14.517	14.942
Badung	24.028	25.667	27.458	29.170	31.157	33.052	35.275	37.326	31.148	29.050	31.947
Gianyar	12.509	13.361	14.269	15.169	16.125	17.005	18.027	19.041	17.442	17.255	17.957
Klungkung	4.036	4.280	4.536	4.813	5.116	5.388	5.683	5.991	5.609	5.596	5.770
Bangli	3.097	3.281	3.472	3.686	3.916	4.124	4.350	4.587	4.399	4.385	4.507
Karangasem	7.538	8.002	8.483	8.992	9.524	10.006	10.550	11.130	10.630	10.571	10.843
Buleleng	15.480	16.587	17.742	18.819	19.951	21.024	22.201	23.425	22.066	21.798	22.463
Denpasar	23.397	25.026	26.779	28.423	30.273	32.105	34.166	36.154	32.745	32.447	34.083

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PANGSA PDRB KABUPATEN KOTA TERHADAP PROVINSI (%)

Kabupaten/Kota	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jembrana (%)	5,91	5,78	5,76	5,76	5,72	5,65	5,60	5,58	5,97	6,12	5,90
Tabanan (%)	9,72	9,65	9,62	9,60	9,55	9,50	9,43	9,39	9,89	9,96	9,62
Badung (%)	23,05	23,65	23,79	23,98	24,19	24,39	24,63	24,81	21,78	20,28	22,46
Gianyar (%)	11,53	11,43	11,43	11,38	11,33	11,29	11,28	11,26	11,49	11,70	11,35
Klungkung (%)	3,73	3,65	3,62	3,63	3,64	3,63	3,61	3,59	3,76	3,86	3,74
Bangli (%)	2,85	2,81	2,80	2,79	2,80	2,79	2,77	2,76	2,98	3,08	2,98
Karangasem (%)	6,98	6,91	6,88	6,91	6,87	6,80	6,77	6,75	7,29	7,46	7,18
Buleleng (%)	14,35	14,24	14,27	14,22	14,19	14,13	14,03	13,96	14,80	15,09	14,55
Denpasar (%)	21,88	21,87	21,83	21,71	21,72	21,83	21,89	21,89	22,02	22,45	22,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

KREDIT RUMAH TANGGA BERDASARKAN LOKASI PROYEK (Rp Triliun)

INDIKATOR	2019				2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I												
Kredit RT. Total (Rp triliun)	33,90	34,84	35,14	36,10	36,37	35,82	35,65	35,28	34,74	34,12	34,00	33,37	33,27	33,08	33,55	34,28	34,55
g Kredit RT. Total (% yoy)	6,12	7,15	6,17	6,95	7,28	2,83	1,45	-2,27	-4,48	-4,76	-5,17	-5,86	-4,24	-3,03	-1,32	2,73	3,86
KPR (Rp triliun)	10,70	10,98	11,21	11,31	11,31	11,15	10,94	11,00	10,95	10,86	10,71	10,96	10,92	10,19	10,75	10,55	10,61
RT. KPR sd 21	0,69	0,69	0,70	0,71	0,70	0,69	0,69	0,70	0,69	0,67	0,65	0,64	0,63	0,44	0,43	0,43	0,53
RT. KPR sd 70	5,25	5,50	5,70	5,78	5,86	5,81	5,80	5,89	5,91	5,96	5,97	6,12	6,13	6,18	6,21	6,34	6,51
RT. KPR 70+	4,76	4,78	4,80	4,82	4,76	4,64	4,45	4,42	4,36	4,23	4,09	4,21	4,16	3,57	3,71	3,78	3,57
KPA (Rp triliun)	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,09	0,08	0,09	0,10	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
RT. KPA sd 21	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RT. KPA sd 70	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
RT. KPA 70+	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
RT. Ruko (Rp triliun)	0,56	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,47	0,45	0,45	0,43	0,44	0,40	0,41	0,41	0,39	0,35	0,34
KKB (Rp triliun)	2,70	2,74	2,76	2,86	2,95	2,68	2,40	2,12	1,84	1,62	1,35	1,36	1,26	1,26	1,33	1,53	1,69
RT. KKB Roda 4	2,43	2,39	2,43	2,53	2,55	2,34	2,11	1,88	1,64	1,46	1,22	1,20	1,15	1,16	1,22	1,43	1,58
RT. KKB Roda 2	0,21	0,26	0,27	0,27	0,27	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
RT. KKB Roda 6	0,01	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	0,02	0,02
RT. KKB Lainnya	0,05	0,05	0,05	0,06	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
RT. Multiguna (Rp triliun)	16,98	17,51	17,81	18,36	18,70	18,75	19,07	18,93	18,71	18,45	17,76	17,66	18,13	18,48	18,50	18,62	18,59
NPL Kredit RT (Gross %)	1,60	1,62	1,64	1,47	1,79	2,16	2,12	1,68	1,78	1,91	1,90	1,60	1,75	1,67	1,63	1,47	1,52

Sumber: LBU, Bank Indonesia

KREDIT RUMAH TANGGA BERDASARKAN LOKASI PROYEK (Rp Triliun)

xxvii

LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI BALI

INDIKATOR	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Kredit Korporasi Nonkeuangan (Rp triliun)	31.19	31.15	31.38	29.72	30.64	30.86	31.86	31.20	32.03	32.86	31.56	32.90	30.79
Perubahan Kredit Korporasi Nonkeuangan (% yoy)	6.69	-0.49	0.62	-5.46	-1.77	-0.91	1.52	4.98	4.53	6.48	-0.94	5.43	-3.86
Total Modal Kerja (Rp triliun)	9.41	10.32	9.72	8.75	8.53	8.61	10.60	8.85	9.21	9.31	9.96	10.39	9.77
Perubahan Modal Kerja (% yoy)	-11.68	-4.58	-2.77	-13.61	-9.35	-16.60	9.07	1.14	8.00	8.14	-6.04	17.41	6.12
Total Investasi (Rp triliun)	21.76	20.81	21.65	20.96	22.11	22.21	21.25	22.30	22.79	23.52	21.57	22.47	21.00
Perubahan Investasi (% yoy)	17.28	1.80	2.33	-1.44	1.60	6.71	-1.88	6.37	3.07	5.91	1.51	0.79	-7.85
Investasi Gross (%)	7.10	6.19	6.81	6.32	8.23	8.11	7.63	7.54	7.62	6.98	7.71	7.95	7.66

Sumber: LBU, Bank Indonesia

INDIKATOR PERBANKAN - BANK UMUM BERDASARKAN LOKASI PROYEK (Rp Triliun)

	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Asset (Rp Triliun)	132.85	127.61	128.60	129.88	129.49	132.94	132.49	136.41	134.16	139.71	150.16	160.25	161.55
Perubahan Total Asset (% yoy)	8.84	-0.29	-3.48	-0.68	-2.54	4.17	3.03	5.02	3.61	5.10	13.33	17.47	20.41
DPK (Rp Triliun) - DPK KCKCP	103.24	98.58	98.76	100.22	99.32	101.76	100.87	104.10	105.58	110.48	119.68	126.48	131.57
Giro (Rp Triliun)	15.85	13.72	13.79	12.34	13.72	14.15	13.95	15.26	16.35	17.59	20.39	21.03	22.65
Tabungan (Rp Triliun)	52.42	49.20	48.56	50.94	49.41	51.37	51.53	54.12	55.16	59.00	64.88	70.60	74.47
Deposito (Rp Triliun)	34.97	35.66	36.41	36.94	36.19	36.24	35.40	34.72	34.07	33.90	34.42	34.85	34.46
Perubahan DPK (% yoy)	8.34	5.27	3.59	1.38	-3.33	-0.38	0.09	6.21	7.15	10.66	19.78	21.69	24.75
Perubahan Giro (% yoy)	-4.39	-6.44	-10.71	-22.08	-18.82	-12.20	-4.46	12.13	23.94	34.52	46.26	37.81	38.56
Perubahan Tabungan (% yoy)	12.17	6.86	4.40	4.34	-3.12	-0.78	1.79	11.78	14.52	19.26	27.59	30.72	35.23
Perubahan Deposito (% yoy)	9.36	8.28	9.09	8.00	3.87	5.79	-0.45	-3.52	-8.36	-9.11	-2.04	0.52	1.17
Kredit (Rp Triliun) - Lokasi Pro	104.29	103.51	104.48	102.96	104.27	104.02	105.00	103.81	105.56	107.11	106.77	108.08	107.63
Modal Kerja	33.23	34.20	34.64	34.01	34.18	34.15	36.18	34.26	35.00	35.69	36.60	36.51	36.11
Investasi	34.64	33.47	34.16	33.68	35.32	35.70	34.80	36.12	37.24	38.28	36.56	37.29	36.91
Konsumsi	36.42	35.85	35.67	35.28	34.76	34.17	34.02	33.43	33.32	33.13	33.60	34.28	34.61
Perubahan Kredit Umum (% yoy)	7.36	2.58	2.47	-0.48	-0.02	0.49	0.49	0.82	1.24	2.97	1.69	4.12	1.96
Perubahan Modal Kerja (% yoy)	-0.96	0.11	3.32	1.30	2.88	-0.13	4.43	0.73	2.37	4.51	1.17	6.57	3.19
Perubahan Investasi (% yoy)	16.98	5.10	2.77	-0.12	1.97	6.66	1.86	7.24	5.44	7.24	5.07	3.26	-0.90
Perubahan Konsumsi (% yoy)	7.18	2.70	1.37	-2.47	-4.55	-4.69	-4.65	-5.23	-4.15	-3.03	-1.22	2.55	3.87
Loan to Deposit Ratio (%)	101.02	105.00	105.79	102.74	104.98	102.22	104.09	99.72	99.98	96.95	89.21	85.45	81.80
NPL Gross (%)	3.80	3.66	3.68	3.18	3.78	3.87	3.88	4.00	4.18	4.07	4.14	4.03	3.83

Sumber: LBU, Bank Indonesia

DANA PERBANKAN BANK UMUM (Rp Triliun)

INDIKATOR	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total (Rp triliun)	103.24	98.58	98.76	100.22	99.32	101.76	100.87	104.10	105.58	110.48	119.68	126.48	131.57
Giro (Rp triliun)	15.85	13.72	13.79	12.34	13.72	14.15	13.95	15.26	16.35	17.59	20.39	21.03	22.65
Tabungan (Rp triliun)	52.42	49.20	48.56	50.94	49.41	51.37	51.53	54.12	55.16	59.00	64.88	70.60	74.47
Deposito (Rp triliun)	34.97	35.66	36.41	36.94	36.19	36.24	35.40	34.72	34.07	33.90	34.42	34.85	34.46

Sumber: LBU, Bank Indonesia

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN LOKASI BANK UMUM (Rp Triliun)

Kabupaten/Kota	Indikator	2020				2021				2022				2023
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Jembrana	Kredit (Rp Triliun)	2.77	2.78	2.85	2.93	2.99	3.08	3.14	3.20	3.28	3.34	3.35	3.41	3.44
	DPK (Rp Triliun)	2.24	2.32	2.30	2.16	2.14	2.27	2.45	2.30	2.35	2.44	2.47	2.54	1.93
Tabanan	Kredit (Rp Triliun)	4.66	4.65	4.80	4.94	5.02	5.11	5.15	5.20	5.28	5.38	5.45	5.55	5.61
	DPK (Rp Triliun)	4.77	4.85	4.97	4.87	4.83	4.96	5.52	5.27	5.36	5.66	6.01	6.22	4.57
Badung	Kredit (Rp Triliun)	10.70	10.43	10.75	10.86	10.79	10.90	10.64	10.61	10.78	10.80	10.94	11.06	11.37
	DPK (Rp Triliun)	22.89	20.81	20.22	20.56	20.54	20.95	19.78	21.25	22.01	24.31	28.48	31.37	30.42
Gianyar	Kredit (Rp Triliun)	3.92	3.89	3.99	4.12	4.22	4.34	4.41	4.52	4.54	4.61	4.68	4.77	4.79
	DPK (Rp Triliun)	8.19	7.74	7.48	7.41	7.40	7.45	7.68	7.50	7.75	8.31	8.28	10.12	5.73
Klungkung	Kredit (Rp Triliun)	2.12	2.65	2.70	2.73	2.75	2.80	2.85	2.84	2.88	2.91	2.93	2.99	2.98
	DPK (Rp Triliun)	2.14	2.20	2.21	2.31	2.27	2.32	2.46	2.39	2.44	2.65	2.69	2.77	2.61
Bangli	Kredit (Rp Triliun)	2.05	2.06	2.09	2.15	2.19	2.21	2.84	2.22	2.22	2.23	2.25	2.25	2.26
	DPK (Rp Triliun)	1.46	1.50	1.64	1.51	1.45	1.58	1.71	1.47	1.59	1.69	1.84	1.75	1.60
Karangasem	Kredit (Rp Triliun)	3.35	2.78	2.85	2.85	2.90	2.97	3.01	3.05	3.11	3.19	3.25	3.30	3.34
	DPK (Rp Triliun)	2.83	2.89	2.85	2.67	2.71	2.82	2.95	2.83	2.99	3.14	3.27	3.27	2.92
Buleleng	Kredit (Rp Triliun)	6.68	6.59	6.76	6.84	6.95	7.11	7.15	7.18	7.31	7.47	7.56	7.54	7.60
	DPK (Rp Triliun)	4.62	4.68	4.65	4.58	4.64	4.90	4.87	4.78	5.12	5.26	5.52	5.38	6.10
Denpasar	Kredit (Rp Triliun)	46.47	46.01	46.09	45.89	45.66	45.50	45.57	45.41	45.56	45.79	46.06	46.62	46.58
	DPK (Rp Triliun)	53.94	51.43	52.31	54.00	53.19	54.35	52.50	56.16	55.85	56.96	60.12	63.09	75.66

Sumber: LBU, Bank Indonesia

KREDIT UMKM BERDASARKAN LOKASI PROYEK (Rp Triliun)

Kredit UMKM	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit UMKM (Rp Triliun)	39.09	38.32	39.02	39.36	39.93	40.69	41.50	43.55	44.43	45.40	45.61	46.00	46.33
g Kredit UMKM (%.yoy)	6.79	0.60	0.17	1.67	2.15	6.17	6.36	10.66	11.27	11.57	9.88	5.63	4.29
Mikro (Triliun)	8.65	8.25	7.98	7.72	7.34	7.45	7.60	10.72	11.80	12.74	14.41	15.07	17.05
Kecil (Triliun)	15.00	14.73	15.07	15.26	15.74	16.84	17.18	20.74	20.76	21.10	20.34	20.30	19.49
Menengah (Triliun)	15.44	15.35	15.98	16.37	16.85	16.40	16.72	12.09	11.87	11.55	10.85	10.63	9.80
NPL (%)	3.10	3.37	3.20	2.64	2.60	2.91	3.04	3.12	3.46	3.65	2.99	2.50	2.54

Sumber: LBU, Bank Indonesia

SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DAN NONTUNAI (Rp Triliun)

INDIKATOR	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Transaksi Tunai													
Inflow (Rp Triliun)	5.76	3.77	2.83	2.36	4.08	2.43	1.72	1.50	3.54	1.93	1.92	1.57	4.06
Outflow (Rp Triliun)	4.02	2.35	3.20	4.54	1.76	3.59	1.69	3.80	1.52	4.24	2.82	4.20	-2.26
Kliring													
Nom. Kliring (Rp triliun)	12.15	8.20	7.96	8.90	7.70	7.67	7.51	8.79	7.67	7.91	8.34	8.83	8.06
Vol. Kliring (ribu lembar)	380	265	258	272	221	212	202	234	195	205	222	238	195
RTGS													
Nom. RTGS (Rp triliun)	31.94	27.13	29.04	29.93	27.21	29.90	28.83	31.42	29.65	28.85	32.07	34.27	44.23
Vol. RTGS (lembar)	19.729	16.252	18.081	21.299	18.348	17.906	17.790	20.798	17.771	19.942	22.296	23.855	23.824

Sumber: LBU, Bank Indonesia

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

- Perekonomian Bali pada triwulan I 2023 tercatat tumbuh sebesar 6,04% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,61% (yoy). Perlambatan ekonomi Bali dipengaruhi oleh normalisasi kunjungan wisatawan domestik pasca berlalunya periode HBKN Natal dan tahun baru 2023, libur sekolah akhir tahun, dan menurunnya kunjungan pelaku MICE *event* mancanegara berakhirnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga didukung dengan semakin meningkatnya jumlah maskapai internasional yang membuka rute penerbangan langsung ke Bali, serta sejumlah pelonggaran kebijakan yang memberikan iklim positif bagi industri pariwisata di Provinsi Bali. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Bali tercermin dari perlambatan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada Investasi dan Ekspor Luar Negeri (LN), namun pertumbuhan tetap ditopang oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah.



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tantular
No. 4, Denpasar

Mei

2023

GAMBARAN UMUM

Ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2023 tetap tumbuh kuat, meski melambat dari 6,61% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 6,04% (yoy). Perlambatan ekonomi Bali dipengaruhi oleh normalisasi kunjungan wisatawan domestik pasca berlalunya periode HBKN Natal dan tahun baru 2023, libur sekolah akhir tahun, dan menurunnya kunjungan pelaku MICE event mancanegara pasca berakhirnya event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Sejalan dengan itu, pasca pembangunan infrastruktur untuk mendukung KTT G20 yang menyerap anggaran dalam jumlah besar pada 2022, penambahan pembangunan infrastruktur pada triwulan I 2023 relatif lebih rendah. Meskipun demikian, semakin meningkatnya jumlah maskapai internasional yang membuka rute penerbangan langsung ke Bali turut menjaga pertumbuhan berbagai lapangan usaha (LU) terkait pariwisata tetap kuat. Hal ini didukung pula dengan sejumlah pelonggaran kebijakan yang memberikan iklim positif bagi industri pariwisata di Provinsi Bali. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Bali tercermin dari perlambatan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, sementara LU Pertanian dan Konstruksi mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Sementara dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada investasi dan ekspor luar negeri (LN), namun justru terjadi peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

1.1. KINERJA PEREKONOMIAN BALI TRIWULAN I 2023

Perekonomian Bali tercatat melambat secara tahunan pada triwulan I 2023. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada triwulan I 2023 mencapai Rp37,46 triliun atau tumbuh 6,04% (yoy) (Grafik 1.1). Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan laporan melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 6,61% (yoy). Meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, ekonomi Bali pada triwulan I 2023 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,03% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2023 berada pada urutan ke-6 (enam) dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia (Grafik 1.2). Perlambatan ekonomi Bali pada triwulan I 2023 secara umum terjadi seiring dengan normalisasi kunjungan wisatawan domestik pasca berlalunya HBKN Natal dan tahun baru serta periode libur sekolah akhir tahun yang secara *seasonal* menjadi puncak kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Meskipun demikian, deselerasi yang terjadi masih relatif terkendali didukung minat kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali yang tetap tinggi, seiring telah dibukanya pembatasan aktivitas di Tiongkok yang mendorong kembali masuknya wisatawan asal Tiongkok ke Bali. Jumlah maskapai internasional yang masuk ke

Bali juga semakin meningkat¹, sehingga aksesibilitas wisatawan mancanegara ke Bali membaik.

Meski terus berada dalam tren pemulihan, hingga triwulan I 2023 kinerja ekonomi Bali masih belum pulih sebagaimana tahun 2019 sebelum berlangsungnya pandemi. Rata-rata kunjungan wisman bulanan hingga periode April 2023 yang mencapai 65,4% dari rata-rata kunjungan wisman bulanan pada tahun 2019, sehingga kinerja LU terkait pariwisata belum sepenuhnya pulih. Lebih lanjut, LU Pertanian pada triwulan I 2023 juga mengalami kontraksi secara tahunan akibat penurunan luas panen padi maupun produksi padi pada periode tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, ADHK Provinsi Bali pada triwulan I 2023 masih berada di bawah rata-rata ADHK tahun 2019 (Grafik 1.3).

Dari sisi pengeluaran, masih tingginya pertumbuhan perekonomian Bali ditopang oleh akselerasi konsumsi RT dan konsumsi Pemerintah. Akselerasi pertumbuhan konsumsi didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi RT seiring dengan penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 30 Desember 2022, serta momentum hari

1. Hingga 31 Maret 2023 terdapat 30 operator maskapai penerbangan yang membuka rute *direct flight*, yang menjangkau 15 negara dan 23 kota.

1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI PENGELUARAN

1.2.1. Konsumsi

Pertumbuhan total konsumsi pada triwulan I 2023 tercatat terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga (RT) dan konsumsi Pemerintah.

Komponen konsumsi tercatat tumbuh 6,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,74% (yoy). Akselerasi pertumbuhan konsumsi didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi RT dan Pemerintah, namun tertahan akibat melambatnya pertumbuhan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR). Perbaikan kinerja konsumsi RT seiring dengan meningkatnya optimisme atas kondisi ekonomi dan indeks ekspektasi konsumen, di tengah bertambahnya lapangan kerja. Pertumbuhan konsumsi Pemerintah juga sejalan dengan peningkatan realisasi seluruh komponen belanja Pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBN (Tabel 1.1).

Kinerja konsumsi RT terakselerasi pada triwulan laporan. Pada triwulan I 2023, konsumsi RT tumbuh 6,92% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,74% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat seiring dengan penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 30 Desember 2022, serta momentum hari raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Selain itu, jumlah frekuensi penerbangan domestik dan internasional juga meningkat signifikan pada triwulan I 2023. Namun, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh menurunnya aktivitas belanja setelah berakhirnya berbagai *side event* dan acara puncak G20 di Bali.

Pertumbuhan kinerja konsumsi RT juga terkonfirmasi dari perbaikan kinerja penyaluran total kredit konsumsi, nilai impor barang konsumsi, serta konsumsi barang tahan lama yang terus meningkat. Pada triwulan I 2023, kinerja total penyaluran kredit konsumsi RT di Bali tumbuh mencapai 3,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh

mencapai 2,57% (yoy) (Grafik 1.4). Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan minat konsumsi masyarakat seiring dengan pemulihan aktivitas perekonomian yang semakin membaik, pengendalian penyebaran virus Covid-19, serta pemerataan vaksinasi tahap I, tahap II, dan akselerasi *booster* vaksinasi. Lebih lanjut, nilai impor barang konsumsi mencapai 12,24 juta dolar Amerika Serikat (AS), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 11,73 juta dolar AS (Grafik 1.5). Peningkatan konsumsi barang tahan lama juga tercermin dari membaiknya kinerja penyaluran kredit Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR-A) pada triwulan I 2023 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 1.6). Perbaikan tersebut didorong oleh berbagai insentif kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia seperti kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit spasial Provinsi Bali yang diperpanjang, serta pelonggaran *Loan to Value* (LTV) hingga 31 Desember 2023.

Ke depan, ekspektasi konsumen membaik sejalan dengan terus berlanjutnya pemulihan ekonomi.

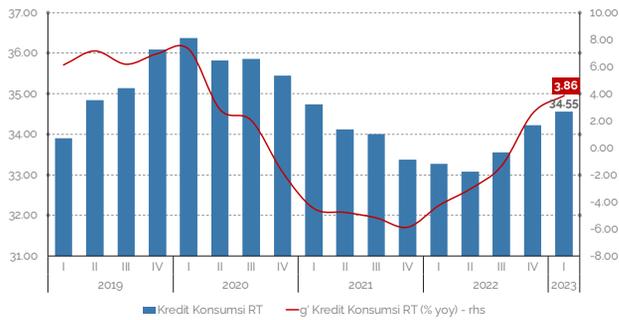
Berdasarkan Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia, Indeks Ekspektasi Konsumen, Indeks Ekspektasi Penghasilan, serta Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja di Bali pada triwulan I 2023 berturut-turut tercatat sebesar 145,50; 137,75; serta 155,00, yang meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 141,44; 131,33; serta 146,33 (Grafik 1.7). Optimisme konsumsi masyarakat juga sejalan dengan berlanjutnya aktivitas pemulihan perekonomian yang disertai dengan berbagai insentif fiskal. Hal ini diharapkan dapat mendorong konsumsi RT lebih tinggi ke depan.

KONSUMSI PEMERINTAH

Kinerja konsumsi Pemerintah tumbuh meningkat pada triwulan I 2023 sejalan dengan peningkatan belanja Pemerintah Pusat dan Daerah yang bersumber dari APBN dan APBD.

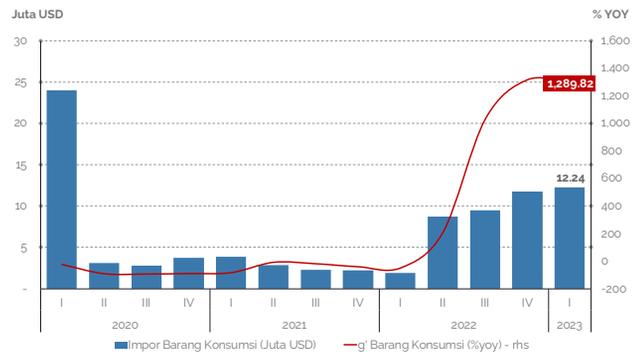
Pada triwulan I 2023, kinerja konsumsi Pemerintah tumbuh mencapai 6,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 4,17% (yoy). Perbaikan ini sejalan dengan realisasi belanja APBN yang mencapai 25,00% (yoy), meningkat dari triwulan IV 2022 yang berkontraksi sebesar -0,10% (yoy). Realisasi belanja APBD Provinsi dan seluruh Kabupaten/

Grafik 1.4. Perkembangan Penyaluran Total Kredit Konsumsi RT



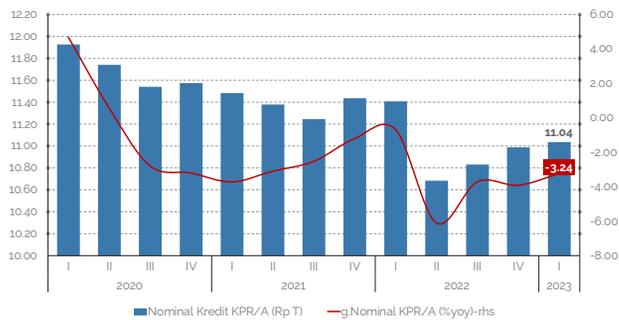
Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), diolah

Grafik 1.5. Perkembangan Impor Barang Konsumsi



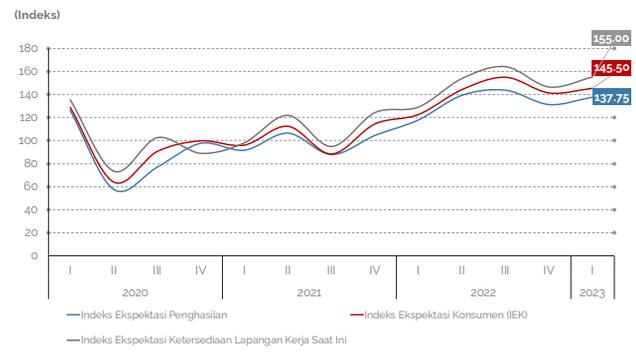
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.6. Perkembangan Penyaluran Kredit KPR/A



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), diolah

Grafik 1.7. Perkembangan Ekspektasi Konsumen di Provinsi Bali



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Kota se-Bali juga meningkat signifikan, masing-masing dari 12,59% dan -6,28% (yoy) pada triwulan IV 2022 hingga mencapai 122,27% dan 126,20% (yoy) pada triwulan I 2023 (Grafik 1.8 dan 1.9). Akselerasi tersebut seiring dengan pembayaran gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja (tukin), serta honorarium kepada pegawai ASN/TNI/POLRI/PPPK. Lebih lanjut, perbaikan kinerja konsumsi Pemerintah juga didorong oleh berlanjutnya belanja bantuan sosial untuk penanganan disabilitas dan Program Indonesia Pintar (PIP), serta didukung dengan belanja

barang untuk penyediaan alat kesehatan dan pengadaan alat untuk penyandang disabilitas.

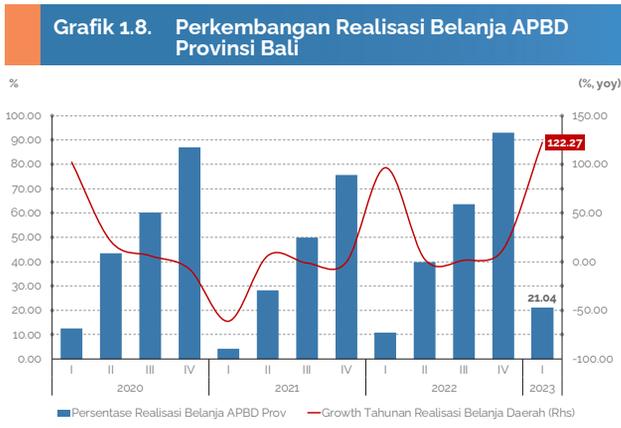
1.2.2. Investasi

Kinerja Investasi Bali yang tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) berkontraksi pada triwulan I 2023 sejalan dengan telah berakhirnya berbagai proyek strategis infrastruktur nasional yang telah selesai dilaksanakan pada triwulan IV 2022. PMTDB di Bali berkontraksi hingga -0,76% (yoy)

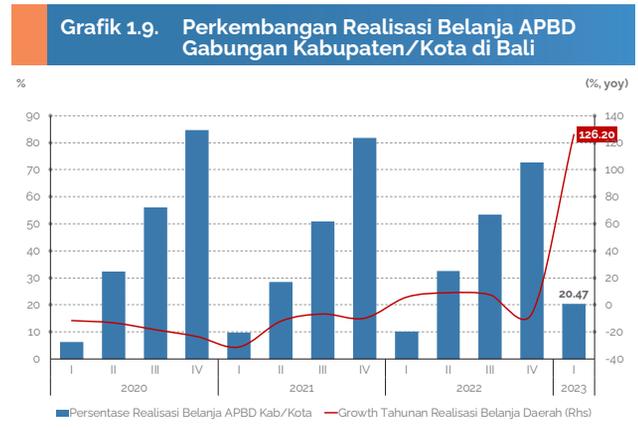
Tabel 1.1. Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Pengeluaran (% yoy)

Komponen	2021				2021	2022				2022	2023
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Konsumsi	(5,75)	3,60	(0,28)	1,99	(0,07)	2,22	2,22	3,94	4,74	3,33	6,97
Kons.RT	(3,78)	1,73	(1,08)	3,90	0,15	2,53	4,09	4,76	4,74	4,04	6,92
Kons.LNPRT	(3,83)	4,03	2,75	9,30	3,00	5,59	13,82	14,81	10,04	11,06	9,09
Kons. Pemerintah	(20,57)	13,32	3,20	(5,69)	(1,55)	(1,27)	(7,95)	(1,07)	4,17	(1,25)	6,89
Investasi	(8,07)	(2,98)	0,35	(5,84)	(4,26)	(6,64)	2,69	6,40	8,58	2,64	(0,72)
PMTB	(8,25)	(3,14)	0,25	(5,96)	(4,40)	(6,75)	2,69	6,38	8,61	2,62	(0,76)
Perubahan Inventori	39,14	32,25	21,87	19,65	27,79	12,13	3,63	10,48	4,01	7,50	4,68
Ekspor LN	(90,78)	17,19	0,80	19,62	(69,27)	74,09	331,21	960,41	814,06	554,56	561,83
Impor LN	(91,86)	(68,40)	(51,21)	(42,30)	(82,42)	(11,20)	553,68	1.153,99	1.072,22	599,81	1.080,17
Net Ekspor antar daerah	(91,95)	(16,31)	133,99	(2,85)	(54,38)	1,15	1.126,64	358,61	450,68	387,69	1.304,72
PDRB	(9,84)	2,83	(2,91)	0,57	(2,46)	1,48	3,09	8,10	6,61	4,84	6,04

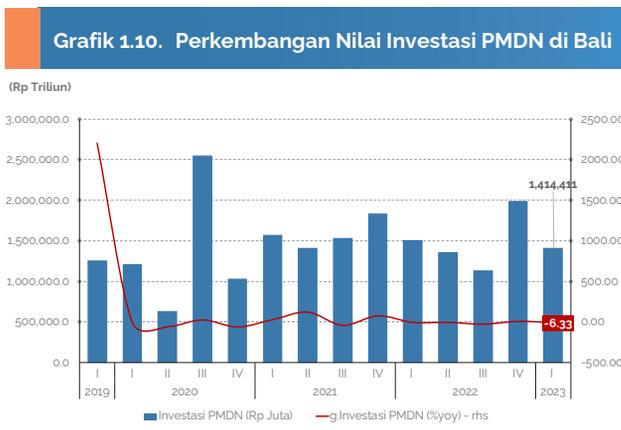
Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)



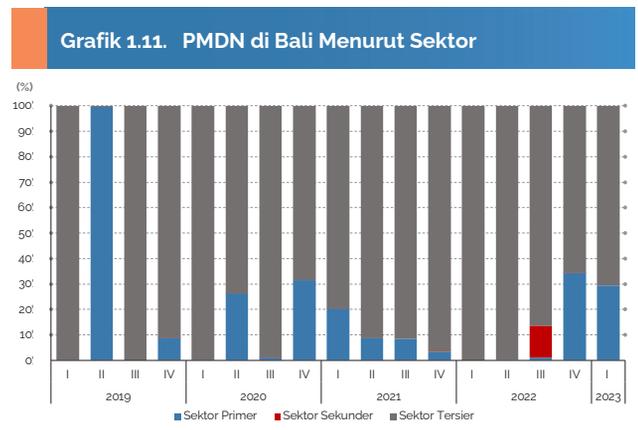
Sumber : BPKAD Provinsi dan Kab./Kota, diolah



Sumber : BPKAD Provinsi dan Kab./Kota, diolah



Sumber : BKPM, diolah



Sumber : BKPM, diolah

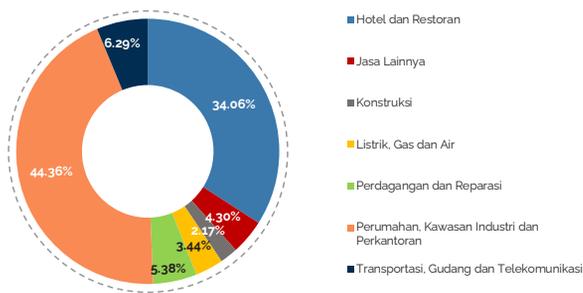
pada triwulan I 2023, menurun dibandingkan triwulan IV 2022 yang mencapai 8,61% (yoy). Kontraksi tersebut sejalan dengan telah berakhirnya realisasi investasi pada berbagai proyek prioritas infrastruktur nasional di Bali pada triwulan IV 2022, terutama untuk proyek strategis pendukung KTT G20.

Kinerja investasi yang menurun juga terkonfirmasi melalui hasil pencatatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terutama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Realisasi PMDN di Bali pada triwulan I 2023 tercatat hanya sebesar Rp1,41 triliun atau terkontraksi hingga -6,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp1,99 triliun atau tumbuh sebesar 8,45% (yoy) (Grafik 1.10). Berdasarkan sektor, realisasi PMDN di Bali masih didominasi oleh sektor tersier, terutama sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (pangsa 44,36%), serta Hotel dan Restoran (pangsa 34,06%) (Grafik 1.11 dan Grafik 1.12). Meskipun demikian, kontraksi yang lebih dalam pada investasi di Bali tertahan oleh pertumbuhan investasi asing, tercermin dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang

tumbuh hingga 153,83% (yoy) pada triwulan I 2023 seiring dengan pemulihan aktivitas perekonomian di tengah kondisi perekonomian global yang membaik (Grafik 1.13). Selain itu, realisasi investasi yang bersumber dari belanja modal Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur publik hingga triwulan I 2023 juga turut berkontribusi menahan kontraksi yang lebih dalam pada komponen pengeluaran investasi.

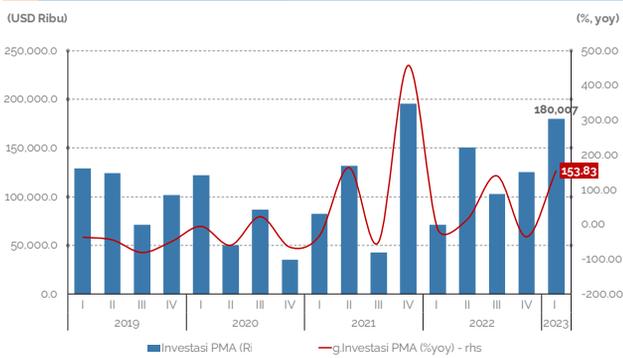
Selain itu, penurunan kinerja investasi juga terkonfirmasi dari hasil liaison ke pelaku usaha dan impor barang modal Bali yang turut menurun. Indikator kondisi investasi pada hasil liaison ke pelaku usaha menunjukkan penurunan realisasi investasi yang tercatat dari hasil skala likert sebesar 1,09 pada triwulan I 2023, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 yang mencapai skala likert 1,58 (Grafik 1.14). Lebih lanjut, impor barang modal juga tumbuh melambat pada triwulan I 2023 sebesar 226,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 242,40% (yoy). Hal ini ditengarai sejalan dengan menurunnya impor untuk proyek infrastruktur strategis yang telah

Grafik 1.12. Pangsa PMDN di Bali pada Triwulan IV 2022



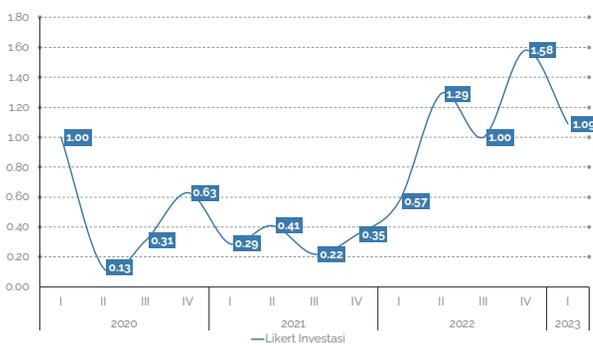
Sumber : BKPM, diolah

Grafik 1.13. Perkembangan Nilai Investasi PMA di Bali



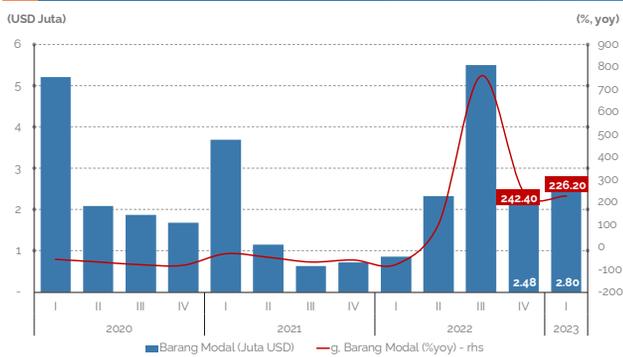
Sumber : BKPM, diolah

Grafik 1.14. Skala Likert Hasil Liaison Kondisi Investasi Triwulan I 2023



Sumber : Hasil Liaison Pelaku Usaha, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.15. Perkembangan Impor Barang Modal



Sumber : Bea Cukai, diolah

diselesaikan pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.15).

1.2.3. Ekspor dan Impor

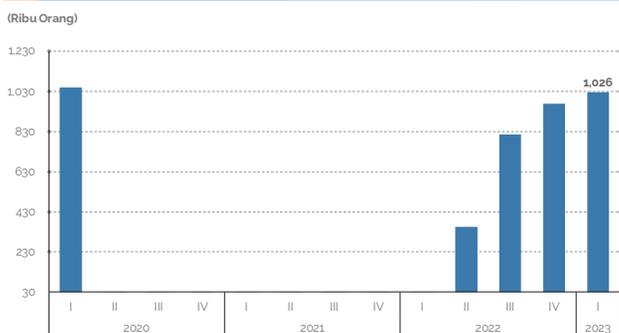
Perbaikan kinerja neraca perdagangan Bali masih pada triwulan I 2023 didorong oleh ekspor jasa dan barang sejalan dengan pencabutan kebijakan pembatasan mobilitas PPKM, serta pemulihan aktivitas perekonomian dan pariwisata. Neraca perdagangan gabungan (luar negeri dan antardaerah) tercatat tumbuh signifikan mencapai 55,83% (yoy) pada triwulan I 2023, meningkat lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi hingga -29,83% (yoy). Berdasarkan nilai nominalnya, neraca perdagangan Bali pada triwulan I 2023 juga tercatat surplus sebesar Rp1,62 triliun yang didorong oleh peningkatan ekspor luar negeri dan penurunan net impor antardaerah.

Kinerja ekspor luar negeri Bali tumbuh positif pada triwulan laporan. Pada triwulan I 2023, ekspor luar negeri tumbuh 561,83% (yoy), tumbuh sangat tinggi meski melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 814,06% (yoy). Kinerja ekspor luar negeri

pada triwulan laporan terutama dipengaruhi kinerja ekspor jasa yang tetap kuat seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata dari wisatawan mancanegara di tengah penghapusan kebijakan PPKM, dengan didukung pemerataan vaksinasi dan pengendalian penyebaran virus Covid-19 yang baik. Terus meningkatnya jumlah maskapai, rute, dan frekuensi penerbangan yang melayani rute *direct flight* internasional dan domestik ke Bali juga turut mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut terkonfirmasi dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara di Bali pada triwulan I 2023 (Grafik 1.16).

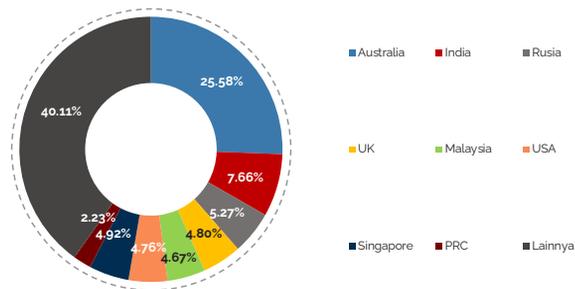
Wisatawan mancanegara di Bali terutama berasal dari Australia, India, dan Rusia. Jumlah wisatawan asal Australia pada triwulan I 2023 tercatat sebanyak 260.137 orang atau 25,58% dari total wisatawan mancanegara, diikuti dengan India (77.878 orang), dan Rusia (53.628 orang) (Grafik 1.17). Kunjungan wisatawan asal Tiongkok mulai membaik, namun belum setinggi periode sebelum pandemi. Meskipun demikian, akselerasi ekspor jasa wisata tersebut di Provinsi Bali masih tertahan akibat potensi penurunan daya beli negara asal wisatawan,

Grafik 1.16. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali



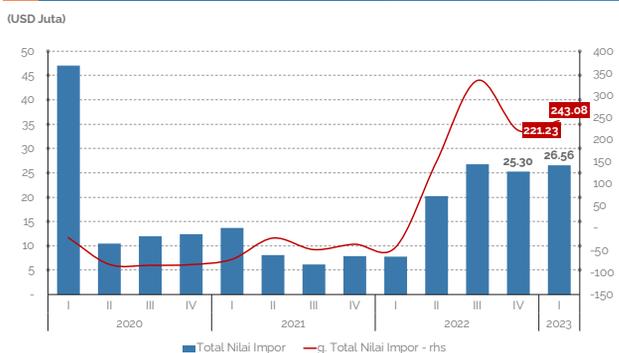
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.17. Negara Asal Penyumbang Wisatawan Mancanegara Periode Triwulan I 2023



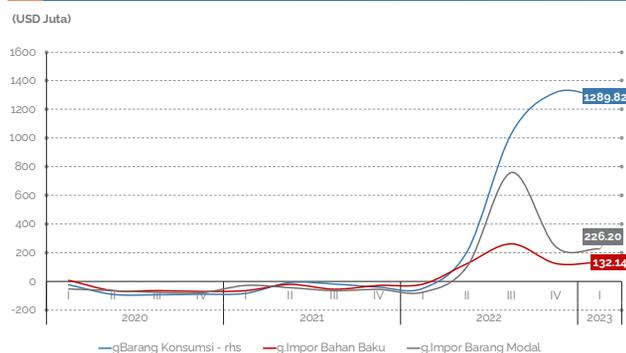
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.18. Perkembangan Nilai Ekspor Barang



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.19. Pertumbuhan Impor Barang Berdasarkan Klasifikasi Broad Economic Categories (BEC)



Sumber: Bea Cukai, diolah

kompetitor negara tujuan wisata lain yang juga memiliki keunggulan daya tarik wisata, serta dampak dari isu pengetatan peraturan untuk wisman di Provinsi Bali, seperti pembatasan penyewaan kendaraan, penerapan pajak turis dan retribusi tambahan, dan sebagainya.

Kinerja impor luar negeri mengalami peningkatan yang signifikan pada triwulan I 2023. Kinerja impor luar negeri pada triwulan laporan tercatat tumbuh 1.080,17% (yoy), tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 1.072,17% (yoy). Pertumbuhan kinerja impor luar negeri utamanya didorong oleh peningkatan impor barang yang meningkat hingga 243,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 221,23% (yoy) (Grafik 1.18). Peningkatan tertinggi juga terjadi pada impor barang konsumsi yang tumbuh hingga 1.289,82% (yoy) seiring dengan naiknya kebutuhan Provinsi Bali untuk memenuhi permintaan barang konsumsi seiring dengan naiknya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, serta naiknya permintaan masyarakat setempat. Selain itu, nilai impor barang modal dan *raw material* juga tercatat tumbuh

positif sebesar 226,20% (yoy) dan 132,14% (yoy) sejalan dengan berlanjutnya proyek konstruksi Pemerintah dan swasta (Grafik 1.19).

1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI LAPANGAN USAHA

Dari sisi LU, deselerasi ekonomi Bali pada triwulan I 2023 disumbangkan oleh sebagian besar LU utama. Perlambatan terutama akibat normalisasi aktivitas pariwisata pasca HBKN Nataru dan telah berakhirnya pelaksanaan *event* internasional KTT G20 yang menyerap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun pelaku MICE *event* di Bali pada triwulan sebelumnya. LU Akmamin dan LU Transportasi tetap mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan meskipun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya akibat normalisasi aktivitas wisatawan pada awal tahun 2023. Jumlah kunjungan wisatawan domestik yang tetap terjaga dan wisatawan mancanegara yang terus meningkat berpengaruh pada pertumbuhan *double digit* pada kedua LU terkait pariwisata tersebut. Sementara itu

Tabel 1.2. Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

Lapangan Usaha	2020				2020	2021				2021	2022				2022	2023
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.26	-2.11	-1.72	-0.28	-0.98	-0.20	0.46	-0.26	1.27	0.33	-2.38	0.50	2.52	-4.25	-0.92	(0.85)
Pertambangan dan Penggalian	3.24	-0.10	-8.21	-11.02	-4.28	-7.37	-1.51	3.04	6.50	0.07	2.90	5.71	4.65	5.05	4.60	1.73
Industri Pengolahan	-7.55	-7.47	-3.35	-7.21	-6.41	-2.49	1.04	-6.96	8.61	0.08	16.10	12.51	2.04	-6.49	5.63	1.24
Pengadaan Listrik, Gas	8.07	-21.05	-	-	-16.49	-	0.18	2.74	10.62	-5.08	7.66	15.40	22.46	18.05	16.02	28.81
Pengadaan Air	6.71	-0.14	-1.16	-6.77	-0.51	-6.79	-6.70	-3.09	0.95	-3.96	-1.86	1.93	6.89	-8.97	-0.51	1.29
Konstruksi	2.53	-2.42	-5.18	-5.58	-2.75	-3.13	-0.46	1.70	1.60	-0.08	2.06	2.79	5.95	4.21	3.78	(0.51)
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1.78	-5.89	-10.21	-9.96	-7.05	-7.31	0.14	-1.46	2.96	-1.45	5.08	2.45	7.91	7.43	5.72	4.39
Transportasi dan Pergudangan	-6.35	-	-40.31	-40.41	-32.09	-	1.94	-	-	-17.68	2.50	11.05	36.02	39.36	21.55	36.23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9.32	-33.13	-34.72	-31.87	-27.50	-	3.53	-9.22	-6.00	-10.24	0.17	8.15	25.35	22.56	13.84	18.95
Informasi dan Komunikasi	7.21	5.91	6.14	5.42	6.16	4.99	4.01	0.05	2.05	2.74	-0.05	0.23	-0.77	-1.73	-0.58	0.11
Jasa Keuangan	7.35	-7.28	-7.20	-10.20	-4.48	-10.14	1.84	-2.10	-1.94	-3.29	3.09	6.69	9.70	13.10	8.10	11.20
Real Estate	3.26	1.74	-1.80	-1.10	0.48	-2.51	1.59	0.47	2.41	0.49	0.97	0.00	2.36	5.87	2.32	0.37
Jasa Perusahaan	0.15	-4.45	-6.13	-5.67	-4.08	-5.47	1.39	-7.53	-1.08	-3.20	3.88	4.34	13.89	12.14	8.51	6.08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.39	-0.76	-0.40	-5.91	-0.38	-15.36	17.63	-2.35	2.63	0.65	-9.63	-8.10	-0.19	3.16	-3.61	0.78
Jasa Pendidikan	-0.23	-0.11	-1.45	-1.43	-0.83	-3.56	3.40	-0.20	3.33	0.79	-0.15	-1.14	-1.14	2.37	0.02	1.62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.86	3.42	-0.01	1.24	2.84	0.25	8.73	6.48	6.77	5.54	1.48	0.01	1.40	0.56	0.85	1.84
Jasa lainnya	-2.66	-7.09	-7.70	-8.15	-6.45	-4.81	3.95	-6.78	-0.18	-2.00	6.23	5.66	13.55	12.85	9.55	7.23
PDRB	-1.24	-11.05	-12.39	-12.24	-9.34	-9.84	2.83	-2.91	0.57	-2.46	1.48	3.09	8.10	6.61	4.84	6.04

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

LU Perdagangan mengalami deselerasi pertumbuhan sebagaimana terkonfirmasi dari indeks kegiatan usaha LU Perdagangan pada SKDU Bank Indonesia. Perkembangan tersebut turut dipengaruhi melandainya penjualan kendaraan bermotor pada triwulan I 2023. Berbeda dengan LU utama lainnya, LU Pertanian mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya meskipun tercatat mengalami kontraksi moderat seiring dengan mulai masuknya periode panen raya komoditas padi pada bulan Maret 2023 (Tabel 1.2).

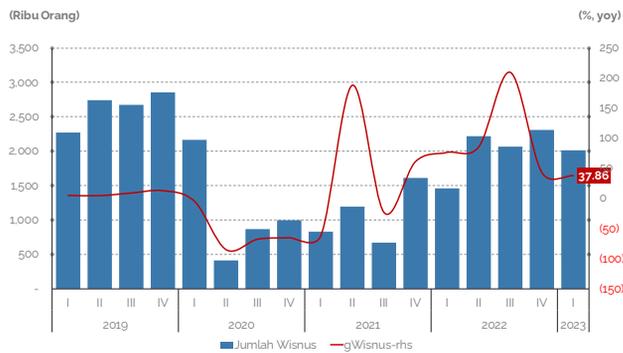
1.3.1. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Pada triwulan I 2023 kinerja LU Akmamin tetap terjaga meskipun mengalami deselerasi. Kinerja LU Akmamin tumbuh 18,95% (yoy) pada triwulan I 2023, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,56% (yoy). Pertumbuhan LU Akmamin tetap terjaga didorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari 814.325 orang

pada triwulan IV 2022 menjadi 1.026.367 pada triwulan I 2023, dan secara konsisten meningkat pada Januari-Maret 2023. Perkembangan tersebut turut terkonfirmasi dari kenaikan jumlah penumpang internasional melalui bandara I Gusti Ngurah Rai dari 1.054.614 orang pada triwulan IV 2022 menjadi 1.145.127 orang pada triwulan I 2023 (Grafik 1.20). Bertambahnya jumlah maskapai internasional yang kembali membuka rute penerbangan langsung ke Bali dengan frekuensi penerbangan harian yang semakin bertambah turut mendukung peningkatan aksesibilitas wisatawan mancanegara. Meskipun demikian, peningkatan kunjungan wisatawan bisnis tertahan seiring turunnya kuantitas *event* MICE dan jumlah peserta dari masing-masing *event* MICE pada triwulan I 2023 seiring telah berakhirnya *event* internasional KTT G20 pada November 2022.

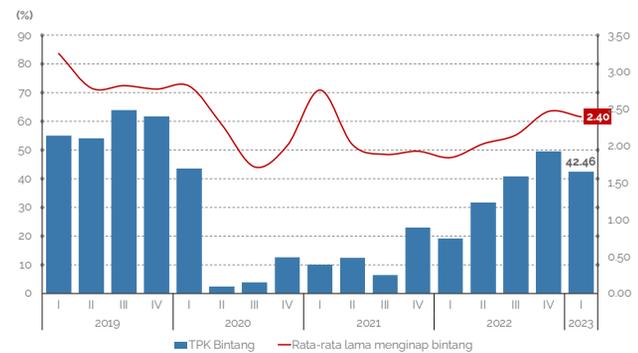
Terjaganya kinerja LU Akmamin pada triwulan laporan terkonfirmasi dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan Tingkat Pengunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Bali. Kunjungan wisatawan

Grafik 1.20. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Domestik ke Bali



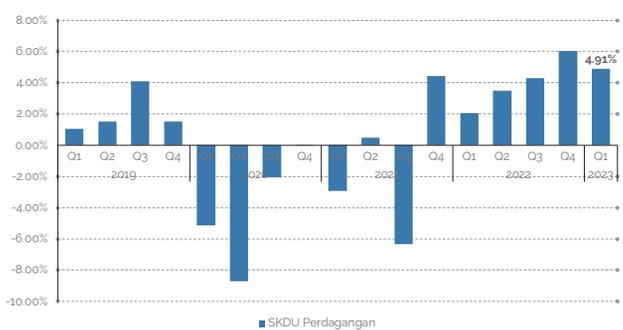
Sumber: Dispar Provinsi Bali (diolah)

Grafik 1.21. Perkembangan TPK Hotel Bintang di Bali



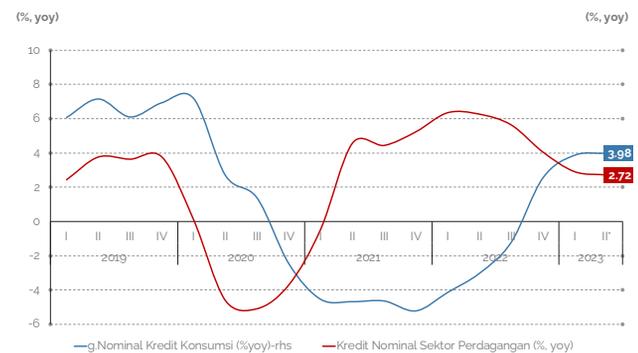
Sumber: Kemenparekraf (diolah)

Grafik 1.22. Perkembangan SKDU Kegiatan Usaha di Bali



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.23. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Konsumsi dan LU Perdagangan



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

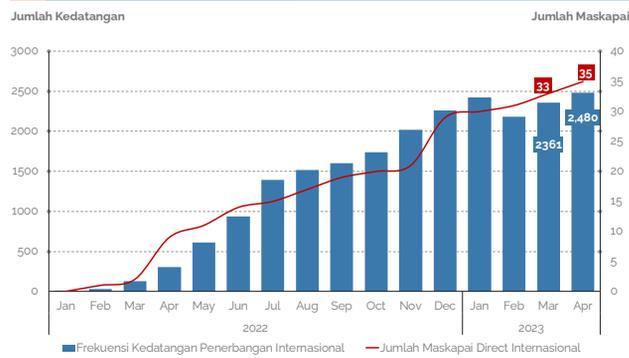
domestik pada triwulan I 2023 tumbuh 37,86% (yoy), tetap tinggi meskipun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 43,12% (yoy), dipengaruhi oleh normalisasi kunjungan wisatawan domestik ke Bali pasca HBKN Natal dan tahun baru. Tingkat penghunian kamar hotel (TPKH) bintang juga tetap tinggi, tercatat 42,46% dengan rata-rata lama menginap 2,40 hari, meski lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 49,65% dengan rata-rata lama menginap 2,47 hari (Grafik 1.21).

1.3.2. Perdagangan

Sejalan dengan LU Akmamin, LU Perdagangan juga mencatatkan kinerja positif meski mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU Perdagangan tercatat tumbuh sebesar 4,39% (yoy) pada triwulan I 2023, melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,43% (yoy). Deselerasi kinerja LU Perdagangan disinyalir terjadi sejalan dengan penurunan jumlah penjualan kendaraan pada triwulan laporan yang tercatat sebesar 2,81% (yoy), lebih rendah

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,85% (yoy). Melandainya jumlah penjualan kendaraan didominasi oleh penurunan jumlah penjualan kendaraan bermotor yang mengalami deselerasi cukup signifikan dari 10,64% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 1,96% (yoy) pada triwulan I 2023. Melandainya minat pembelian sepeda motor di Provinsi Bali seiring dengan perilaku *wait and see* pelaku usaha dalam melakukan pembelian sepeda motor yang digunakan untuk kebutuhan usaha penyewaan wisata. Hal ini disinyalir akibat pemberitaan larangan penyewaan sepeda motor bagi wisatawan mancanegara di Bali. Lebih lanjut, penurunan kinerja aktivitas perdagangan juga tercermin dari penurunan net impor antardaerah Provinsi Bali pada triwulan I 2023 yang menunjukkan adanya penurunan kebutuhan komoditas perdagangan pada periode laporan tersebut.

Menurunnya kinerja LU Perdagangan juga terkonfirmasi dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) serta kinerja penyaluran kredit perdagangan. Indeks Kegiatan Usaha Perdagangan pada SKDU Provinsi Bali pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 4,91%, melandai dibandingkan

Grafik 1.24. Perkembangan Jumlah Maskapai Internasional ke Bali

Sumber: Kemenparekraf (diolah)

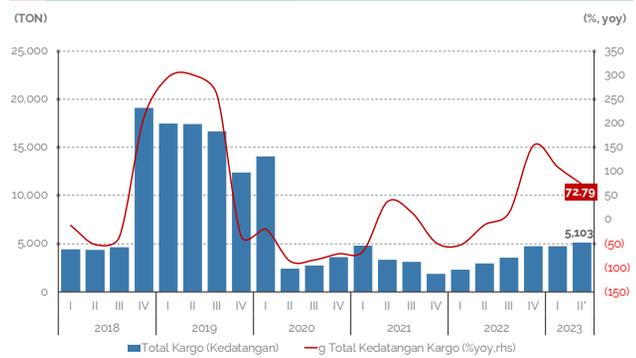
Grafik 1.26. Perkembangan SKDU Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Bali (%Saldo Bersih Tertimbang)

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia (diolah)

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,04% (Grafik 1.22). Sejalan dengan itu, kinerja penyaluran kredit LU Perdagangan juga mengalami perlambatan pada triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 2,90% (yoy), menurun dibandingkan periode triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 4,05% (yoy) sehingga turut mengonfirmasi adanya penurunan kinerja aktivitas perdagangan di Provinsi Bali pada awal tahun berjalan (Grafik 1.23).

1.3.3. Transportasi

Sejalan dengan LU Akmamin dan Perdagangan, kinerja LU Transportasi juga mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya meskipun tetap tumbuh tinggi. Sepanjang triwulan I 2023 kinerja LU Transportasi cukup impresif dengan pertumbuhan sebesar 36,23% (yoy), sedikit melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 39,36% (yoy). Capaian tersebut turut didukung oleh terus bertambahnya frekuensi penerbangan maskapai internasional maupun domestik ke Bali. Pada akhir Desember 2022 tercatat terdapat 29 operator maskapai

Grafik 1.25. Perkembangan Jumlah Kedatangan Kargo Melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai

Sumber: Angka Pura I, (diolah)

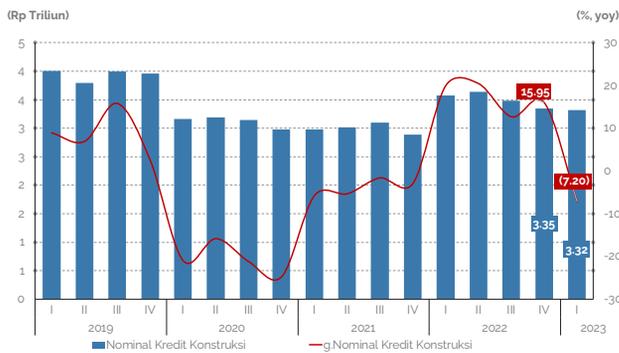
penerbangan internasional yang menjangkau 14 negara dan 22 kota dengan frekuensi penerbangan hingga 482 kali per minggu. Sementara itu pada akhir Maret 2023 terdapat 30 operator penerbangan internasional yang menjangkau 15 negara dan 23 kota dengan frekuensi penerbangan 556 kali per minggu. Salah satu maskapai baru saja membuka kembali rute penerbangan dari Xiamen (Tiongkok) ke Bali³ (Grafik 1.24). Lebih lanjut, terjaganya kinerja LU Transportasi turut berkonfirmasi dari pertumbuhan arus penumpang internasional serta tetap tingginya aktivitas kedatangan kargo melalui bandara.

Kinerja aktivitas kargo pada triwulan I 2023 (domestik dan internasional) tercatat tumbuh sebesar 40,25% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar 22,32% (yoy) sehingga turut berperan dalam terjaganya kinerja LU Transportasi secara keseluruhan (Grafik 1.25). Aktivitas transportasi darat di dalam Provinsi Bali sepanjang triwulan I 2023 juga meningkat yang dipengaruhi oleh perayaan 2 (dua) HBKN umat Hindu di Bali yaitu Galungan-Kuningan pada Januari 2023 dan Nyepi pada Maret 2023. Terjaganya kinerja LU Transportasi turut berkonfirmasi dari hasil SKDU yang menunjukkan adanya peningkatan indeks kegiatan usaha pada triwulan IV 2022 (Grafik 1.26).

1.3.4. Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan tercatat mengalami kontraksi. Pada triwulan I 2023 LU Konstruksi tumbuh -0,51% (yoy), berubah arah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,21% (yoy).

3. Pada 3 Maret 2023 maskapai dimaksud kembali terbang ke Bali dengan membawa 142 penumpang dari Xiamen, Tiongkok.

Grafik 1.27. Perkembangan Penyaluran Kredit pada LU Konstruksi (Lokasi Poyek)

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

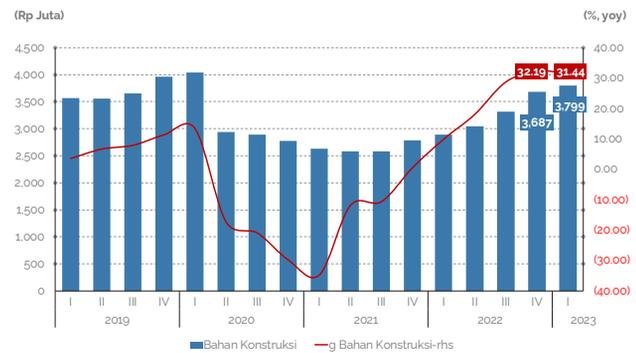
Penurunan kinerja LU Konstruksi sejalan dengan telah selesainya sejumlah proyek-proyek pembangunan infrastruktur utama dan pendukungnya pada triwulan IV 2022 untuk mendukung acara puncak KTT G20. Lebih lanjut, terdapat beberapa proyek pembangunan infrastruktur strategis seperti bendungan dan jalan tol yang mengalami penundaan realisasi anggaran dan target waktu penyelesaian.

Kontraksi yang terjadi pada LU Konstruksi juga tercermin pada pada turunnya kinerja penyaluran kredit konstruksi pada triwulan laporan.

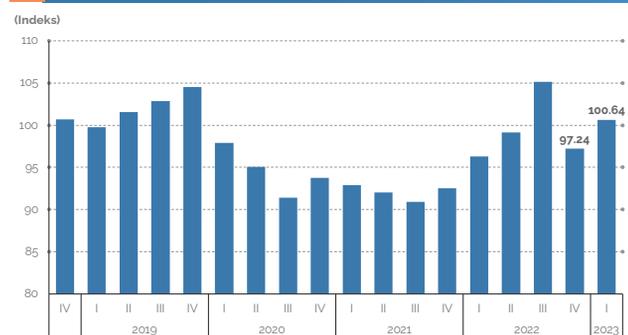
Penurunan kinerja LU Konstruksi tercermin dari kontraksi kredit konstruksi yang mencapai -7,20% (yoy) pada triwulan I 2023, menurun dibandingkan pertumbuhan kredit triwulan sebelumnya yang dapat tumbuh mencapai 15,95% (yoy) (Grafik 1.27). Lebih lanjut, penjualan bahan konstruksi di Provinsi Bali juga mengalami penurunan yang tercermin dari melandainya pertumbuhan omzet penjualan eceran bahan konstruksi dari 32,19% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 31,44% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.28).

1.3.5. Pertanian

Kinerja LU Pertanian pada triwulan I 2023 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya meskipun masih mengalami kontraksi. Pada triwulan I 2023 LU pertanian mengalami kontraksi sebesar -0,85% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -4,25% (yoy). Masih terjadinya kontraksi pada triwulan I 2023 disinyalir terjadi seiring dengan menurunnya produksi komoditas jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan

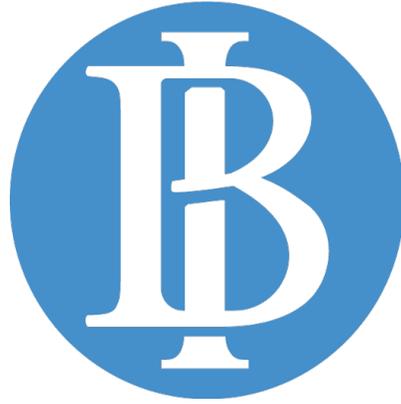
Grafik 1.28. Perkembangan Kegiatan Usaha pada Sektor Konstruksi

Sumber: SKDU Sektor Konstruksi, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.29. Perkembangan NTP Provinsi Bali

Sumber: BPS (diolah)

ubi jalar akibat kondisi cuaca yang kurang baik sehingga mempengaruhi produktivitas hortikultura. Selain itu, luas panen komoditas tanaman pangan juga semakin menurun pada triwulan laporan. Meskipun demikian, kontraksi lebih lanjut tertahan oleh mulai masuknya periode musim panen padi pada Maret 2023. Selain itu, mulai membaiknya kinerja LU Pertanian juga tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 97,21, meningkat 0,71 poin dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 96,51 (grafik 1.29).





Mei 2023

BOKS 1

Narasi Tunggal:
Do's and Don'ts Pariwisata



Dalam dunia pariwisata, perilaku wisatawan dapat menjadi faktor yang memengaruhi perkembangan pariwisata budaya yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, wisatawan yang berperilaku tidak sesuai aturan dapat merusak keasrian dan keamanan tempat wisata. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan panduan bagi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang mencakup informasi mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama berwisata di Pulau Bali. Konsep panduan bagi wisatawan disusun mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, serta peraturan pemerintah yang lain. Panduan tersebut nantinya akan dituangkan pada selebaran dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kemudian akan disebarluaskan kepada seluruh wisatawan yang datang ke Bali. Tujuan dilakukannya penyusunan “Narasi Tunggal: *Do’s and Don’ts*” bagi wisatawan ialah agar wisatawan tidak melakukan hal-hal yang melanggar

aturan serta bertentangan dengan adat dan budaya lokal. Dalam hal ini wisatawan harus benar-benar memahami dan menghargai muatan lokal, budaya, dan alam Bali, termasuk juga tata tertib berlalu lintas di Bali. Selain itu diharapkan dengan adanya panduan ini wisatawan dapat menjaga ketertiban kegiatan pariwisata di Pulau Bali.

Dalam penyusunan panduan ini, Pemerintah Provinsi Bali tentunya telah melakukan *benchmarking Do’s and Don’ts* pada beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang dan Prancis. Berikut merupakan *The Do’s* yang berlaku di Singapura antara lain:

- 1) Menggunakan visa yang sesuai dan berlaku;
- 2) Membawa salinan paspor ketika bepergian, menyimpan paspor asli di tempat yang aman dan terkunci;
- 3) Meminum air dari keran yang sudah memenuhi standar *World Health Organization (WHO)*;
- 4) Memberikan tip disarankan apabila menerima pelayanan yang baik, diluar pengenaan pajak 10%;
- 5) Membeli *pass* transportasi umum untuk

BOKS 1

- melakukan perjalanan;
- 6) Berdiri di sisi kiri dan berjalan di sisi kanan saat menggunakan tangga atau *escalator*.

Sedangkan untuk *The Don'ts* yang berlaku di Singapura antara lain:

- 1) Mengedarkan, menggunakan, dan membawa masuk narkoba ke/di Singapura;
- 2) Menyebarkan berita *hoax* melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi.
- 3) Berbicara terlalu keras di dalam kendaraan umum;
- 4) Menatap lawan jenis/sesama jenis terlalu lama;
- 5) Mengambil foto seseorang tanpa izin;
- 6) Melakukan kontak fisik tanpa izin dengan orang lain secara sengaja di tempat umum;
- 7) Membuang sampah sembarangan/permen karet;

- 8) Merokok di tempat/fasilitas umum;
- 9) Merokok tanpa membayar cukai;
- 10) Menerbangkan *drone* tanpa ijin;
- 11) Menyeberang jalan sembarangan;
- 12) Melakukan porno aksi di publik;
- 13) Mencoret-coret atau merusak fasilitas umum; serta
- 14) Memberi makan merpati atau hewan liar di tempat umum.

Hal-hal yang menjadi konsentrasi pada Narasi Tunggal *Do's and Don'ts* Pariwisata di Provinsi Bali yang dituangkan pada Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru bagi Wisatawan Mancanegara Selama Berada di Bali di antaranya ialah sebagai berikut:

Hal yang Diwajibkan untuk Wisatawan (<i>Do's</i>)	Hal yang Dilarang untuk Wisatawan (<i>Don'ts</i>)
a) memuliakan kesucian Pura, Pratima, dan simbol-simbol keagamaan yang disucikan;	a) Memasuki Utamaning Mandala dan Madyaning Mandala tempat suci atau tempat yang disucikan seperti Pura, Pelinggih, kecuali untuk keperluan bersembahyang dengan memakai busana Adat Bali atau persembahyangan, dan tidak sedang datang bulan (menstruasi);
b) dengan sungguh-sungguh menghormati adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali dalam kegiatan prosesi upacara dan upacara yang sedang dilaksanakan;	b) memanjat pohon yang disakralkan;
c) memakai busana yang sopan, wajar, dan pantas pada saat berkunjung ke Kawasan tempat suci, daya Tarik wisata, tempat umum, dan selama melakukan aktivitas di Bali;	c) berkelakuan yang menodai tempat suci dan tempat yang disucikan, Pura, Pratima, dan simbol-simbol keagamaan, seperti menaiki bangunan suci dan berfoto dengan pakaian tidak sopan/tanpa pakaian;
d) berkelakuan yang sopan di kawasan suci, kawasan wisata, restoran, tempat perbelanjaan, jalan raya, dan tempat umum lainnya;	d) membuang sampah sembarangan dan/atau mengotori Danau, Mata Air, Sungai, Laut dan tempat umum;
e) didampingi pemandu wisata yang memiliki izin/berlisensi (memahami kondisi alam, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal masyarakat Bali) saat mengunjungi daya tarik wisata;	e) menggunakan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan plastik, dan <i>polysterina (styrofoam)</i> , dan sedotan plastik;
f) melakukan penukaran mata uang asing di penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) resmi (<i>authorized money changer</i>), baik Bank maupun non-Bank yang ditandai dengan nomor izin dan logo QR code dari Bank Indonesia;	f) mengucapkan kata-kata kasar, berperilaku tidak sopan, membuat keributan, serta bertindak agresif terhadap aparat negara, Pemerintah, masyarakat lokal maupun sesama wisatawan secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, seperti menyebarkan ujaran kebencian (<i>hate speech</i>) dan informasi bohong (<i>hoax</i>);
g) melakukan pembayaran dengan menggunakan Kode QR Standar Indonesia;	g) bekerja dan/atau melakukan kegiatan bisnis tanpa memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
h) melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang rupiah;	h) terlibat dalam aktivitas ilegal seperti (flora dan fauna, artefak budaya, benda-benda yang sakral) melakukan jual beli barang ilegal termasuk obat-obatan terlarang;
i) berkendara dengan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain memiliki Surat Izin Mengemudi Internasional atau Nasional yang masih berlaku, tertib berlalu lintas di jalan, berpakaian sopan, menggunakan helm, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak memuat penumpang melebihi kapasitas, serta tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan/atau obat-obatan terlarang;	
j) menggunakan alat transportasi baik pakai roda 4 (empat) yang resmi atau alat transportasi roda 2 (dua) yang bernaung di bawah badan usaha atau asosiasi penyewaan transportasi roda 2 (dua);	
k) tinggal/menginap di tempat usaha akomodasi yang memiliki izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan	
l) mentaati segala ketentuan/aturan khusus yang berlaku dimasing-masing daya tarik wisata dan aktivitas wisata	

Apabila ditemukan wisatawan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan, maka pemerintah akan memberikan sanksi berupa:

- 1) sanksi administratif berupa peringatan sampai rekomendasi deportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah

Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Bali;

- 2) sanksi hukum sesuai jenis kejahatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
- 3) sanksi adat seperti pengembalian keharmonisan

alam sesuai dresta dan adat istiadat setempat melalui upacara penyucian dan pemuliaan tempat-tempat suci yang diduga telah dicemarkan.

Sejalan dengan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik yang mengalami peningkatan ke Bali, tentunya Pemerintah berharap wisatawan yang datang adalah wisatawan yang menikmati liburannya di Pulau Bali, tidak melakukan usaha, tidak melakukan pelanggaran di objek wisata maupun di jalan raya, dan tidak melakukan kegiatan lain di luar konteks liburan.

BAB II

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- Realisasi belanja dan transfer pemerintah pusat dan daerah di Provinsi Bali naik 39,04% (yoy) dibandingkan triwulan I 2022 seiring dengan peningkatan realisasi belanja APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/ Kota yang digunakan untuk pembiayaan program-program daerah di Provinsi Bali.
- Realisasi pendapatan daerah se-Bali secara agregat tercatat meningkat dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 25,69% (yoy) dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah yang semakin membaik sejalan dengan upaya dan kolaborasi Pemerintah Daerah dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui perluasan metode pembayaran pajak dan/atau retribusi, intensifikasi pajak daerah, dan sebagainya.



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tantular
No. 4, Denpasar

Mei

2023



(0361) 248982



(0361) 222988



Jl. Letda Tantular No 4 Denpasar - Bali 80234

Perbaikan kinerja fiskal Provinsi Bali tercermin dari total realisasi belanja Pemerintah (total APBD dan APBN) yang mencapai Rp8,70 triliun atau tumbuh 39,04% (yoy) pada triwulan I 2023, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp6,26 triliun. Hal ini didorong oleh peningkatan realisasi belanja APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk pembiayaan program-program daerah di Provinsi Bali. Lebih lanjut, realisasi total pendapatan fiskal di Provinsi Bali tercatat sebesar Rp9,87 triliun pada triwulan I 2023, meningkat sebesar 25,69% (yoy) dibandingkan triwulan tahun sebelumnya, dipengaruhi melajunya kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang triwulan laporan. Hal ini juga sejalan dengan upaya dan kolaborasi Pemerintah Daerah dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui perluasan metode pembayaran pajak dan/atau retribusi, intensifikasi pajak daerah, dan sebagainya.

2.1. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DI WILAYAH BALI

Pagu total anggaran belanja Pemerintah di Provinsi Bali, baik bersumber dari APBN maupun APBD, tercatat sebesar Rp50,55 triliun pada tahun 2023, meningkat 1,17% (yoy) dibandingkan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya (Tabel 2.1). Peningkatan pagu anggaran total belanja Pemerintah terutama bersumber dari anggaran APBD Provinsi dan APBD seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali yang naik masing-masing sebesar 3,92% dan 9,37% (yoy). Terjadinya peningkatan tersebut didorong oleh berlanjutnya kebijakan fiskal ekspansif, serta upaya akselerasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tengah pelonggaran kebijakan mobilitas dan pencabutan kebijakan PPKM. Sementara itu pagu anggaran APBN tercatat menurun sebesar -6,16% (yoy). Secara lebih rinci, komposisi pagu anggaran total belanja Pemerintah di Bali terdiri atas anggaran kementerian dan lembaga vertikal (APBN) sebesar Rp22,38 triliun (pangsa 44,27%), anggaran Pemerintah Provinsi Bali (APBD) sebesar Rp7,52 triliun

(pangsa 14,88%), dan anggaran gabungan Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD) sebesar Rp20,65 triliun (pangsa 40,85%).

Kinerja realisasi total belanja Pemerintah di Bali pada triwulan I 2023 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (Tabel 2.2). Pada triwulan laporan, realisasi total belanja tercatat sebesar Rp8,70 triliun atau telah terealisasi mencapai 17,21% dari pagu anggaran, meningkat sebesar 39,04% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi belanja Pemerintah juga didorong oleh realisasi belanja seluruh sumber dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota yang masing-masing meningkat sebesar 25,00% (yoy); 30,25% (yoy); dan 70,01% (yoy). Hal ini juga sejalan dengan kebijakan fiskal ekspansif oleh Pemerintah Daerah, serta upaya akselerasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tengah pelonggaran kebijakan mobilitas dan pencabutan kebijakan PPKM.

Tabel 2.1. Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Wilayah Bali Tahun 2022-2023

Kategori	Realisasi Belanja Triwulan I 2022 (Rp Triliun)	% Realisasi Belanja Triwulan I 2022	Realisasi Belanja Triwulan I 2023 (Rp Triliun)	% Realisasi Belanja Triwulan I 2023
APBN	23,85	22,38	-6,16	44,27
APBD Provinsi	7,24	7,52	3,92	14,88
APBD Kabupaten/Kota	18,88	20,65	9,37	40,85
Total	49,97	50,55	1,17	100,00

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Bali, BPKAD Provinsi Bali, diolah

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Wilayah Bali Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023

Kategori	Realisasi Belanja Triwulan I 2022 (Rp Triliun)	% Realisasi Belanja Triwulan I 2022	Realisasi Belanja Triwulan I 2023 (Rp Triliun)	% Realisasi Belanja Triwulan I 2023	Growth 2022-2023 (%yoy)
APBN	3,68	15,41%	4,59	20,53	25,00
APBD Provinsi	0,71	9,84%	0,93	12,33	30,25
APBD Kabupaten/Kota	1,87	9,90%	3,18	15,38	70,01
Total	6,26	12,52%	8,70	17,21	39,04

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Bali, BPKAD Provinsi Bali, diolah

2.2. APBD PROVINSI BALI

Pagu anggaran Pemerintah Provinsi Bali (APBD Provinsi Bali) pada tahun 2023 tercatat defisit. APBD Pemerintah Provinsi Bali tersusun atas anggaran pendapatan sebesar Rp6,93 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp5,60 triliun. Sementara itu, anggaran belanja sebesar Rp7,52 triliun atau sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp7,54 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran belanja sekitar Rp0,59 triliun. Penetapan pagu APBD yang defisit tersebut mencerminkan strategi kebijakan fiskal ekspansif oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan investasi dan konsumsi, sehingga diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Adapun defisit anggaran APBD-P Pemerintah Provinsi Bali direncanakan akan diimbangi oleh pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sekitar Rp1,02 triliun.

2.2.1. Pendapatan APBD Provinsi Bali

2.2.1.1. Anggaran Pendapatan

Pagu anggaran total pendapatan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022 (Tabel 2.3). Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dianggarkan sebesar Rp4,73 triliun atau tumbuh hingga 35,41% (yoy) pada tahun 2023. Hal ini utamanya didorong oleh peningkatan anggaran Retribusi Daerah (454,98%, yoy) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan (267,97%, yoy). Lebih lanjut, komponen Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mencapai Rp2,15 triliun dan Rp0,06 triliun pada tahun 2023, masing-masing tumbuh sebesar 4,85% (yoy) dan 1,48% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pagu anggaran pendapatan Pemerintah Provinsi Bali 2023 juga sejalan dengan pemulihan aktivitas perekonomian pasca pencabutan kebijakan PPKM dan pengendalian penyebaran Covid-19 yang semakin baik.

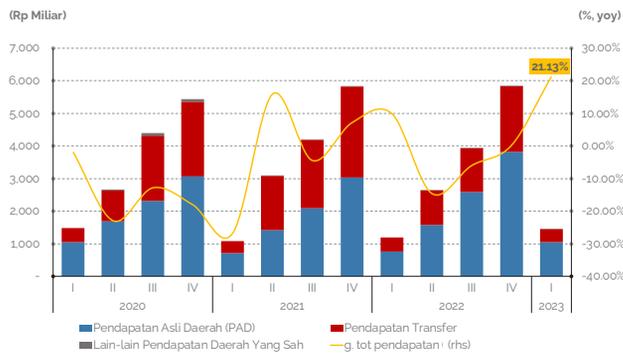
2.2.1.2. Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Bali s.d. triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp1,45 triliun atau mencapai 20,90% dari pagu anggaran. Nominal realisasi pendapatan pada triwulan I tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,20 triliun. Hal ini didorong oleh peningkatan realisasi PAD yang tumbuh sebesar 38,68% (yoy) sejalan dengan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah (tumbuh 58,39%, yoy), Retribusi Daerah (tumbuh 94,70%, yoy), serta Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (tumbuh 10,13%, yoy). Meskipun demikian, persentase realisasi pendapatan triwulan I 2023 lebih rendah dibandingkan persentase realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 21,38%. Hal ini sejalan dengan peningkatan pagu pendapatan APBD Provinsi akibat pemulihan aktivitas perekonomian pasca pencabutan kebijakan PPKM dan pengendalian penyebaran Covid-19 yang semakin

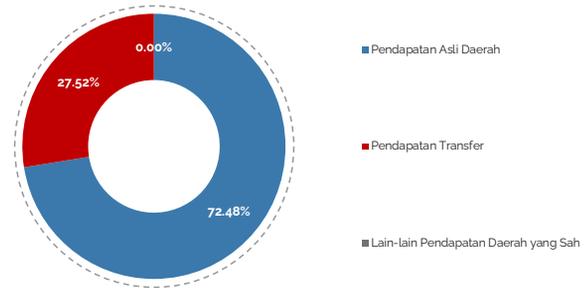
Tabel 2.3. Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Bali Tahun 2023 dan Realisasi s.d. Triwulan I 2023

	Pagu			Realisasi				Growth Realisasi (%yoy) (Nominal)
	2022 (Nominal)	2023 (Nominal)	Growth Pagu (%yoy)	TW I 2022 (Nominal)	2022 (Nominal)	2023 (Nominal)	TW IV 2022 (%Realisasi)	
PENDAPATAN	5,60	6,93	23,90%	1,20	5,60	6,93	23,90%	1,20
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,49	4,73	35,41%	0,76	3,49	4,73	35,41%	0,76
Pajak Daerah	2,88	2,96	2,81%	0,51	2,88	2,96	2,81%	0,51
Retribusi Daerah	0,01	0,06	454,98%	0,00	0,01	0,06	454,98%	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,22	0,81	267,97%	0,14	0,22	0,81	267,97%	0,14
Lain-lain PAD yang Sah	0,38	0,90	134,86%	0,10	0,38	0,90	134,86%	0,10
PENDAPATAN TRANSFER	2,05	2,15	4,85%	0,44	2,05	2,15	4,85%	0,44
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,05	2,15	4,85%	0,44	2,05	2,15	4,85%	0,44
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,05	0,06	1,48%	0,00	0,05	0,06	1,48%	0,00
Pendapatan Hibah	0,05	0,06	1,48%	0,00	0,05	0,06	1,48%	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

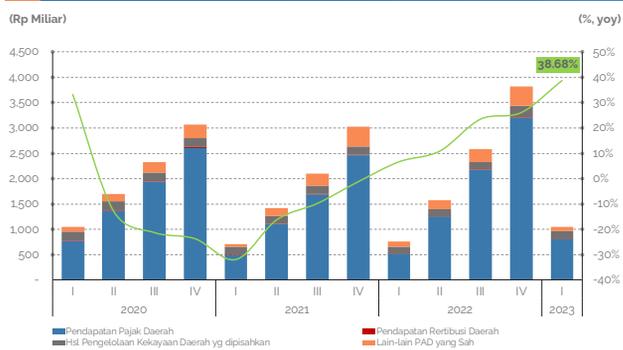
Sumber: BPKAD Provinsi Bali, diolah

Grafik 2.1. Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Pemprov Bali s.d Triwulan I 2023

Sumber : BPKAD Provinsi Bali, diolah

Grafik 2.2. Komponen Penyumbang Pendapatan Pemprov Bali Posisi Triwulan I 2023

Sumber : BPKAD Provinsi Bali, diolah

Grafik 2.3. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemprov Bali

Sumber : BPKAD Provinsi Bali, diolah

baik. Upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak melalui digitalisasi dan elektronifikasi pembayaran pajak juga turut mendorong naiknya realisasi penerimaan pajak di Provinsi Bali. Di sisi lain, realisasi pendapatan yang lebih tinggi tertahan oleh komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terealisasi hingga 18,58% pada triwulan I 2023, lebih rendah dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya yang terealisasi mencapai 21,44%.

Pemerintah Provinsi Bali terus menempuh langkah-langkah strategis dalam mendorong peningkatan realisasi PAD. Langkah-langkah tersebut di antaranya optimalisasi Samsat Keliling dan Samsat Kerti sebagai upaya "jemput bola" kepada wajib pajak, pemungutan pajak secara *door-to-door* dengan melibatkan perangkat daerah, serta implementasi elektronifikasi Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan selama masa pandemi Covid-19, seperti pembayaran pajak secara *online*. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Bali juga meningkatkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor seiring dengan optimisme naiknya realisasi

penjualan kendaraan di tengah pemulihan pariwisata serta kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap kendaraan yang semakin meningkat.

2.2.2. Belanja APBD Provinsi Bali

2.2.2.1. Anggaran Belanja

Pagu anggaran total belanja Pemerintah Provinsi Bali (APBD Provinsi) tahun 2023 menurun pada sebagian besar komponen (Tabel 2.4). Secara umum, penurunan pagu total belanja terutama bersumber dari anggaran Belanja Modal yang menurun hingga -20,38% (yoy) dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Penurunan pagu anggaran ini ditengarai akibat telah selesainya berbagai pembangunan infrastruktur Pemerintah, terutama untuk infrastruktur penunjang acara pertemuan G20. Namun, penurunan anggaran belanja lebih lanjut ditahan oleh peningkatan pagu Belanja Operasi (tumbuh 7,01%, yoy), Belanja Tak Terduga (tumbuh 127,10%, yoy), serta Belanja Transfer (tumbuh 3,12%, yoy). Peningkatan belanja ini sejalan dengan upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19, serta optimalisasi upaya pengendalian inflasi yang dilakukan di Provinsi Bali.

2.2.2.2. Realisasi Belanja dan Transfer

Realisasi total belanja Pemerintah Provinsi Bali s.d. triwulan I 2023 mencapai Rp0,93 triliun atau 12,33% dari pagu anggaran. Realisasi belanja hingga triwulan I 2023 lebih tinggi dari realisasi triwulan I 2022 yang hanya mencapai Rp0,71 triliun atau 9,44% dari pagu anggaran (Grafik 2.4 dan Grafik 2.5). Naiknya realisasi belanja Pemerintah Provinsi dipengaruhi oleh meningkatnya

Tabel 2.4. Pagu APBD Provinsi Bali Tahun 2023 dan Realisasi Belanja s.d. Triwulan I 2023

Dalam Rp triliun	Pagu		Growth Pagu Anggaran	Realisasi				Growth Realisasi
	2022 (Nominal)	2023 (Nominal)		TW I 2022 (Nominal)	TW I 2022 (%Realisasi)	TW I 2023 (Nominal)	TW I 2023 (%Realisasi)	
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	7.54	7.52	-0.26%	0.71	9.44	0.93	12.33	30.25%
BELANJA OPERASI	4.08	4.36	7.01%	0.62	15.09	0.63	14.51	2.90%
Belanja Pegawai	1.82	2.07	13.63%	0.32	17.65	0.34	16.56	6.63%
Belanja Barang dan Jasa	1.84	1.37	-25.66%	0.29	15.57	0.16	11.72	-44.08%
Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Belanja Subsidi	0.01	0.01	-3.15%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Belanja Hibah	0.40	0.88	118.78%	0.01	1.72	0.13	14.70	1765.93%
Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.03	21843.71%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
BELANJA MODAL	1.80	1.43	-20.38%	0.05	2.56	0.19	12.93	301.71%
Belanja Modal Tanah	0.77	0.18	-76.69%	0.01	0.67	0.11	62.48	2071.97%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.13	0.21	61.03%	0.00	0.69	0.00	0.90	107.95%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.41	0.71	71.12%	0.03	7.89	0.00	0.00	-100.00%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.45	0.28	-37.33%	0.01	1.62	0.07	25.13	875.14%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.03	0.05	56.39%	0.00	0.34	0.00	0.00	-100.00%
BELANJA TAK TERDUGA	0.01	0.02	127.10%	0.00	3.80	0.00	14.00	735.90%
BELANJA TRANSFER	1.66	1.71	3.12%	0.05	3.04	0.11	6.23	111.52%

Sumber : BPKAD Provinsi Bali, diolah

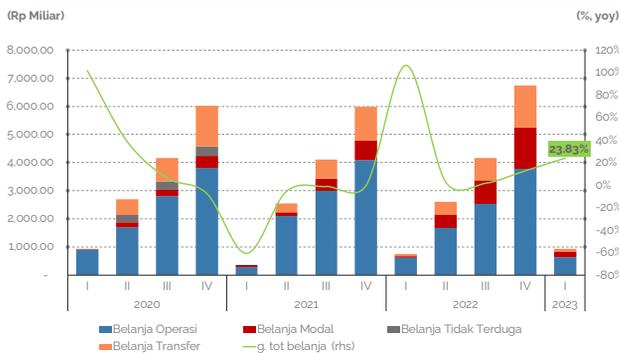
realisasi seluruh komponen belanja, yaitu Belanja Operasi (terrealisasi 14,51%), Belanja Modal (terrealisasi 12,93%), Belanja Tak Terduga (terrealisasi 14,00%), serta Belanja Transfer (terrealisasi 6,23%). Realisasi komponen Belanja Operasi utamanya didorong oleh pertumbuhan realisasi Belanja Pegawai (6,63%, yoy) sejalan dengan peningkatan pemberian dana tunjangan pensiun ASN. Sementara itu,

realisasi Belanja Modal utamanya didorong oleh realisasi komponen Belanja Modal Tanah, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dengan masih berlanjutnya realisasi proyek-proyek Pemerintah Daerah, seperti pembangunan kawasan bendungan, area wisata, hingga infrastruktur pendukung di sekitar jalan tol.

Perbaikan kinerja Belanja Daerah Provinsi Bali utamanya didorong oleh optimalisasi komponen Belanja Modal, di mana nominal dan pertumbuhan realisasi Belanja Modal menunjukkan perbaikan yang paling signifikan.

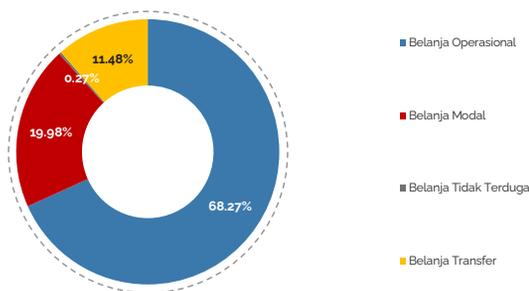
Optimalisasi realisasi belanja modal serta pertumbuhan yang masif dibandingkan triwulan I 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong belanja produktif untuk mengakselerasi perekonomian Bali. Realisasi belanja ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif dan mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat, pelaku usaha,

Grafik 2.4. Perkembangan Realisasi Total Belanja Pemprov Bali



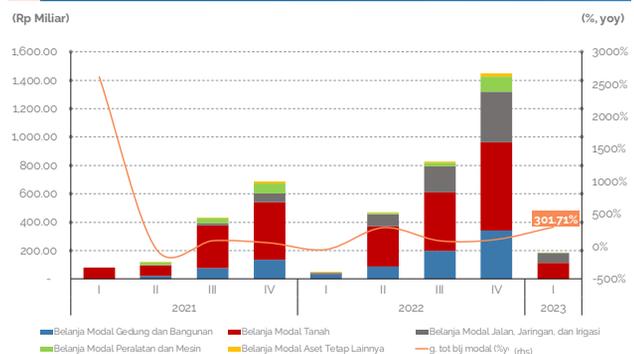
Sumber : BPKAD Provinsi Bali, diolah

Grafik 2.5. Komponen Penyumbang Belanja Pemprov Bali Posisi Triwulan IV 2022



Sumber : BPKAD Provinsi Bali, diolah

Grafik 2.6. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Pemprov Bali



Sumber : BPKAD Provinsi Bali, diolah

Tabel 2.5. Pagu Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Bali Tahun 2022-2023

Kategori	Pagu Pendapatan 2022 (Rp Triliun)	Pagu Pendapatan 2023 (Rp Triliun)	Growth 2022-2023 (%yoy)	Pangsa (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.94	9.43	35.94%	47.39%
Pendapatan Transfer	11.14	10.45	-6.18%	52.52%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.05	0.02	-63.75%	0.09%
Total	18.12	19.90	9.79%	100.00%

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, diolah

maupun para wisatawan yang semakin tinggi di tengah momentum pemulihan ekonomi yang sedang berjalan. Di sisi lain belanja konsumtif saat ini juga mulai dibatasi dan dioptimalkan untuk mendukung komponen belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan di antaranya dengan Analisis Beban Kerja (ABK), menerapkan anggaran berbasis kinerja, melakukan efisiensi belanja barang/jasa, hingga melakukan evaluasi anggaran menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

2.3. APBD GABUNGAN KABUPATEN/KOTA DI BALI

Pagu anggaran Kabupaten/Kota di Bali (APBD Kabupaten/Kota Bali) pada triwulan I tahun 2023¹ lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2022, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Pendapatan Kabupaten/Kota di Bali pada APBD Tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp19,90 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp18,12 triliun. Di sisi lain, target anggaran belanja Kabupaten/Kota pada APBD juga meningkat dari Rp18,88 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp20,65 triliun pada tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut, total defisit anggaran Kabupaten/Kota di Bali menurun dari Rp1,24 triliun pada tahun 2022 (pasca perubahan terakhir) menjadi Rp753,84 miliar pada tahun 2023.

2.3.1. Pendapatan APBD Gabungan Kabupaten/Kota di Bali

2.3.1.1. Anggaran Pendapatan

Total anggaran pendapatan Pemerintah seluruh Kabupaten/Kota di Bali pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp19,90 triliun, meningkat hingga 9,79% (yoy)

dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya (Tabel 2.5). Peningkatan pagu anggaran terutama bersumber dari meningkatnya komponen PAD secara signifikan hingga 35,94% (yoy). Di sisi lain, terdapat penurunan dari komponen Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing hingga -6,18% (yoy) dan -63,75% (yoy). Peningkatan target PAD merupakan bentuk optimisme Pemerintah Kabupaten/Kota Bali terhadap prospek pertumbuhan ekonomi yang diprakirakan terus membaik seiring dengan prakiraan pemulihan perekonomian yang terakselerasi, pemerataan penyaluran vaksinasi dan booster yang semakin baik, serta minat Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) ke Bali yang semakin tinggi. Prospek tersebut didukung oleh pemulihan kinerja LU terkait pariwisata dari dampak pandemi Covid-19 yang diprakirakan akan menopang peningkatan pendapatan pajak daerah (pajak hotel, restoran, hiburan), serta retribusi destinasi wisata.

Secara spasial, target pendapatan tertinggi pada APBD tahun 2023 berasal dari Kabupaten Badung, yaitu sebesar Rp4,13 triliun atau mencapai 22,98% dari akumulasi pagu anggaran pendapatan seluruh Kabupaten/Kota di Bali (Tabel 2.6). Kabupaten Badung merupakan pusat pariwisata Bali, dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh LU Akmamin, sehingga penghasilan pajak daerah dan retribusi memiliki potensi besar untuk menjadi sumber PAD. Hal ini juga didukung oleh pencabutan kebijakan PPKM dan pelonggaran mobilitas masyarakat yang mendorong pemulihan sektor pariwisata di Bali. Berdasarkan penetapan pagu anggaran pendapatan dan belanja yang ada, Kabupaten Badung juga merupakan salah satu kabupaten yang memasang target rasio kemandirian fiskal terbesar tahun 2023, yaitu mencapai 77,48%. Sementara itu, target pendapatan terendah pada tahun 2023 berasal dari Kabupaten

1. APBD Kabupaten/Kota menggunakan data kumulatif sampai dengan triwulan I 2023 yang terdiri dari 9 kabupaten/kota di Bali

Tabel 2.6. Target Anggaran dan Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022-2023

Daerah	Pagu APBD-P Gabungan Kab/Kota 2022 (Rp Triliun)				Pagu APBD Gabungan Kab/Kota 2023 (Rp Triliun)				Growth 2023 (%.yoy)	Pangsa 2023
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan		
Kab. Badung	3.20	1.40	0.00	4.13	3.20	0.87	0.00	4.13	0.00%	22.98%
Kab. Bangli	0.15	1.00	0.00	1.14	0.15	1.07	0.00	1.29	12.67%	7.16%
Kab. Buleleng	0.48	1.69	0.00	2.17	0.48	1.68	0.00	2.21	1.90%	12.31%
Kab. Gianyar	1.19	1.27	0.00	2.46	1.19	1.08	0.00	2.47	0.59%	13.77%
Kab. Jembrana	0.16	0.94	0.00	1.10	0.16	0.87	0.00	1.03	-6.59%	5.73%
Kab. Karangasem	0.25	1.31	0.03	1.59	0.25	1.26	0.00	1.55	-2.43%	8.62%
Kab. Klungkung	0.26	0.86	0.00	1.12	0.26	0.95	0.00	1.21	7.50%	6.72%
Kab. Tabanan	0.51	1.43	0.00	1.94	0.51	1.45	0.00	1.95	0.37%	10.85%
Kota Denpasar	0.74	1.24	0.02	1.99	0.74	1.22	0.01	2.13	7.09%	11.85%
Total	6.94	11.14	0.05	17.64	6.94	10.45	0.02	17.96	2.34%	100.00%

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, diolah

Jembrana yaitu sebesar Rp1,03 triliun atau 5,73% dari total anggaran pendapatan Kabupaten/Kota di Bali.

2.3.1.2. Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Bali hingga triwulan I 2023 tercatat Rp4,18 triliun (23,33% dari pagu pendapatan tahun 2023), meningkat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp3,15 triliun (17,37% dari pagu pendapatan 2022) (Tabel 2.7). Peningkatan kinerja realisasi pendapatan Pemerintah Daerah tingkat

kabupaten/kota utamanya didorong oleh meningkatnya pagu PAD secara signifikan di tahun 2023. Sementara itu, realisasi penerimaan Pemerintah kabupaten/kota pada triwulan I 2023 dari sisi PAD tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2022 dengan pertumbuhan mencapai 231,34% (yoy). Meningkatnya penerimaan komponen PAD turut mengonfirmasi terjadinya perkembangan aktivitas pelaku usaha maupun sektor industri pengolahan seiring dengan semakin terkendalinya penyebaran pandemi Covid-19.

Tabel 2.7. Realisasi Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota di Bali s.d. Triwulan I 2022-2023

Daerah Tingkat II	Realisasi Gabungan Kab/Kota Triwulan I 2022 (Rp Triliun)				Realisasi Gabungan Kab/Kota Triwulan I 2023 (Rp Triliun)				Growth Nilai Realisasi 2023 (%.yoy)	Pangsa Pagu 2023 (%)
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan		
Kab. Badung	0.25	0.09	0.00	0.33	1.38	0.05	0.00	1.43	328.57%	22.74
Kab. Bangli	0.01	0.20	0.00	0.21	0.02	0.21	0.00	0.23	12.05%	7.19
Kab. Buleleng	0.06	0.43	0.00	0.49	0.14	0.34	0.00	0.47	-4.75%	12.35
Kab. Gianyar	0.08	0.37	0.00	0.46	0.29	0.22	0.00	0.51	11.98%	13.82
Kab. Jembrana	0.03	0.33	0.00	0.36	0.04	0.20	0.00	0.23	-34.80%	5.75
Kab. Karangasem	0.04	0.28	0.00	0.32	0.07	0.22	0.00	0.29	-9.93%	8.65
Kab. Klungkung	0.04	0.23	0.00	0.26	0.06	0.21	0.00	0.27	2.40%	6.74
Kab. Tabanan	0.04	0.35	0.00	0.39	0.06	0.12	0.00	0.18	-52.89%	10.88
Kota Denpasar	0.16	0.17	0.00	0.33	0.26	0.30	0.00	0.57	70.10%	11.89
Total	0.70	2.45	0.00	3.15	2.31	1.87	0.01	4.18	32.71%	100.00

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, diolah

Tabel 2.8. Persentase Realisasi Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota di Bali s.d. Triwulan I 2022-2023

Daerah Tingkat II	Persentase Realisasi Gabungan Kab/Kota Triwulan I 2022 (%)				Persentase Realisasi Gabungan Kab/Kota Triwulan I 2023 (%)			
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kab. Badung	7.71%	6.16%	0.00%	7.23%	43.06%	5.78%	0.00%	35.07%
Kab. Bangli	3.58%	20.34%	0.00%	18.18%	8.47%	20.04%	0.00%	18.08%
Kab. Buleleng	12.83%	25.56%	0.00%	22.76%	25.53%	19.93%	0.00%	21.27%
Kab. Gianyar	7.11%	29.31%	0.00%	18.55%	20.73%	20.56%	0.00%	20.66%
Kab. Jembrana	15.95%	35.35%	0.00%	32.55%	22.09%	22.83%	0.00%	22.72%
Kab. Karangasem	14.66%	21.40%	4.28%	20.02%	24.12%	17.23%	11.28%	18.48%
Kab. Klungkung	13.96%	26.18%	99.93%	23.34%	22.52%	22.15%	0.00%	22.23%
Kab. Tabanan	7.75%	24.20%	0.00%	19.88%	12.38%	8.28%	0.00%	9.33%
Kota Denpasar	21.61%	13.82%	13.95%	16.71%	29.08%	24.57%	35.75%	26.55%
Total	10.03%	21.99%	7.02%	17.37%	30.99%	17.87%	30.40%	23.33%

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, diolah

Ditinjau dari persentase realisasi, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Jembrana menjadi wilayah kabupaten/kota dengan capaian realisasi pendapatan tertinggi hingga triwulan I 2023, dengan persentase realisasi pendapatan masing-masing wilayah sebesar 35,07%; 26,55%; serta 22,72%. Tingginya realisasi pendapatan Kota Badung terutama didorong oleh penerimaan PAD yang telah terealisasi sebesar 43,06% dari anggaran, diikuti dengan penerimaan transfer pusat yang terealisasi sebesar 5,78% dari total anggaran. Capaian PAD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali juga tidak terlepas dari upaya dan kolaborasi Pemerintah Daerah dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah, di antaranya melalui:

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban wajib pajak secara kontinu.
- Implementasi program tim intensifikasi pajak daerah dengan melakukan *monitoring*, evaluasi, dan penagihan *door-to-door* kepada wajib pajak.
- Perluasan pembayaran pajak dan/atau retribusi melalui sistem *online*, serta peningkatan transaksi nontunai melalui kerjasama dengan lembaga perbankan.
- Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
- Pelaksanaan studi komparasi dengan kabupaten/kota lainnya yang berhasil mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja daerah.

Sementara itu, daerah dengan persentase realisasi pendapatan terendah pada triwulan I 2023 adalah Kabupaten Tabanan, yaitu sebesar 9,33% dari pagu anggaran. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya proporsi realisasi pendapatan Retribusi Daerah sebagai komponen PAD dan Pendapatan Transfer. Meskipun jika dilihat secara nominal realisasi PAD di Kabupaten Tabanan tidak kalah dengan wilayah lain di Provinsi Bali, namun penurunan produksi pada sejumlah komoditas tanaman pangan dan hortikultura tahunan menyebabkan retribusi dari sektor pertanian terbatas. Selan itu, Kabupaten Tabanan juga memiliki beberapa Daya Tarik Wisata (DTW), namun kunjungan wisatawan yang belum pulih juga menjadi alasan terhadap penurunan penghimpunan Retribusi Daerah dari sektor pariwisata.

2.3.2. Belanja dan Transfer APBD Gabungan Kabupaten/Kota di Bali

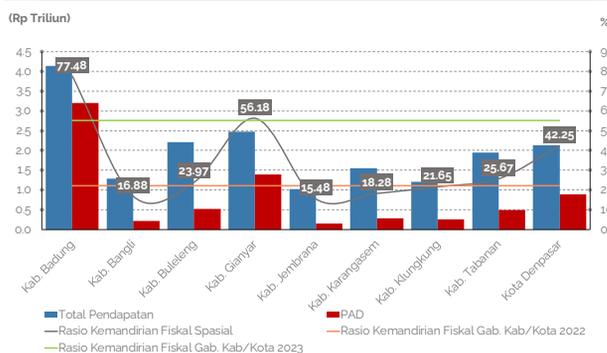
2.3.2.1. Anggaran Belanja dan Transfer

Anggaran belanja 9 kabupaten/kota di Bali tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer mengalami peningkatan anggaran pada tahun 2023, dengan total peningkatan masing-masing sebesar 5,12%; 10,48%; dan 40,34% (yoy) (Tabel 2.9). Di sisi lain, komponen Belanja Tak Terduga mencatatkan penurunan hingga sebesar -4,07% (yoy) seiring dengan intensitas penanganan Covid-19 yang mulai menurun serta infrastruktur penanganan Covid-19 yang telah tersedia. Secara spasial, Kabupaten Badung memiliki pangsa anggaran belanja terbesar yang mencapai Rp6,06 triliun atau 29,35% dari total anggaran belanja kabupaten/kota di Bali (Tabel 2.10). Sementara itu, Kabupaten Jembrana merupakan daerah dengan pangsa anggaran belanja terendah yaitu sebesar Rp1,13 triliun atau hanya 5,48% dari total anggaran.

2.3.2.2. Realisasi Belanja dan Transfer

Realisasi belanja seluruh Kabupaten/Kota di Bali pada triwulan I 2023 meningkat sebesar 70,01% (yoy) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.11. Realisasi

Grafik 2.7. Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Bali s.d. Triwulan I 2023



Sumber: BPKAD Provinsi Bali, diolah

Tabel 2.9. Pagu Anggaran Pemerintah di Wilayah Bali Tahun 2022-2023

Kategori	Pagu Belanja 2022 (Rp Triliun)	Pagu Belanja 2023 (Rp Triliun)	Growth 2022-2023 (%yoy)	Pangsa (%)
Belanja Operasi	14.29	15.02	5.12%	72.72%
Belanja Modal	2.52	2.79	10.48%	13.49%
Belanja Tak Terduga	0.15	0.14	-4.07%	0.67%
Belanja Transfer	1.93	2.71	40.34%	13.11%
Total	18.88	20.65	9.37%	100.00%

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, diolah

Tabel 2.10. Pagu Anggaran Belanja dan Transfer 9 Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022-2023

Daerah Tingkat II	Pagu APBD-P Gabungan Kab/Kota 2022 (Rp Triliun)					Pagu APBD Gabungan Kab/Kota 20223 (Rp Triliun)					Growth 2023 (%yoy)	Pangsa 2023 (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Total Belanja dan Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Total Belanja dan Transfer		
Kab. Badung	3.14	0.62	0.06	0.46	4.28	3.89	0.90	0.07	1.19	6.06	248.75	29.35
Kab. Bangli	0.86	0.31	0.00	0.14	1.32	0.89	0.29	0.01	0.16	1.36	38.12	6.57
Kab. Buleleng	1.79	0.18	0.00	0.25	2.23	1.74	0.21	0.02	0.26	2.22	912.77	10.77
Kab. Gianyar	1.79	0.47	0.01	0.23	2.50	1.96	0.38	0.00	0.21	2.56	-99.63	12.39
Kab. Jembrana	0.95	0.15	0.01	0.12	1.23	0.92	0.09	0.01	0.12	1.13	-45.75	5.48
Kab. Karangasem	1.31	0.18	0.00	0.21	1.70	1.18	0.13	0.00	0.22	1.53	-78.15	7.42
Kab. Klungkung	1.02	0.14	0.01	0.11	1.29	1.04	0.23	0.01	0.12	1.39	3.51	6.74
Kab. Tabanan	1.53	0.20	0.01	0.24	1.98	1.54	0.25	0.00	0.24	2.04	-52.80	9.87
Kota Denpasar	1.89	0.27	0.04	0.16	2.36	1.85	0.31	0.03	0.18	2.36	-5.50	11.43
Total	14.29	2.52	0.15	1.93	18.88	15.02	2.79	0.14	2.71	20.65	51.87	100.00

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, diolah

belanja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Bali hingga triwulan I 2023 sebesar Rp3,18 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan I 2022 yang tercatat sebesar Rp1,87 triliun. Hal ini sejalan dengan masih berlanjutnya realisasi proyek-proyek yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten/kota, seperti pembangunan kawasan bendungan, area wisata, hingga infrastruktur pendukung di sekitar jalan tol. Lebih lanjut, kabupaten/kota penyumbang realisasi belanja terbesar ialah Kabupaten Badung dengan pangsa 29,35%, sedangkan kabupaten/kota penyumbang realisasi belanja terkecil di Provinsi Bali ialah Kabupaten Jembrana dengan pangsa 5,48%.

Secara spasial, wilayah dengan capaian persentase realisasi belanja tertinggi pada triwulan I 2023 adalah Kabupaten Badung, sedangkan wilayah dengan capaian persentase realisasi belanja terendah adalah Kabupaten Tabanan. Pada Kabupaten Badung, realisasi belanja bersumber dari naiknya realisasi seluruh komponen belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer dengan total Rp1,19 triliun dan peningkatan sebesar 347,17% (yoy). Di sisi lain, rendahnya capaian serapan realisasi belanja di Kabupaten Tabanan disebabkan masih rendahnya aktivitas Belanja Modal seiring dengan belum intensnya aktivitas konstruksi di Kabupaten tersebut.

Tabel 2.11. Realisasi Belanja 9 Kabupaten/Kota di Bali s.d. Triwulan I 2022-2023

Daerah Tingkat II	Realisasi Gabungan Kab/Kota TW I 2022					Realisasi Gabungan Kab/Kota TW I 2023					Growth TW I 2023 (%yoy)	Pangsa 2023 (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Total Belanja dan Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Total Belanja dan Transfer		
Kab. Badung	0.25	0.00	0.00	0.02	0.27	0.56	0.01	0.01	0.60	1.19	347.17	29.35
Kab. Bangli	0.09	0.00	0.00	0.04	0.14	0.11	0.01	0.00	0.04	0.16	16.97	6.57
Kab. Buleleng	0.15	0.00	0.00	0.08	0.23	0.27	0.00	0.00	0.07	0.34	49.79	10.77
Kab. Gianyar	0.22	0.11	0.00	0.01	0.33	0.29	0.03	0.00	0.07	0.38	14.69	12.39
Kab. Jembrana	0.11	0.00	0.00	0.01	0.11	0.13	0.00	0.00	0.02	0.15	34.21	5.48
Kab. Karangasem	0.11	0.00	0.00	0.02	0.13	0.15	0.00	0.00	0.06	0.21	63.94	7.42
Kab. Klungkung	0.13	0.00	0.00	0.04	0.17	0.17	0.00	0.00	0.01	0.19	14.15	6.74
Kab. Tabanan	0.16	0.00	0.00	0.03	0.19	0.20	0.00	0.00	0.03	0.23	21.08	9.87
Kota Denpasar	0.24	0.00	0.01	0.06	0.31	0.26	0.00	0.00	0.07	0.33	6.06	11.43
Total	1.44	0.12	0.01	0.31	1.87	2.13	0.06	0.01	0.97	3.18	70.01	100.00

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, diolah

Tabel 2.12. Persentase Realisasi Belanja g Kabupaten/Kota di Bali s.d. Triwulan I 2022-2023

Daerah Tingkat II	Presentase Realisasi Gabungan Kab/Kota TW I 2022 (%)					Presentase Realisasi Gabungan Kab/Kota TW I 2023 (%)				
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Total Belanja dan Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Total Belanja dan Transfer
Kab. Badung	7.95%	0.05%	0.00%	3.42%	6.21%	14.37%	1.46%	17.31%	50.49%	19.59%
Kab. Bangli	10.42%	1.52%	0.00%	30.50%	10.44%	12.65%	2.80%	0.00%	24.59%	11.89%
Kab. Buleleng	8.11%	0.09%	0.00%	31.85%	10.15%	15.29%	2.02%	0.00%	26.24%	15.23%
Kab. Gianyar	12.00%	22.58%	0.00%	5.05%	13.33%	14.54%	7.96%	1.63%	30.91%	14.93%
Kab. Jembrana	11.06%	0.30%	42.19%	4.51%	9.25%	13.67%	5.50%	0.00%	18.82%	13.50%
Kab. Karangasem	8.12%	0.08%	0.00%	9.80%	7.44%	12.87%	0.06%	0.00%	24.99%	13.56%
Kab. Klungkung	12.39%	0.28%	0.00%	35.13%	12.93%	16.77%	0.15%	0.00%	12.55%	13.64%
Kab. Tabanan	10.30%	1.34%	0.00%	10.48%	9.37%	12.92%	0.30%	0.00%	10.37%	11.04%
Kota Denpasar	12.86%	0.05%	18.04%	38.85%	13.31%	13.86%	0.19%	6.26%	41.81%	14.10%
Total	10.07%	4.58%	6.39%	15.84%	9.90%	14.19%	2.24%	10.17%	35.79%	15.38%

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, diolah

2.4. APBN DI BALI

Alokasi belanja APBN di Bali pada tahun 2023 mencapai Rp11,45 triliun atau turun -9,07% (yoy), namun realisasi belanja APBN selama triwulan I 2023 tumbuh positif dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

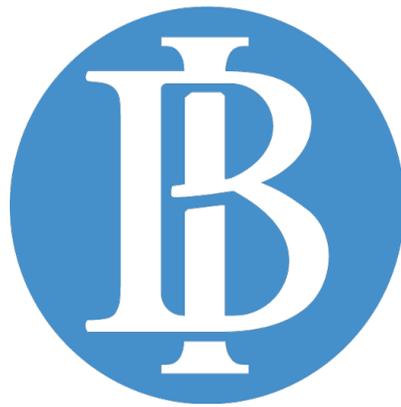
Berdasarkan jenisnya, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal mendominasi kontraksi alokasi pagu APBN di Bali pada tahun 2023, yaitu masing-masing sebesar -0,29%; -10,67%; serta -18,04% (yoy). Berdasarkan realisasinya, nominal belanja APBN pada triwulan I 2023 mencapai Rp1,78 triliun atau tumbuh signifikan mencapai 362,87% (yoy) dibandingkan realisasi belanja periode yang sama pada tahun sebelumnya yang

tercatat sebesar Rp0,39 triliun. Peningkatan nilai realisasi belanja APBN ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Hal ini juga sejalan dengan pembayaran gaji dan tunjangan, serta tunjangan kinerja, honorarium, dan pendapatan lainnya kepada pegawai ASN/TNI/POLRI/ PPPK yang dilaksanakan pada triwulan I 2023. Selain itu, masih berlanjutnya proses pengadaan barang dan jasa untuk penyediaan alat kesehatan dan penyandang disabilitas, serta pemberian beasiswa kurang mampu juga mendorong belanja pemerintah lebih tinggi di triwulan berjalan dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Bali Tahun 2022-2023

Jenis Belanja	Pagu APBN		Growth Pagu APBN (% yoy)	Realisasi APBN				Growth Realisasi 2023 (% yoy)
	2022	2023		2022 (Triwulan I)		2023 (Triwulan I)		
	Rp Triliun	Rp Triliun		Rp Triliun	% Realisasi	Rp Triliun	% Realisasi	
Belanja Pegawai	4.29	4.28	-0.29%	0.23	5.26	0.84	19.56	270.51
Belanja Barang	4.92	4.39	-10.67%	0.05	1.01	0.71	16.27	1339.79
Belanja Modal	3.36	2.76	-18.04%	0.11	3.27	0.22	8.05	101.55
Belanja Bantuan Sosial	0.03	0.03	3.67%	0.00	0.00	0.01	39.30	-
Total	12.59	11.45	-9.07%	0.39	3.06	1.78	15.58	362.87

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Bali, diolah



BAB III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

- Realisasi inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar 6,20% (yoy). dengan tekanan harga tertinggi terindikasi berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti dengan kelompok Transportasi, serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga.
- Ke depan, tekanan inflasi diproyeksikan cenderung mengalami penurunan seiring dengan berlanjutnya upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga.



WWW.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tantular
No. 4, Denpasar

Mei

2023



(0361) 248982



(0361) 222988



Jl. Letda Tantular No 4 Denpasar - Bali 80234

Realisasi inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar 6,20% (yoy). Sebagian besar kelompok komoditas mengalami tekanan inflasi tahunan pada triwulan I 2023, dengan tekanan harga tertinggi berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti dengan kelompok Transportasi, serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Lebih lanjut, realisasi inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2023 masih lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi Nasional yang tercatat sebesar 4,97% (yoy). Selanjutnya pada triwulan II 2023, tekanan inflasi diperkirakan kembali mengalami penurunan, terutama didorong oleh melandainya inflasi pada kelompok Makanan Minuman dan Tembakau. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali akan terus menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga agar inflasi Provinsi Bali tahun 2023 dapat terus menurun mendekati sasaran inflasi nasional sebesar $3\pm 1\%$.

3.1. PERKEMBANGAN INFLASI

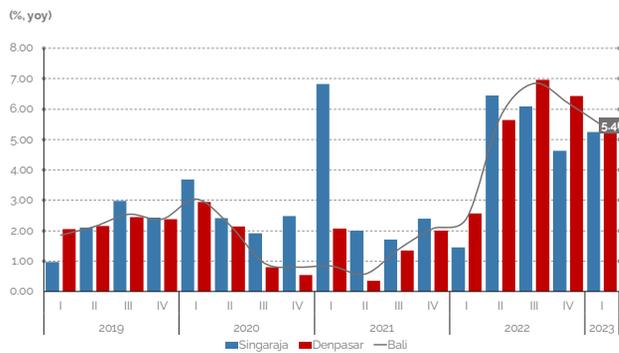
Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,20% (yoy). Berdasarkan kelompok barang, inflasi utamanya bersumber dari meningkatnya tekanan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti dengan kelompok Transportasi, serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Sementara itu, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan memberikan kontribusi dalam menahan tekanan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan I 2023. Melandainya tekanan inflasi pada triwulan I 2023 sejalan dengan hasil liaison Bank Indonesia Provinsi Bali yang menunjukkan penurunan harga jual tercermin dari skala likert yaitu dari 1,06 pada triwulan IV 2022 menjadi 0,56 pada triwulan I 2023 (Grafik 3.3).

Peningkatan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terindikasi didorong oleh kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas pangan dan rokok. Peningkatan harga secara tahunan pada komoditas pangan merupakan dampak dari keterbatasan pasokan selama triwulan I 2023 di tengah perubahan cuaca ekstrem dan tingkat potensi banjir di level menengah hingga Maret 2023. Selain itu, peningkatan harga juga didorong oleh peningkatan permintaan seiring dengan semakin naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke Bali, serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan, Kuningan, Nyepi dan awal bulan puasa Ramadhan. Di sisi lain,

tekanan harga juga terjadi pada komoditas rokok (kretek filter, rokok putih, dan rokok kretek) akibat dampak dari kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10% per 1 Januari 2023.

Peningkatan harga pada kelompok Transportasi terindikasi didorong oleh kenaikan harga bensin dan angkutan udara. Terjadinya kenaikan harga pada komoditas bensin seiring penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamina maupun BBM subsidi seperti Paltelite dan solar. Selanjutnya, peningkatan harga BBM juga menyebabkan timbulnya *second round effect* atau dampak lanjutan, terutama peningkatan tarif angkutan antarkota maupun tarif angkutan dalam kota. Lebih lanjut, faktor kenaikan inflasi lainnya juga tersinyalir didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring dengan kenaikan permintaan pada bulan puasa, meskipun harga avtur mengalami penurunan sebesar -5,34% (mtm) pada Maret 2023.

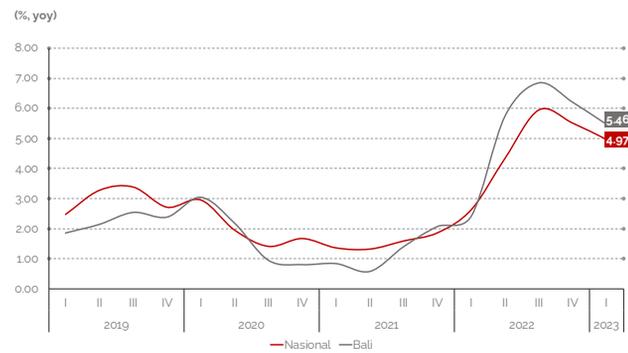
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT juga mengalami peningkatan harga yang terindikasi didorong oleh kenaikan sewa dan kontrak rumah, tarif air minum PAM, dan semen. Peningkatan harga pada tarif sewa dan kontrak rumah sejalan dengan meningkatnya permintaan seiring dengan tren pemulihan ekonomi Bali. Kenaikan harga juga terjadi pada tarif air minum PAM seiring dengan penerapan kebijakan spasial, yaitu kenaikan tarif air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar sebesar 12,24% pada Mei 2022 dan Kabupaten Buleleng sebesar 5% pada April 2022. Meski ditetapkan pada tahun sebelumnya, kenaikan

Grafik 3.1. Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Bali (%yoy)

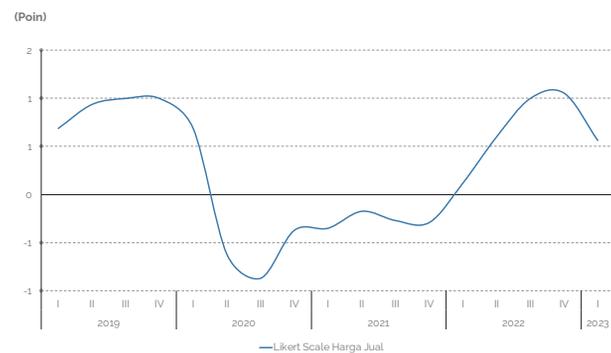
Sumber : BPS, diolah

tarif tersebut masih berdampak hingga triwulan I 2023. Selain itu, kenaikan harga semen terindikasi didorong oleh kenaikan permintaan, tercermin dari meningkatnya volume penjualan semen sebesar 23,1% (yoy) pada triwulan I 2023.

Secara spasial, tekanan harga di Kota Denpasar mengalami penurunan, sedangkan Kota Singaraja mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2023 (Maret 2023), inflasi Denpasar tercatat sebesar 5,50% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya (Desember 2022) yaitu sebesar 6,44% (yoy). Adapun penyumbang inflasi tahunan tertinggi di Kota Denpasar terindikasi berasal dari kenaikan harga komoditas bensin, beras, bahan bakar rumah tangga, perlengkapan keagamaan, dan rokok kretek filter. Sementara itu, inflasi di Kota Singaraja tercatat sebesar 5,25% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,63% (yoy). Adapun penyumbang inflasi tahunan tertinggi di Kota Singaraja terindikasi berasal dari kenaikan harga bensin, beras, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, dan telur ayam ras.

Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Gabungan Dua Kota di Provinsi Bali (%yoy)

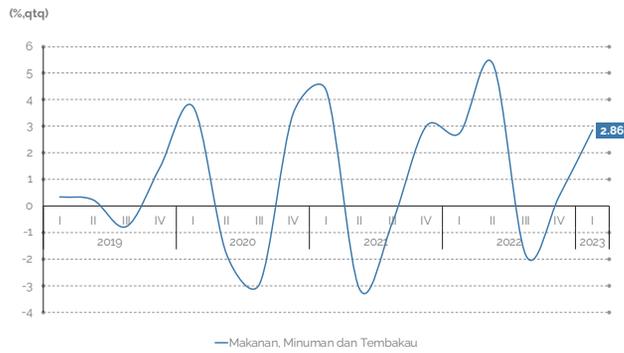
Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.3. Likert Scale Harga Jual di Provinsi Bali

Sumber : Bank Indonesia, diolah

3.2. INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

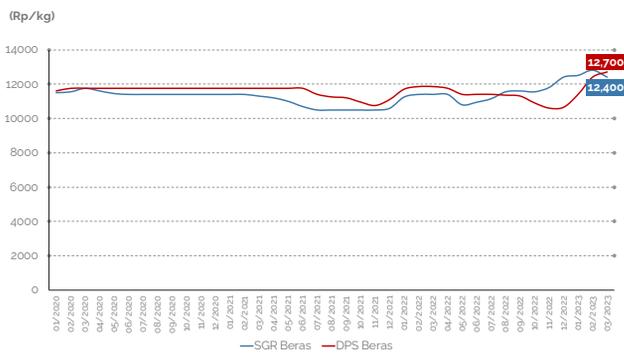
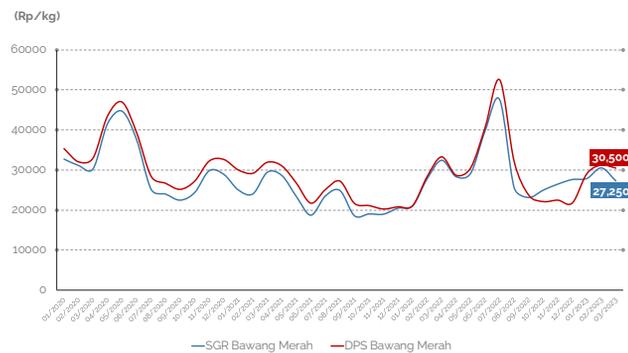
Peningkatan tekanan harga di Bali pada triwulan I 2023 terjadi pada sebagian besar kelompok barang. Peningkatan harga terbesar disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, diikuti oleh Kelompok Transportasi, dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga.

Grafik 3.4. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Bali

Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.5. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Bali

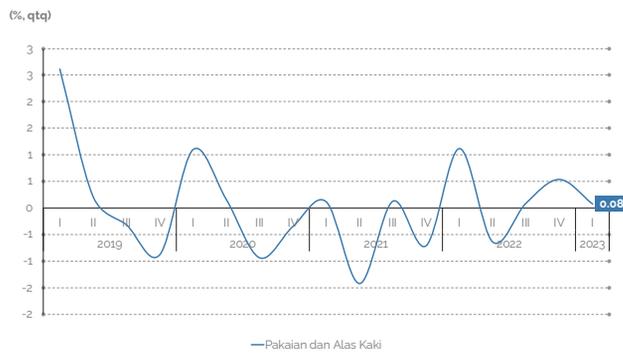
Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.6. Perkembangan Harga Beras (Rp/Kg)Sumber : www.hargapangan.id, diolah**Grafik 3.7. Perkembangan Harga Bawang Merah (Rp/Kg)**Sumber : www.hargapangan.id, diolah

KELOMPOK BAHAN MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU

Kelompok Bahan Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami peningkatan tekanan harga dari menjadi 6,62% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 6,75% (yoy) pada triwulan I 2023. Tekanan inflasi pada kelompok ini terindikasi dipicu kenaikan harga pada beberapa komoditas, di antaranya beras, rokok kretek filter, rokok putih, telur ayam ras, dan air kemasan. Peningkatan tekanan harga pada triwulan I 2023 khususnya bersumber dari naiknya harga komoditas beras dikarenakan

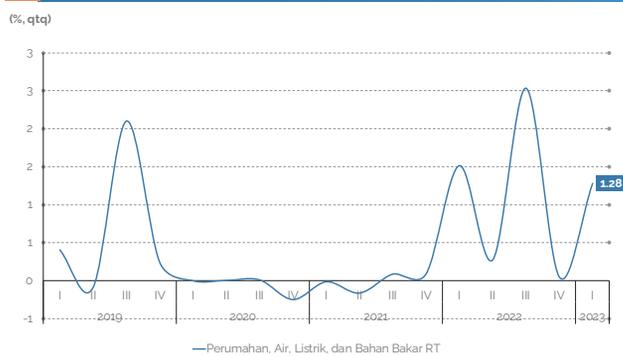
periode panen yang baru dimulai pada akhir Maret 2023. Peningkatan tekanan harga juga dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan sejumlah komoditas hortikultura khususnya bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan tomat. Curah hujan yang masih tinggi dan tingkat potensi banjir di level menengah yang menyebabkan hasil panen dalam provinsi (Kab. Bangli) kurang maksimal dan pasokan dari Pulau Jawa (Jawa Timur) terhambat (Grafik 3.6 & Grafik 3.7). Selain itu, komoditas beras juga mengalami peningkatan harga dikarenakan periode panen yang baru dimulai pada akhir Maret 2023.

Grafik 3.8. Inflasi Triwulanan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Prov. Bali

Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.9. Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Prov. Bali

Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.10. Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.11. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Prov. Bali

Sumber : BPS, diolah

KELOMPOK PAKAIAN DAN ALAS KAKI

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami penurunan tekanan harga dari 1,11% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 0,07% (yoy) pada triwulan I 2023. Komoditas sandang seperti sepatu dan pakaian jadi disinyalir menjadi komoditas penyumbang tekanan harga pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki, seiring dengan kembali dimulainya semester baru pembelajaran anak sekolah pada awal Januari dan perayaan sejumlah HBKN termasuk momentum memasuki bulan Ramadhan pada akhir Maret 2023.

KELOMPOK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR

Pada triwulan I 2023, tekanan harga kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar tercatat masih tinggi, meskipun melandai dari 4,42% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi sebesar 4,18% (yoy) pada triwulan I 2023. Beberapa komoditas yang terindikasi masih menahan penurunan tekanan harga di antaranya biaya sewa dan kontrak rumah, tarif air minum PAM, tarif

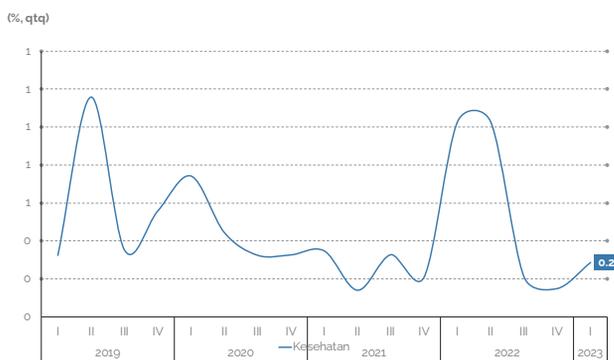
listrik, dan harga semen. Kenaikan biaya sewa dan kontrak rumah didorong oleh permintaan yang meningkat seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Naiknya biaya sewa dan kontrak rumah disinyalir juga disebabkan oleh biaya operasional pemeliharaan rumah yang meningkat. Selanjutnya kenaikan harga pada tarif air minum PAM terjadi seiring dengan penerapan kebijakan spasial, yaitu kenaikan tarif air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar sebesar 12,24% pada Mei 2022 dan Kabupaten Buleleng sebesar 5% pada April 2022. Sedangkan kenaikan tarif listrik terjadi seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik bagi pelanggan rumah tangga di atas 3500 VA dan pelanggan pemerintah berdaya 6000 VA hingga 200 kVA yang berlaku sejak 1 Juli 2022. Kenaikan tarif PDAM dan listrik tersebut masih berdampak terhadap tekanan inflasi hingga triwulan I 2023. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada harga semen seiring dengan meningkatnya volume penjualan semen sebesar 23,1% (yoy) pada triwulan I 2023.

Grafik 3.12. Inflasi Triwulanan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali

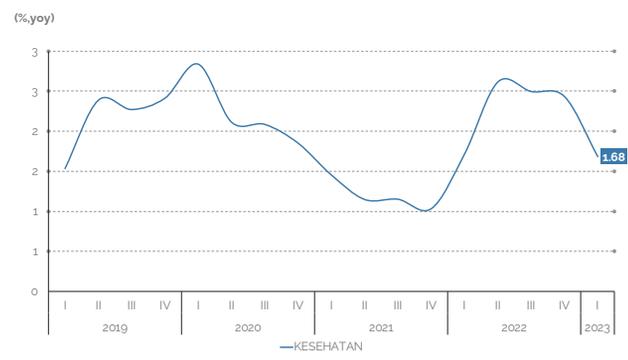
Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.13. Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali

Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.14. Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali

Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.15. Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali

Sumber : BPS, diolah

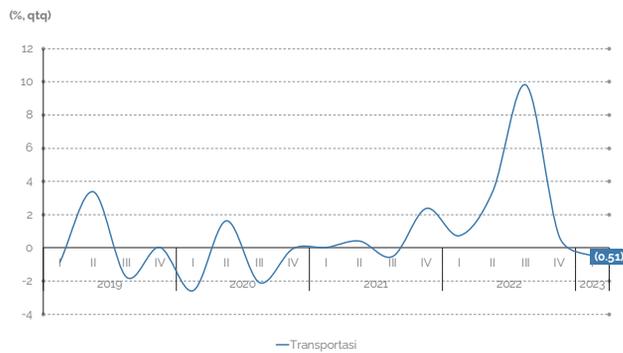
KELOMPOK PERLENGKAPAN, PERALATAN, DAN PEMELIHARAAN RT

Pada triwulan I 2023 terjadi penurunan tekanan harga pada kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT dari 7,20% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 5,99% (yoy) pada triwulan I 2023. Komoditas perlengkapan keagamaan disyalir menjadi komoditas penyumbang tekanan harga seiring dengan perayaan HBKN Galungan dan Kuningan pada awal Januari 2023 dan Nyepi pada akhir Maret 2023, sehingga kebutuhan terhadap canang sari pada mengalami peningkatan. Meskipun demikian, terjadinya penurunan tekanan harga pada kelompok ini terindikasi didorong oleh melandainya kenaikan tekanan harga pada komoditas sabun pencuci. Tekanan harga sabun pencuci melandai seiring dengan menurunnya harga bahan baku di pasar global yaitu minyak kelapa sawit pada triwulan I 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (37,46%, yoy).

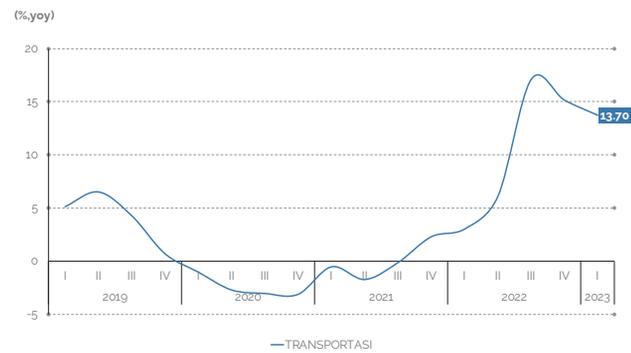
KELOMPOK KESEHATAN

Tekanan harga Kelompok Kesehatan mengalami penurunan dari 2,43% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 1,63% (yoy) pada triwulan I 2023. Penurunan ini terjadi seiring dengan semakin rendahnya jumlah kasus penularan pandemi COVID-19 apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Tekanan harga pada kelompok Kesehatan berpotensi terus mengalami perlambatan seiring dengan semakin terkendalnya kasus COVID-19 dan realisasi pemberian vaksinasi *booster* ke-II sebagaimana terpantau dari situs resmi Kementerian Kesehatan RI¹. Meskipun demikian, secara triwulanan terjadi peningkatan tekanan harga dibandingkan triwulan IV 2022 seiring dengan meningkatnya paparan penyakit penyerta musim hujan seperti demam berdarah, flu, dan diare yang berdampak pada peningkatan kebutuhan atas obat/vitamin serta kunjungan ke fasilitas kesehatan.

1. <https://vaksin.kemkes.go.id/>

Grafik 3.16. Inflasi Triwulanan Transportasi di Provinsi Bali

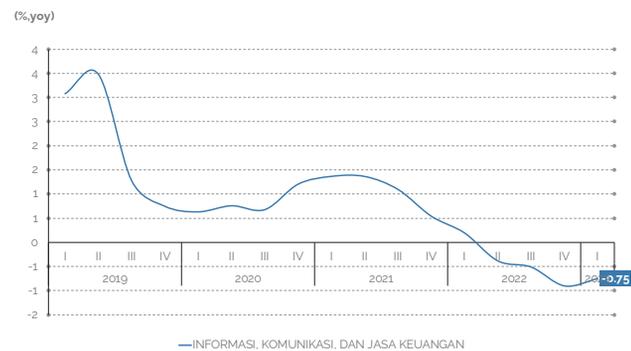
Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.17. Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali

Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.18. Inflasi Triwulanan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%qtq)

Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.19. Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%yoy)

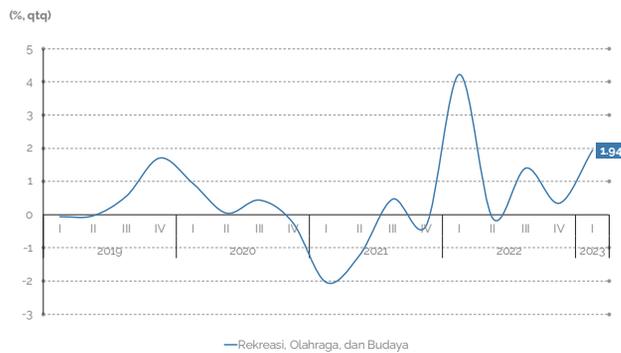
Sumber : BPS, diolah

KELOMPOK TRANSPORTASI

Pada triwulan I 2023, tekanan harga kelompok Transportasi tercatat masih tinggi, meskipun kembali mengalami penurunan dari 15,13% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 13,70% (yoy) pada triwulan I 2023. Penurunan tekanan harga disinyalir terjadi seiring dengan normalisasi permintaan pasca berakhirnya periode liburan Natal dan Tahun Baru, serta semakin banyaknya maskapai penerbangan yang kembali membuka rute penerbangan langsung ke Bali dan melandainya harga avtur pada periode Januari-Maret 2023. Meskipun demikian, masih tingginya tekanan harga dipengaruhi oleh penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamina maupun BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. Selanjutnya, peningkatan harga BBM juga menyebabkan timbulnya *second round effect* atau dampak lanjutan, terutama peningkatan tarif angkutan antarkota maupun tarif angkutan dalam kota.

KELOMPOK INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN

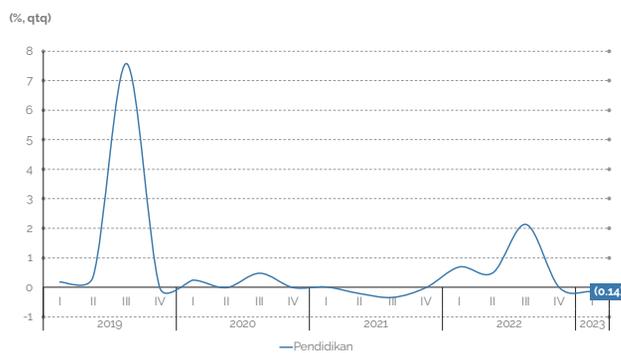
Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan masih mengalami penurunan tekanan harga meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya yakni sebesar -0,75% (yoy) pada triwulan I 2023. Penurunan tekanan harga terindikasi disebabkan oleh penurunan harga pada perangkat elektronik dan komunikasi seperti telepon selular dan televisi. Penurunan tekanan harga pada perangkat elektronik dan komunikasi terjadi sejalan dengan laporan *Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker* dari perusahaan riset *International Data Corporation* yang menyatakan bahwa pasar *smartphone* di Indonesia pada triwulan I 2023 mengalami penurunan sebesar 8,1% (yoy). Adapun penurunan tersebut disinyalir terjadi karena *stance* pelaku usaha maupun konsumen rumah tangga untuk *wait and see* dalam melakukan pembelian barang-barang mahal. Meskipun demikian secara triwulanan terjadi peningkatan tekanan harga dibandingkan triwulan IV 2022 seiring dengan peningkatan permintaan pada periode memasuki bulan Ramadhan di akhir Maret 2023.

Grafik 3.20. Inflasi Triwulanan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (% ,qtq)

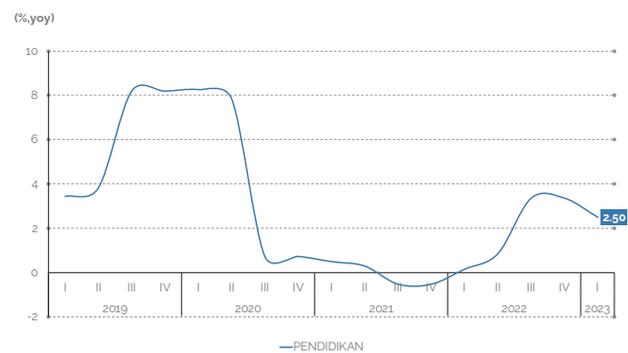
Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.21. Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (% ,yoy)

Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.22. Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (% ,qtq)

Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.23. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (% ,yoy)

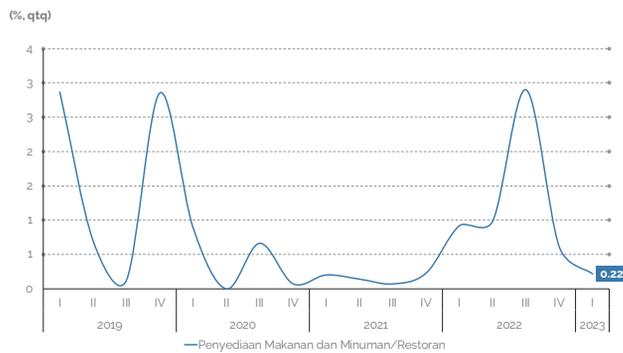
Sumber : BPS, diolah

KELOMPOK REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA

Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya mengalami penurunan tekanan harga dari 5,93% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 3,62% (yoy) pada triwulan I 2023. Adapun kebutuhan alat tulis dan mainan anak terindikasi berkontribusi menjadi komoditas penyumbang peningkatan tekanan harga pada kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya. Adapun kenaikan harga pada kebutuhan alat tulis, seperti buku tulis dan pulpen/ bollpoint, berhubungan erat meningkatnya kebutuhan pelajar atas alat tulis seiring dengan kembali dimulainya semester genap pembelajaran anak sekolah pada Januari 2023. Sedangkan, sarana rekreasi seperti mainan anak terjadi seiring dengan peningkatan permintaan pada saat libur sekolah pada awal Januari 2023.

KELOMPOK PENDIDIKAN

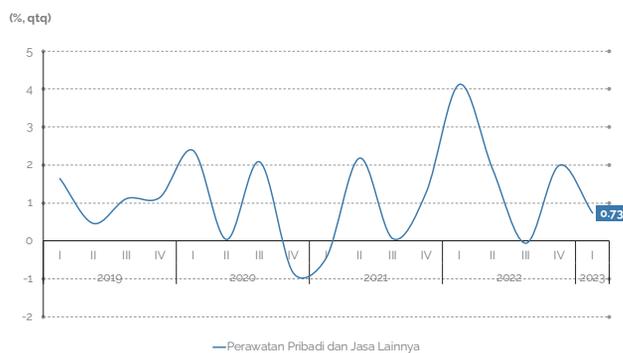
Kelompok Pendidikan mengalami penurunan tekanan harga dari 3,36% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 2,50% (yoy) pada triwulan I 2023. Adapun penurunan tekanan harga terindikasi terjadi seiring dengan normalisasi kenaikan tarif pada pendidikan formal maupun non formal oleh fasilitas lembaga pendidikan yang sebelumnya membutuhkan tambahan dana operasional untuk revitalisasi fasilitas dan bangunan pasca tidak dihuni selama lebih dari 2 tahun sejak masa pandemi COVID-19. Penurunan yang lebih dalam tertahan dengan peningkatan permintaan seiring dengan dimulainya semester genap pembelajaran anak sekolah pada Januari 2023 yang sekaligus menjadi periode persiapan akhir menjelang ujian sekolah dan/atau ujian nasional.

Grafik 3.24. Inflasi Triwulanan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (% qta)

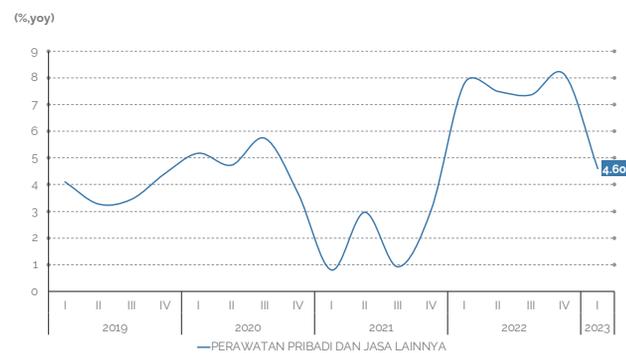
Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.25. Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (% yoy)

Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.26. Inflasi Triwulanan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (% qta)

Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.27. Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (% yoy)

Sumber : BPS, diolah

KELOMPOK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN

Pada triwulan I 2023, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tercatat masih cukup tinggi, meskipun kembali mengalami penurunan dari 5,52% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 4,78% (yoy) pada triwulan I 2023. Meskipun melandai, tingginya harga makanan jadi disinyalir menjadi komoditas penyumbang tekanan harga yang masih tinggi sejalan dengan pemulihan ekonomi masyarakat Provinsi Bali. Selain itu, harga bahan baku makanan jadi, seperti gandum dan tepung terigu sebagai dampak konflik regional Rusia – Ukraina juga masih tinggi. Peningkatan harga juga dipengaruhi oleh naiknya biaya operasional pelaku usaha akibat kenaikan tarif produksi seiring dengan naiknya harga BBM dan tarif air minum PAM.

KELOMPOK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami penurunan tekanan harga yang cukup dalam dari 8,12% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 4,60% (yoy) pada triwulan I 2023. Penurunan tekanan harga terindikasi dipengaruhi oleh melandainya kenaikan tekanan harga pada sabun mandi, pasta gigi, dan emas perhiasan. Melandainya kenaikan tekanan harga sabun mandi dan pasta gigi terjadi seiring dengan menurunnya harga bahan baku di pasar global yaitu minyak kelapa sawit pada triwulan I 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (37,46%, yoy). Harga emas dunia yang masih tinggi disinyalir menahan permintaan masyarakat untuk melakukan pembelian.

Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2022				2022
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy
Makanan, Minuman dan Tembakau	2.22	10.15	9.23	6.70	6.85
Pakaian dan Alas Kaki	(1.31)	(0.21)	(0.32)	1.18	(0.12)
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	1.72	2.16	4.67	4.60	4.02
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	8.47	15.74	6.17	8.62	6.83
Kesehatan	1.94	3.09	2.86	2.79	1.89
Transportasi	3.11	6.32	17.36	15.15	13.58
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0.30	(0.50)	(0.57)	(1.02)	(0.86)
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	3.26	4.60	5.31	5.99	3.02
Pendidikan	0.09	0.84	3.63	3.63	2.71
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1.52	2.29	5.44	5.83	5.01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8.19	8.02	7.76	8.49	4.37
UMUM	2.56	5.65	6.96	6.44	5.50

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3.2. Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2022					2023
	TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I
	yoy	yoy	yoy	qtq	yoy	yoy
Makanan, Minuman dan Tembakau	0.46	14.13	10.25	1.44	6.22	6.28
Pakaian dan Alas Kaki	1.28	0.39	0.73	0.12	0.74	1.03
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	0.12	0.61	2.92	-	3.06	5.37
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	8.99	9.15	1.56	0.37	(1.97)	0.27
Kesehatan	0.52	0.14	0.61	0.01	0.55	0.56
Transportasi	2.18	4.15	14.96	0.01	14.94	14.65
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	(0.66)	0.47	(0.04)	0.05	0.02	0.09
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1.91	1.90	4.61	0.41	5.54	7.65
Pendidikan	1.08	1.08	(0.19)	-	(0.19)	(0.19)
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0.00	1.67	2.01	-	2.55	2.61
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5.30	4.05	4.80	0.80	5.70	6.12
Umum	1.46	6.45	6.09	0.59	4.63	5.25

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

3.3. Inflasi Menurut Kota

Secara spasial, tekanan harga di Kota Denpasar mengalami penurunan pada triwulan I 2023, sedangkan tekanan harga di Kota Singaraja meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan kelompok komoditas barang dan jasa, sumbangan inflasi di Kota Denpasar dan Kota Singaraja bersumber dari tekanan harga pada Kelompok Transportasi, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga.

KOTA DENPASAR

Kota Denpasar tercatat mengalami penurunan inflasi, yaitu dari 6,44% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 5,50% (yoy) pada triwulan I 2023. Meskipun demikian, kenaikan harga terjadi pada 9 dari 11 kelompok komoditas, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada Kelompok Transportasi. Di sisi lain, Kelompok Informasi, Komunikasi

dan Jasa Keuangan dan kelompok Pakaian dan Alas Kaki menjadi kelompok yang mengalami penurunan harga pada triwulan I 2022. Komoditas penyumbang utama inflasi tahunan di Kota Denpasar disinyalir berasal dari kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti bensin, beras, bahan bakar rumah tangga, perlengkapan keagamaan, dan rokok.

KOTA SINGARAJA

Kota Singaraja mengalami inflasi sebesar 5,25% (yoy) pada triwulan I 2023, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 4,63% (yoy). Sebagian besar kelompok komoditas mengalami peningkatan tekanan harga dengan Kelompok Transportasi mengalami kenaikan harga yang paling tinggi. Kelompok Pendidikan menjadi kelompok yang mengalami deflasi pada triwulan IV 2022. Komoditas penyumbang utama inflasi tahunan di Kota Singaraja disinyalir berasal dari kenaikan harga pada beberapa

komoditas seperti bensin, beras, bahan bakar rumah tangga, rokok, dan telur ayam.

3.4. INFLASI PEDESAAN

Pada periode triwulan I 2023 inflasi pedesaan Provinsi Bali tercatat sebesar 6,65% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 6,00% (yoy). Kenaikan tekanan harga pada tingkat pedesaan tersinyalir disumbang oleh naiknya indeks pada seluruh kelompok penyusunnya, terutama kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Berdasarkan komoditas, bawang putih, cabai rawit, dan buncis menjadi komoditas dengan andil terbesar dalam menyumbang inflasi pedesaan. Sebaliknya, komoditas beras, daging ayam ras, dan bawang merah menjadi komoditas yang menahan laju kenaikan inflasi pedesaan.

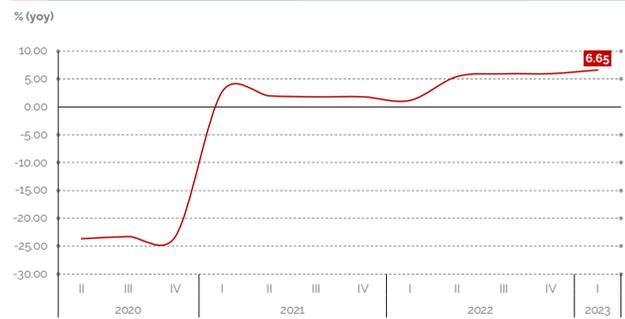
3.5. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

Selama triwulan I 2023, koordinasi pengendalian inflasi daerah di Provinsi Bali melalui wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik level provinsi maupun kab/kota dilakukan secara aktif. Sepanjang triwulan I 2023 tersebut telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali *High Level Meeting* (HLM) TPID tingkat Provinsi dan Kota/Kab dengan rincian sebagai berikut:

- HLM TPID Kabupaten Buleleng pada 18 Januari 2023
- HLM TIPD Kabupaten Badung pada 7 Februari 2023
- HLM TIPD Kabupaten Klungkung pada 1 Maret 2023
- HLM TPID Rapat Koordinasi TPID Se-Provinsi Bali pada 16 Maret 2023

Topik pembahasan dalam HLM TPID pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Bali secara umum berfokus pada antisipasi tekanan harga yang lebih tinggi pada komoditas pangan khususnya seiring dengan peningkatan permintaan dalam rangka persiapan HBKN Nyepi dan Idul Fitri 1444 H di tengah keterbatasan *supply* dari wilayah pemasok. Secara lebih spesifik, topik pembahasan meliputi agenda penyelenggaraan Operasi

Grafik 3.28. Perkembangan Inflasi Pedesaan (ytd)



Sumber: BPS, diolah

Pasar pada triwulan I 2023, penguatan neraca pangan di Provinsi Bali, hingga penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Banyuwangi pada 14 Maret 2023 untuk menjamin ketersediaan stok pada saat dibutuhkan. Kegiatan HLM telah menciptakan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mendorong pengendalian inflasi di Provinsi Bali.

Adapun sejumlah rekomendasi yang dihasilkan pada HLM di antaranya adalah sebagai berikut.

A. Jangka Pendek:

- Keterjangkauan Harga: Optimalisasi program operasi pasar (bahan pokok dan hortikultura penyumbang inflasi, seperti beras, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah, minyak goreng).
- Ketersediaan pasokan: gerakan tanam hortikultura di pekarangan rumah (kerja sama dengan PKK dan bantuan benih).
- Kelancaran distribusi: peningkatan kerja sama antardaerah (antar perusda/perumda dan B to B), khususnya intra Provinsi Bali.
- Komunikasi Efektif: peningkatan koordinasi antar *stakeholders* dan komunikasi kepada masyarakat.

B. Jangka Panjang:

- Keterjangkauan Harga: Optimalisasi peran perusda sebagai aggregator untuk mengurangi rantai distribusi.

Tabel 3.3. Pelaksanaan Kegiatan Rutin Pengendalian Inflasi Mingguan di Wilayah Provinsi Bali

No	Bulan	Frekuensi	Kab/Kota	Komoditas
1	Januari	49x	1. Kota Denpasar 2. Kab. Buleleng	
2	Februari	60x	1. Kota Denpasar 2. Kab. Bangli 3. Kab. Buleleng 4. Kab. Jembrana 5. Kab. Karangasem 6. Kab. Klungkung	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras, Cabai Merah, Cabai Rawit, Canang Sari, Daging Ayam, Daging Babi, Gula Pasir, Ikan Tongkol, Jeruk, Kacang Kedelai, Kelapa, Kentang, Minyak Goreng, Pisang, Tahu, Telur Ayam Ras, Tempe, Tomat, Udang, Wortel, Kol/Kubis, Sawi Putih, Timun, Jeruk,
3	Maret	63x	1. Kota Denpasar 2. Kab. Badung 3. Kab. Bangli 4. Kab. Buleleng 5. Kab. Jembrana 6. Kab. Karangasem 7. Kab. Klungkung 8. Kab. Tabanan	Terong, Buncis, Mangga, Jahe, Kunyit, Kencur, Markisa, Terong, Jair/Nila, Sayur Hijau, Ketela Rambat Madu, Keladi.

Sumber: Bank Indonesia, diolah

- Ketersediaan Pasokan: Modernisasi pertanian dan efisiensi biaya produksi dan Pemanfaatan *Controlled Atmosphere Storage* (CAS) dan pengembangan industri pengolahan produk hortikultura di Kabupaten yang menjadi sentra produksi.
- Kelancaran Distribusi: pembangunan Pasar Induk untuk Komoditas Bahan Pokok dan Hortikultura, pengembangan digitalisasi pasar hortikultura (balai lelang) untuk meningkatkan harga di level petani, *monitoring* distribusi logistik di pintu masuk dan keluar pelabuhan.
- Komunikasi efektif: Penggunaan media informasi mengenai perkembangan harga.

Dalam rangka mengantisipasi tekanan harga pada komoditas strategis, TPID se-Balinusra juga secara aktif melakukan kegiatan pasar murah dan pemantauan harga serta pasokan di pasar. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut.

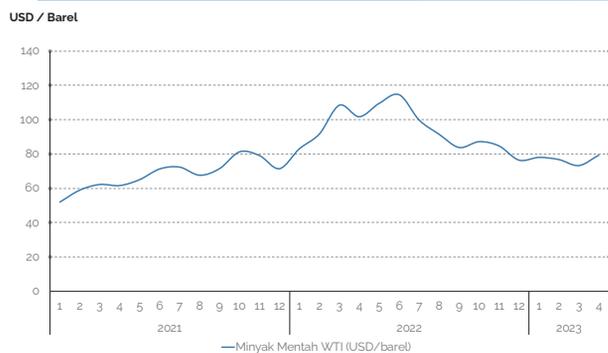
3.6. TRACKING INFLASI TRIWULAN II 2023

Pada April 2023, tekanan inflasi secara bulanan dan tahunan telah mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara bulanan, gabungan dua kota di Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,07% (mtm). Sementara secara tahunan, gabungan dua kota di Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 4,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan Maret 2023 sebesar 5,46% (yoy), namun lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 4,33% (yoy). Melandainya tekanan inflasi secara tahunan pada April 2023 ini juga sejalan

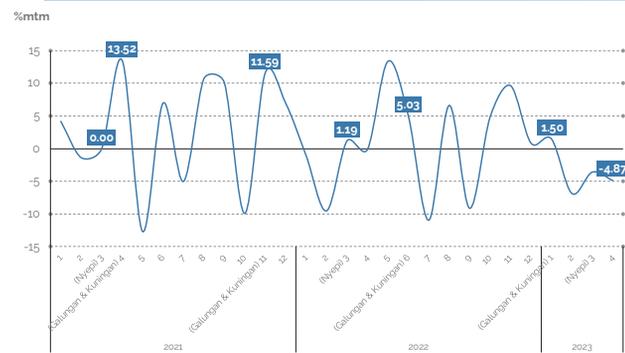
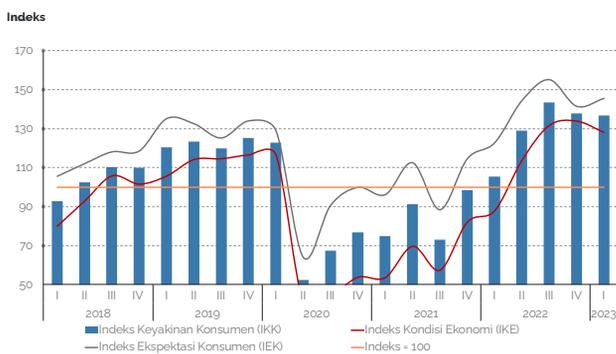
dengan menguatnya optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi, tercermin dari hasil Survei Konsumen di Provinsi Bali hingga April 2023 dimana Indeks Keyakinan Konsumen tercatat tumbuh sebesar 4% (mtm) atau 11% (yoy) (Grafik 3.31).

Berdasarkan perkembangan tekanan harga pada komoditas secara bulanan (mtm), inflasi pada April 2023 terindikasi bersumber dari kenaikan harga angkutan udara, daging ayam ras, angkutan antarkota, beras, dan tomat, sedangkan penurunan harga cabai rawit dan canang sari menjadi penahan laju inflasi. Terjadinya inflasi pada komoditas daging ayam ras terjadi akibat kenaikan harga pakan ayam dan *Day Old Chicken* (DOC). Kemudian, kenaikan harga beras terjadi akibat panen raya padi yang belum merata, kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah sebesar 19% mulai 16 Maret 2023, dan tingginya permintaan beras oleh Bulog untuk bantuan pangan 2023. Selanjutnya, tarif angkutan udara dan angkutan antarkota mengalami peningkatan seiring dengan naiknya mobilitas masyarakat pada periode liburan HBKN Idul Fitri 1444 H. Di sisi lain, tekanan harga pada komoditas canang sari mengalami penurunan seiring dengan normalisasi permintaan pasca berakhirnya HBKN Nyepi.

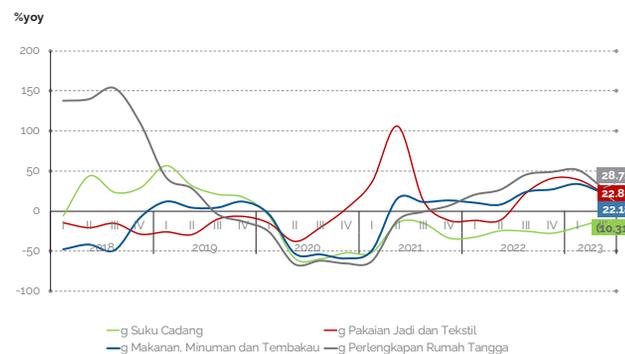
Dalam rangka memitigasi berlanjutnya tekanan harga khususnya dalam menghadapi HBKN Idul Fitri, TPID terus berupaya mengendalikan inflasi melalui kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Publik). Terkait implementasi pilar 4K, dari sisi keterjangkauan harga, TPID Bali telah mengoptimalkan penyelenggaraan operasi pasar hingga mencapai 236 kegiatan di berbagai wilayah di Bali hingga Mei 2023. Operasi pasar digelar untuk

Grafik 3.29. Perkembangan Harga Minyak Mentah Global (USD/Barel)


Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.30. Perkembangan Pola Perkembangan Harga Canang Sari di Provinsi Bali (%mtm)

Grafik 3.31. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi dan Indeks Ekspektasi Konsumen


Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.32. Perkembangan Pertumbuhan Penjualan Eceran Konsumsi Rumah Tangga


Bank Indonesia, diolah

beberapa komoditas seperti hortikultura (bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat), telur ayam ras, beras dan minyak goreng, bekerja sama dengan distributor dan pihak pengelola pasar. Dari sisi ketersediaan pasokan, TPID secara aktif terus mendorong wilayah yang surplus, seperti Kab. Bangli, Kab. Karangasem, dan Kab. Tabanan untuk cabai besar, untuk melakukan KAD ke daerah-daerah yang defisit baik di Provinsi Bali maupun di luar Provinsi Bali. Selanjutnya dari sisi kelancaran distribusi, selain pemantauan distribusi logistik keluar dan masuk Bali secara rutin, turut dilakukan pula fasilitasi distribusi pangan seperti pemanfaatan kapal milik Pemerintah Daerah hingga subsidi bebas bea penyeberangan di Kab. Klungkung. Sementara dari sisi komunikasi efektif, TPID Bali akan mengoptimalkan penggunaan berbagai media komunikasi untuk meneruskan informasi pengendalian

inflasi, di antaranya: (1) harga dan stok pangan 3 komoditas (hasil sidak mingguan); (2) risiko inflasi ke depan; (3) *key point* siaran pers inflasi; (4) hasil informasi stok dan pasokan mingguan. Upaya-upaya tersebut merupakan strategi TPID yang cukup efektif dalam menjaga kestabilan harga di masyarakat khususnya seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Dalam rangka menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi, TPID Provinsi Bali senantiasa berkoordinasi melalui pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) dan rapat koordinasi TPID, di antaranya:

Selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2023 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali telah melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)

Tabel 3.4. Pelaksanaan HLM dan Rapat Koordinasi TPID Sepanjang Periode Berjalan

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksana
1	Capacity Building Enumerator TPID Provinsi Bali	4 April 2023	TPID se-Provinsi Bali
2	Rapat Koordinasi Perumda se-Bali	4 April 2023	TPID se-Provinsi Bali
3	HLM TPID Kab. Badung	11 April 2023	TPID Kab. Badung

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar 3.1. Dokumentasi Kegiatan GNPIP Balinusra – Rabu, 17 Mei 2023



Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra). Kegiatan dilaksanakan di Gedung Kesenian Maria/Gedung Mario Kabupaten Tabanan dengan mengangkat tema "Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan melalui Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi: Mepada Payu Antuk Bbhswana Bali Sentosa (Bersinergi Mewujudkan Bali yang Makmur)". Kegiatan tersebut merupakan wujud sinergi dan inovasi guna mewujudkan kestabilan harga pangan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara dengan berfokus pada 3 (tiga) area, yaitu (1) Penguatan Kelembagaan melalui komitmen Perumda pangan se-Bali untuk membentuk Paiketan (Perkumpulan) Perumda Pangan Bali, (2) Digitalisasi

untuk Penguatan Data/Informasi Neraca Pangan antara lain melalui penguatan aplikasi SIGAPURA (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis) yang mencatat 18 komoditas pangan pada 60 pasar Kab/Kota se-Bali dan aplikasi PAN Bali (Pengendalian Angkutan Barang/Logistik Terintegrasi) Bali yang bertujuan mengotomasi manifest arus keluar masuk barang dari/ke Bali, serta (3) Sinergi Penguatan Klaster Pangan antara lain dengan Penerapan Budidaya Organik melalui Program Dedikasi Untuk Negeri dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perbankan.



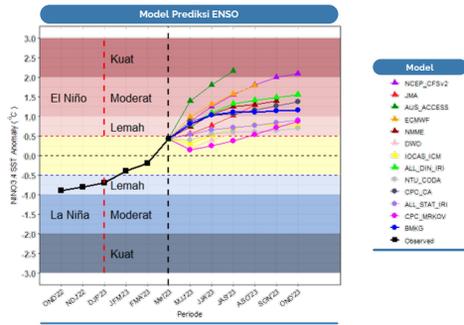


Mei 2023

BOKS 2

**MENGANTISIPASI
POTENSI DAMPAK EL NINO
DI PROVINSI BALI**

Gambar B3.1. Model Prediksi ENSO



Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

BMKG memprakirakan El Nino akan terjadi pada semester II 2023, yaitu pada Juli – September 2023.

El Nino adalah fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Dampak dari fenomena tersebut adalah berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia, sehingga memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. El Nino merupakan fenomena global, namun

dampaknya bervariasi antardaerah berdasarkan level El Nino (kuat, lemah, moderat) dan karakteristik masing-masing daerah. Dampak El Nino terhadap penurunan curah hujan akan semakin terlihat apabila terjadi pada musim kemarau. Pada 2023, musim kemarau diprediksi disertai fenomena El Nino yang berlangsung hingga kemarau berakhir.

BMKG dan beberapa pusat iklim dunia lainnya memprediksi kondisi ENSO (El Niño-Southern Oscillation) akan berada pada fase El Nino moderat pada semester II 2023.

Melihat kondisi Indonesia yang telah memasuki musim kemarau sejak bulan April 2023, El Nino berpotensi memberikan dampak yang signifikan meskipun bervariasi antarwilayah.

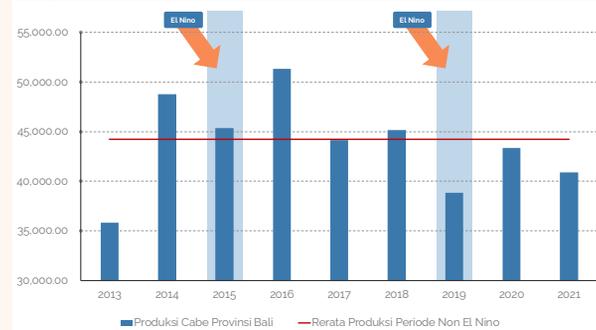
Fase El Nino lemah yang menyebabkan berkurangnya curah hujan berpotensi memengaruhi produktivitas pada sektor pertanian di Provinsi Bali. Berdasarkan data historis, terlihat bahwa pada tahun terjadinya El

Grafik B3.1. Perkembangan Produksi Tomat Provinsi Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik B3.2. Perkembangan Produksi Cabai Provinsi Bali



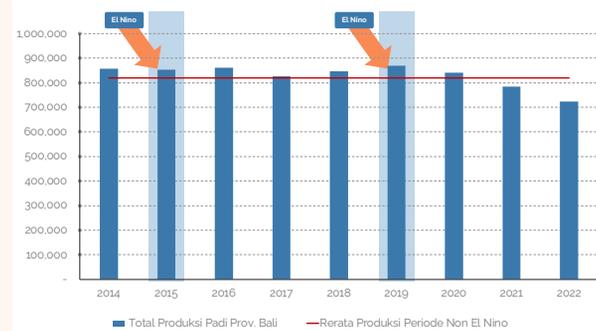
Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik B3.3. Perkembangan Produksi Bawang Merah Provinsi Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik B3.4. Perkembangan Produksi Padi Provinsi Bali



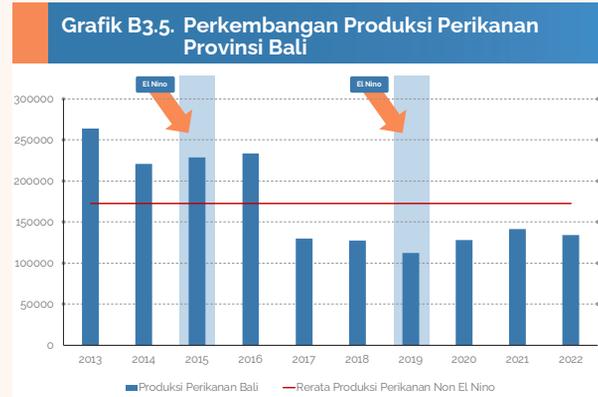
Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

BOKS 2

Nino (2015 dan 2019), produksi hortikultura menurun dibandingkan tahun sebelumnya, terutama komoditas cabai, tomat, dan bawang merah.

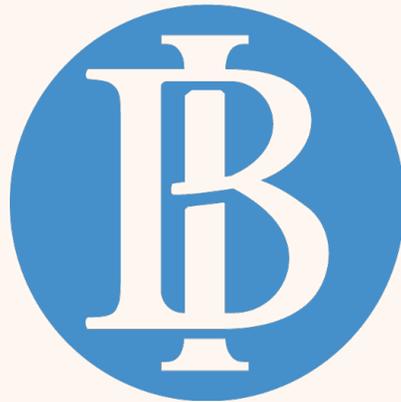
Di sisi lain, kondisi El Nino justru memberikan dampak positif bagi sektor perikanan. Hal ini dikarenakan kondisi suhu di permukaan air laut saat terjadinya El Nino akan mendukung pertumbuhan plankton-plankton sebagai sumber makanan bagi ikan, sehingga diharapkan akan menambah jumlah populasi ikan di laut. Berdasarkan data historis, terlihat bahwa produksi perikanan meningkat pada tahun El Nino kuat (2015) jika dibandingkan dengan rata-rata produksi perikanan di tahun non El Nino. Namun, pada tahun El Nino lemah (2019), terjadi penurunan produksi perikanan seiring dengan menurunnya jumlah nelayan di Provinsi Bali. Di samping itu, terdapat kendala penerbitan surat izin penangkapan ikan (SIPI) sehingga menghambat aktivitas kapal tangkap dalam berlayar. Akibatnya, banyak kapal yang akhirnya tidak melaut sehingga hasil tangkapan menurun pada periode tersebut.

Dampak negatif El Nino pada sektor pertanian dapat diantisipasi melalui beberapa upaya. Variabilitas iklim merupakan salah satu tantangan penting dalam sektor pertanian, sehingga akurasi informasi iklim akan membantu petani dalam menentukan perencanaan tanamnya. Dengan prediksi iklim yang presisi, petani dapat mengatur pola tanam sesuai kondisi iklim atau



Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

cuaca serta melakukan diversifikasi tanaman dengan memilih komoditas dan varietas sesuai dengan prediksi iklim. Untuk mengantisipasi kekeringan, perlu dipersiapkan infrastruktur waduk dan irigasi untuk mendukung pengairan. Di samping itu, petani perlu mengadopsi teknik irigasi yang efisien guna memastikan ketersediaan air untuk lahan pertanian hingga fase El Nino berakhir. Apabila dibutuhkan, kerja sama antardaerah (KAD) antara daerah surplus dengan defisit dapat didorong untuk berbagai komoditas yang terdampak El Nino. Di sisi lain, dampak positif El Nino pada sektor perikanan dapat dioptimalkan melalui penentuan *fishing ground* yang tepat untuk mengoptimalkan penangkapan. Untuk mengantisipasi melonjaknya produksi perikanan pada fase El Nino, dapat dipersiapkan fasilitas *cold storage* sebagai tempat penyimpanan hasil tangkapan nelayan guna menjaga kualitas hasil tangkapan.



BAB IV

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

- Intermediasi perbankan pada triwulan I 2023 menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan risiko kredit terjaga yang terkonfirmasi pada peningkatan kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), penyaluran kredit, dan pembiayaan UMKM di Provinsi Bali seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi Bali yang didukung dengan peningkatan kunjungan wisatawan.



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tantular
No. 4, Denpasar

Mei

2023

Tingkat intermediasi perbankan provinsi Bali pada triwulan I 2023 terpantau tetap baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Berlanjutnya pemulihan ekonomi Bali turut mendukung peningkatan kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit yang tetap tumbuh positif di Bali, dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Kinerja pembiayaan UMKM dalam juga tetap kuat seiring dengan semakin pulihnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang mendorong pemulihan aktivitas dunia usaha. Perkembangan tersebut turut didukung berbagai program stimulus yang diberikan oleh pemerintah bagi pelaku usaha kategori kecil dan menengah.

4.1. KINERJA PERBANKAN

Kinerja bank umum di Bali pada triwulan I 2023 melanjutkan tren peningkatan. Pertumbuhan aset bank umum di Bali mengalami akselerasi dari 15,83% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 37,07% (yoy) pada triwulan I 2023 (Grafik IV.1). Peningkatan aset perbankan didorong oleh akselerasi kinerja penghimpunan DPK di tengah kredit yang tetap tumbuh meski melambat.

4.1.1. Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan DPK pada triwulan I 2023 tumbuh 26,99% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 21,69% (yoy). Peningkatan penghimpunan DPK di Provinsi Bali terjadi seiring dengan terus berlanjutnya tren pemulihan ekonomi Bali secara keseluruhan. Terbukanya sejumlah lapangan pekerjaan baru diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menurunnya tingkat pengangguran, sehingga berdampak positif pada naiknya pendapatan masyarakat sekaligus membaiknya kinerja korporasi. Hal ini juga terjadi di tengah kondisi geopolitik global yang kurang stabil, sehingga mendorong kecenderungan untuk *wait and see* dan meningkatkan tabungan. Berdasarkan kategori DPK,

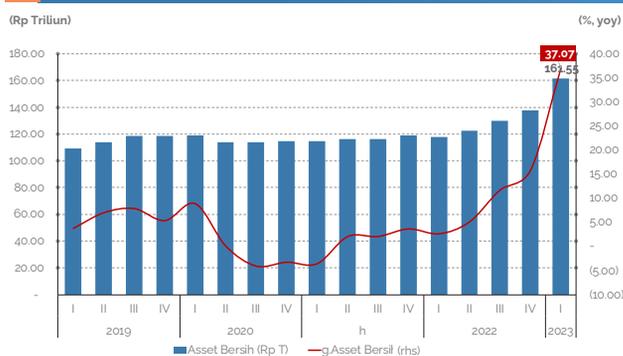
tabungan, deposito, maupun giro mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan I 2023, kepemilikan DPK di Bali masih didominasi oleh DPK perseorangan. Pangsa DPK perseorangan pada triwulan I 2023 tercatat mencapai 85,78% dari total DPK di Bali, meningkat dari 81,30%. Sementara itu pangsa DPK korporasi dan pemerintah masing-masing sebesar 21,85% dan 6,01% (Grafik IV.3). Dilihat dari pertumbuhannya, DPK perseorangan, korporasi maupun pemerintah mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya, (Grafik IV.4). Indeks penghasilan saat ini yang tidak turut terakselerasi layaknya pertumbuhan DPK perseorangan mengindikasikan sikap *wait and see* dari para masyarakat (non korporasi) (Grafik IV.5). Sementara itu, peningkatan pertumbuhan DPK korporasi juga sejalan dengan hasil *survey* perkembangan SKDU Kegiatan Usaha sepanjang triwulan I 2023 yang sedikit mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik IV.6).

4.1.2. Penyaluran Kredit

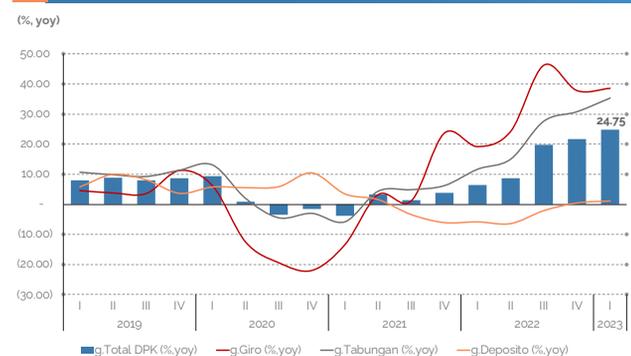
Penyaluran kredit pada triwulan I 2023 tercatat tumbuh positif 1,96%, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 4,12%

Grafik 4.1. Perkembangan Aset Perbankan



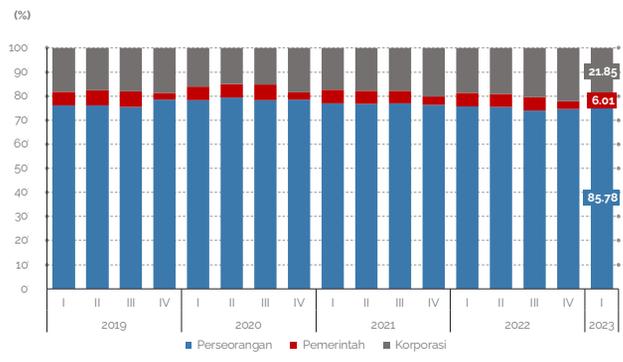
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.2. Perkembangan DPK Perbankan



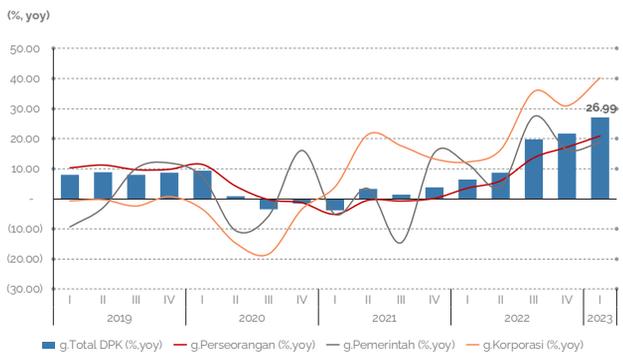
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.3. Pangsa Kepemilikan DPK



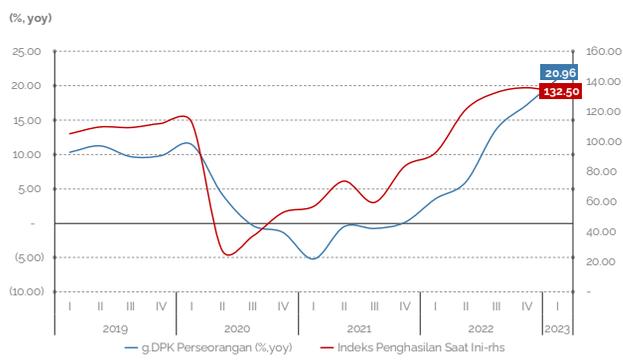
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.4. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Kepemilikan



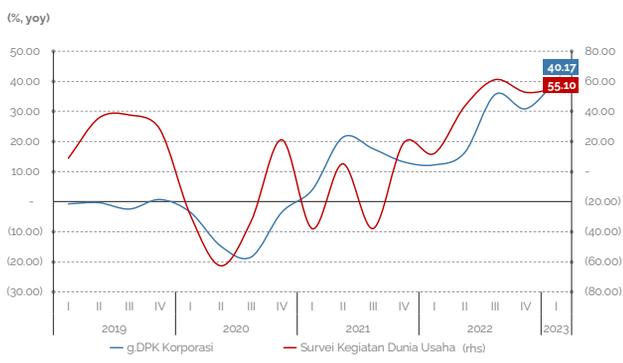
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.5. Perkembangan DPK Perseorangan dan Indeks Penghasilan



Sumber: Laporan Bank Umum dan Survei Konsumen, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.6. Perkembangan DPK Korporasi dan Kondisi Kegiatan Usaha



Sumber: Laporan Bank Umum-Bank Indonesia dan BPKAD Provinsi Bali (diolah)

(yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit Provinsi Bali disumbang oleh perlambatan pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit investasi, sementara kredit konsumsi tetap tumbuh relatif stabil. Pada triwulan I 2023 kredit modal kerja tercatat tumbuh sebesar 3,19% (yoy) sementara kredit investasi kontraksi 0,90% (yoy), turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,57% (yoy) dan 3,26% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit modal kerja terkonfirmasi pula dengan hasil *liaison* yang menunjukkan penurunan skala likert kapasitas utilisasi dan jumlah tenaga kerja pada triwulan I 2023 (Grafik IV.9). Di sisi lain kredit konsumsi pada triwulan I 2023 di Provinsi Bali tumbuh sebesar 3,87% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,55% (yoy) (Grafik IV.8). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sudah semakin membaik dan *level of confidence* untuk melakukan ekspansi ekonomi sudah semakin meningkat, bergerak ke arah periode sebelum pandemi Covid-19. Lebih lanjut, dilihat dari sisi porsi masing-masing kategori kredit, secara umum ketiga kategori kredit memberikan sumbangan yang relatif

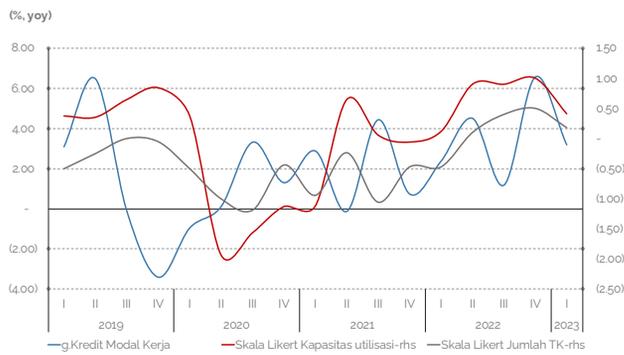
Grafik 4.7. Perkembangan Kinerja Penyaluran Kredit Perbankan



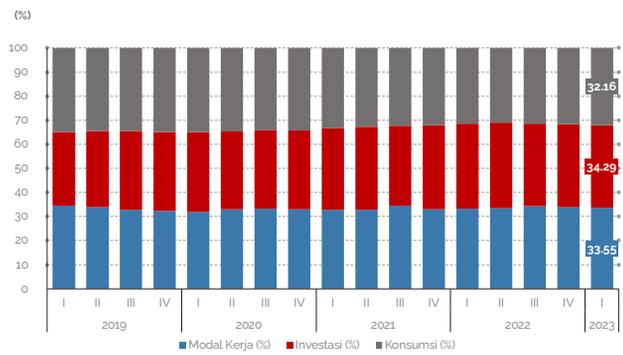
Sumber: Laporan Bank Umum dan Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia (diolah)

berimbang yaitu pada kisaran 31-35%, dengan kredit investasi menjadi penyumbang terbesar (Grafik IV.10).

Berdasarkan lapangan usaha (LU), penyaluran kredit di Bali tertahan oleh perlambatan penyaluran kredit hampir di seluruh LU utama, terutama LU Konstruksi, LU Industri Pengolahan, LU Akmamin dan LU Perdagangan yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik IV.11). Perlambatan penyaluran kredit pada LU Konstruksi, Industri Pengolahan dan Akmamin terjadi sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi

Grafik 4.8. Perkembangan Kredit Modal Kerja dan Skala Likert

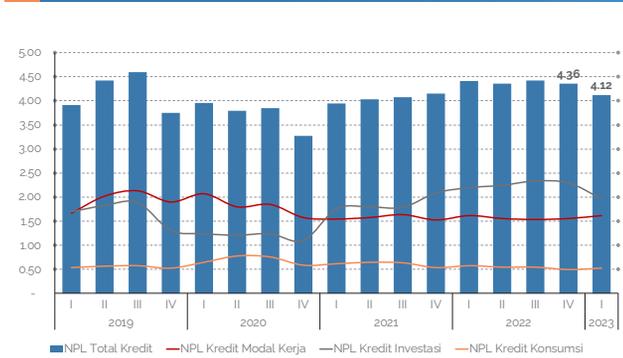
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.9. Pangsa masing-masing kategori kredit di Provinsi Bali

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.10. Perkembangan Kredit Sektoral

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.11. Perkembangan NPL Kredit

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

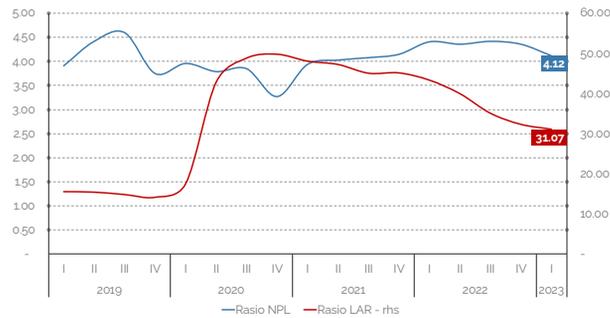
pada sektor-sektor tersebut. Hal tersebut didorong oleh telah selesainya pembangunan berbagai infrastruktur prioritas nasional di Bali serta normalisasi kunjungan wisatawan pasca libur akhir tahun dan pelaksanaan berbagai event KTT G20.

Ditinjau dari sisi kualitas kredit yang tercermin dari rasio *Non-Performing Loan (NPL)*, kualitas kredit di Bali pada triwulan I 2023 tetap terjaga dengan NPL berada di bawah *threshold 5%*. NPL Bali pada triwulan laporan tercatat sebesar 4,12%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,36% (Grafik IV.12). Berdasarkan penggunaannya, penurunan rasio NPL pada triwulan I 2023 dipengaruhi oleh menurunnya NPL pada kredit investasi, sementara NPL pada kredit modal kerja sedikit mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kualitas kredit yang terjaga didorong oleh perpanjangan program restrukturisasi kredit. Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian dan ancaman permasalahan geopolitik yang masih berlanjut, Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) secara aktif melakukan upaya untuk meminimalisasi risiko perbankan, salah satunya dengan memperpanjang masa restrukturisasi kredit perbankan kepada debitur terdampak COVID-19 selama satu tahun, dari semula berakhir pada 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Khusus untuk Bali, sesuai dengan POJK No. 19 Tahun 2022, periode restrukturisasi kredit diperpanjang hingga 31 Maret 2024. Target segmen dari program tersebut adalah UMKM yang mencakup seluruh sector, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, dan beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki. Bank Indonesia juga turut mengimplementasikan sejumlah kebijakan makprudensial untuk mendukung penyaluran kredit, antara lain melalui pelonggaran rasio *Loan To Value / Financing To Value (LTV/FTV)* Kredit/ Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan). Selain itu, pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor

Grafik 4.12. Perkembangan Perbandingan NPL dan LAR Kredit



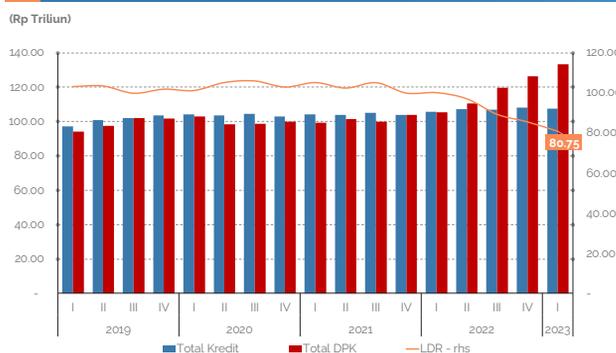
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

baru juga masih berlanjut untuk mendorong penyaluran kredit otomotif. Dengan demikian pada triwulan I 2023 rasio LAR di Bali tercatat semakin membaik (Grafik IV.13). Hal ini juga terlihat dari penurunan nilai kredit kolektibilitas 1 yang direstrukturisasi (Grafik IV.14).

4.1.3. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Tingkat intermediasi perbankan di Bali berada dalam level optimal walaupun tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks *Loan to Deposit Ratio* (LDR) triwulan I 2023 yang berada pada level 80,75% 85,45%, di dalam rentang ideal LDR perbankan¹ (Grafik IV.15). Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan penghimpunan DPK lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit pada triwulan laporan.

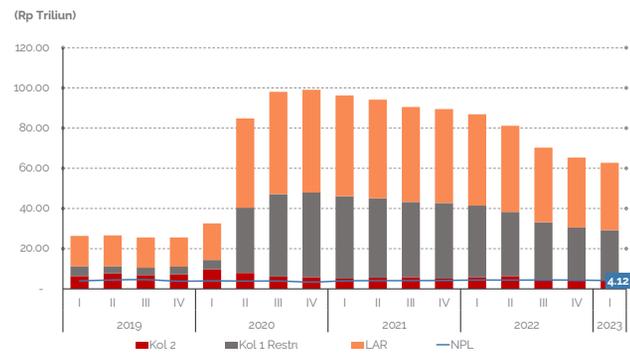
Grafik 4.14. Perkembangan LDR



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

1. Berdasarkan PBI No.17/11/PBI/2015, tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio LDR ditetapkan pada rentang 78%-92%.

Grafik 4.13. Perkembangan LAR Kredit



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

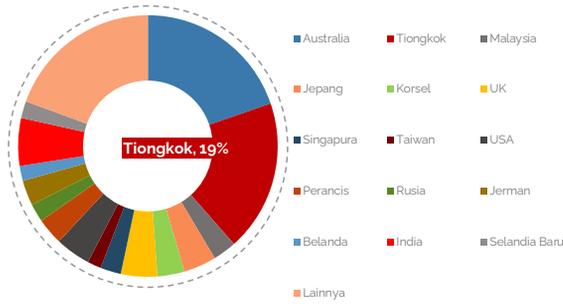
4.2. KINERJA KEUANGAN KORPORASI

4.2.1. Sumber Kerentanan Korporasi

Secara umum, sumber kerentanan kinerja korporasi di Bali berasal dari perkembangan kinerja pariwisata global maupun domestik. Pariwisata merupakan sektor utama penggerak ekonomi Provinsi Bali. Oleh sebab itu, ketika terjadi pandemi COVID-19 Provinsi Bali menjadi salah satu daerah yang paling terdampak. Hal ini merupakan dampak dari penutupan *border* internasional di berbagai negara di dunia yang berakibat pada terhentinya kunjungan wisatawan mancanegara. Ketergantungan yang sangat besar terhadap kinerja pariwisata ini dapat menjadi sumber kerentanan korporasi Bali yang didominasi oleh korporasi pendukung sektor pariwisata di antaranya LU Akmamin, LU Perdagangan, dan LU Transportasi.

Pada masa pra pandemi COVID-19, wisatawan mancanegara di Bali di dominasi oleh wisatawan asal Tiongkok (Grafik IV.16). Memasuki masa pasca pandemi COVID-19, pangsa kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mengalami perubahan. Wisatawan asal Australia dan Jepang mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali dengan pangsa pasar mencapai 26,14% dan 23,33% (Grafik IV.17). Sementara itu, pangsa kunjungan wisatawan Tiongkok tercatat hanya 2,21% disebabkan oleh penerapan *Zero Covid Policy* oleh

Grafik 4.15. Pangsa Wisatawan Mancanegara Bali Tahun 2019

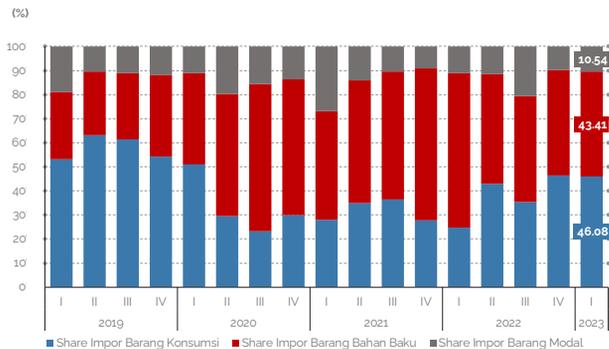


Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

pemerintah Tiongkok yang sangat membatasi kunjungan wisman. Pada 2023, Tiongkok telah berkomitmen untuk melakukan relaksasi terkait aktivitas keluar-masuk penduduk domestik Tiongkok maupun global, sehingga diharapkan aktivitas pariwisata penduduk Tiongkok ke Bali dapat kembali menggeliat seperti periode pra-pandemi. Hal ini juga didukung oleh kembali beroperasinya penerbangan langsung dari Xiamen ke Bali yang memudahkan akses wisatawan.

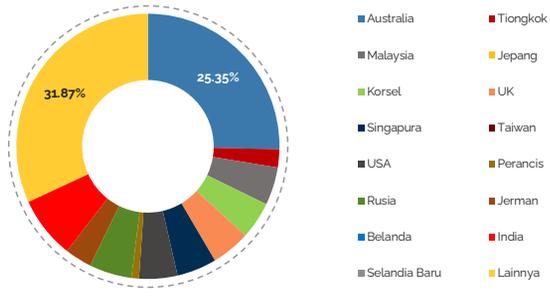
Lebih lanjut, kinerja korporasi juga dipengaruhi oleh kestabilan harga bahan baku dari impor. Pelaku usaha di Bali terpantau masih bergantung cukup tinggi terhadap bahan baku impor. Hal ini tercermin dari persentase impor bahan baku yang mendominasi sebesar 43,41% dari total impor atau senilai 26,56 juta dolar AS pada triwulan I 2023 (Grafik IV.18). Ketergantungan akan bahan baku impor dapat menjadi salah satu sumber kerentanan korporasi di Bali sejalan dengan potensi fluktuasi harga barang secara global yang masih terus berlangsung pasca terjadinya konflik geopolitik Rusia – Ukraina yang masih berlangsung, disertai ketidakpastian dari sisi finansial

Grafik 4.17. Perkembangan Pangsa Impor Barang



Sumber: Kememparekrif (diolah)

Grafik 4.16. Pangsa Wisatawan Mancanegara Bali Tahun 2019



Sumber: Kememparekrif (diolah)

khususnya di Amerika Serikat.

4.2.2. Kondisi Perkembangan Korporasi

Kinerja korporasi di Bali pada triwulan I 2023 terpantau sedikit melambat. Berdasarkan hasil liaison dunia usaha, sebagian besar korporasi mengonfirmasi adanya perlambatan kinerja penjualan domestik maupun ekspor. Kondisi ini tercermin dari nilai skala likert penjualan domestik dan ekspor yang tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik IV.19). Hal ini sejalan dengan perlambatan mayoritas lapangan usaha di Bali dan sesuai pola musiman pasca musim libur nataru.

Sementara itu, kondisi rentabilitas² dan likuiditas korporasi dipersepsikan relatif lebih baik. Berdasarkan hasil SKDU, pangsa korporasi yang menyatakan rentabilitas dan likuiditas yang membaik bertambah. Pangsa korporasi dengan kondisi rentabilitas yang lebih baik meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari 67,44% menjadi 78,46% dari total

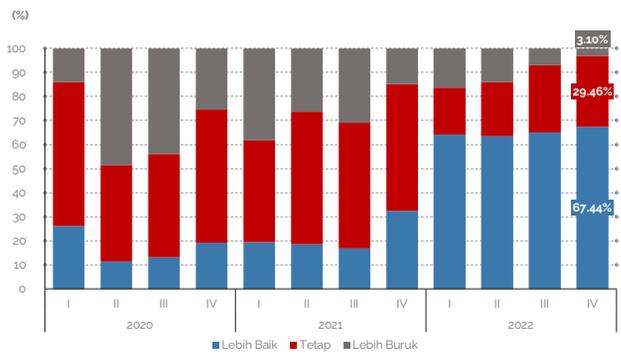
2. Rentabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba.

Grafik 4.18. Perkembangan Skala Likert Penjualan Domestik dan Penjualan Ekspor



Sumber: Bea Cukai (diolah)

Grafik 4.19. Kondisi Rentabilitas Korporasi



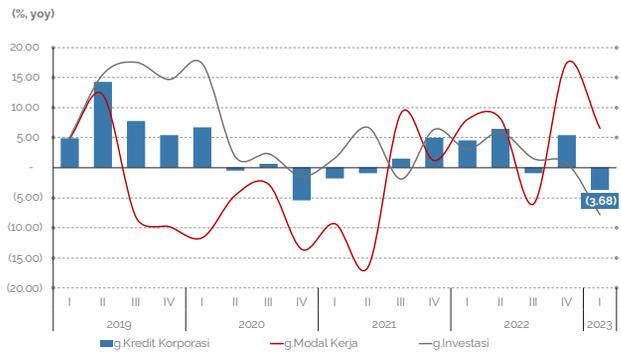
Sumber: Laporan Liaison, Bank Indonesia (diolah)

responden korporasi (Grafik IV.20). Sementara itu, sebanyak 77,69% korporasi di Bali menyatakan kondisi likuiditas pada triwulan I 2023 lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 68,22% (Grafik IV.21).

4.2.3. Penyaluran Kredit Korporasi

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2023 tercatat kontraksi sebesar 3,68% (yoy) turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,43% (yoy) (Grafik IV.22). Dari sisi penggunaan,

Grafik 4.21. Perkembangan Kredit Korporasi



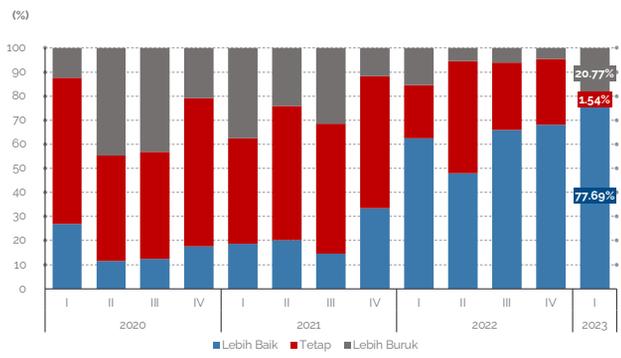
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.22. Perkembangan Kredit Korporasi Sektoral



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.20. Kondisi Likuiditas Korporasi

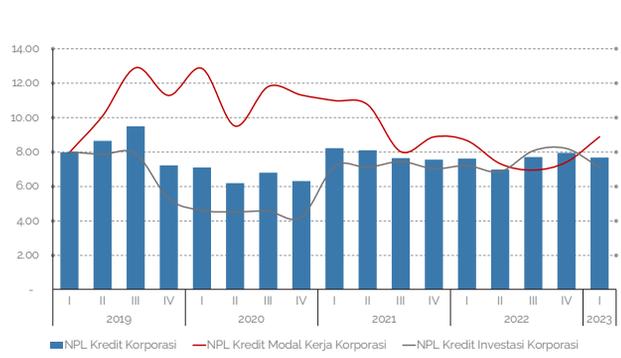


Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia (diolah)

perlambatan penyaluran kredit korporasi terutama bersumber dari perlambatan penyaluran kredit korporasi untuk modal kerja.

Berdasarkan jenis LU, kontraksi pada kredit korporasi terutama bersumber dari LU Konstruksi dan LU Akmamin (Grafik IV.23). Pada triwulan I 2023, kredit korporasi LU Konstruksi tercatat terkontraksi 7,59% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 24,68% (yoy), sementara kredit LU Akmamin mencatatkan kontraksi sebesar 8,87% (yoy), melanjutkan kontraksi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 21,50% (yoy). Perlambatan penyaluran kredit korporasi pada LU Konstruksi dan LU Akmamin disyalir terjadi sejalan dengan telah usainya proyek-proyek pembangunan yang dilakukan untuk mendukung perhelatan event internasional KTT G20 serta pola musiman kunjungan wisatawan yang melambat pasca HBKN Natal dan tahun baru. Lebih lanjut, penyaluran kredit pada LU utama lainnya, seperti LU Perdagangan dan Industri Pengolahan tercatat tumbuh positif pada triwulan laporan.

Grafik 4.23. Perkembangan NPL Kredit Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Meskipun penyaluran kredit pada triwulan I 2023 mengalami perbaikan, risiko penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2023 masih tinggi. NPL kredit korporasi tercatat sebesar 7,69% sedikit membaik dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 7,95% (Grafik IV.24). Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut karena berada di atas *threshold* 5%. Berdasarkan penggunaannya, risiko kredit korporasi triwulan I 2023 bersumber dari NPL pada kredit modal kerja sebesar 8,89% dan NPL kredit investasi sebesar 7,12%.

4.3. KINERJA KEUANGAN RT

4.3.1. Sumber Kerentanan RT

Kerentanan RT berkaitan erat dengan kinerja pariwisata Bali. Besarnya ketergantungan RT kepada kinerja pariwisata tercermin dari besarnya proporsi penduduk yang bekerja pada LU terkait pariwisata (LU Akmamin, LU Perdagangan, dan LU Transportasi). Berdasarkan data BPS pada bulan Februari 2023, jumlah penduduk yang bekerja pada LU terkait pariwisata mencapai 36,48% dari total penduduk yang bekerja di Bali (Grafik IV.25). Oleh sebab itu, tekanan pada kinerja pariwisata akan berdampak pada terganggunya kerentanan RT di Bali.

4.3.2. Kondisi Perkembangan RT

Keyakinan RT terhadap kondisi ekonomi tetap tumbuh positif meski sedikit menurun pada triwulan I 2023. Hasil Survei Konsumen (SK) menunjukkan bahwa pada triwulan I 2023 terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), yang diikuti pula dengan menurunnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) serta indeks

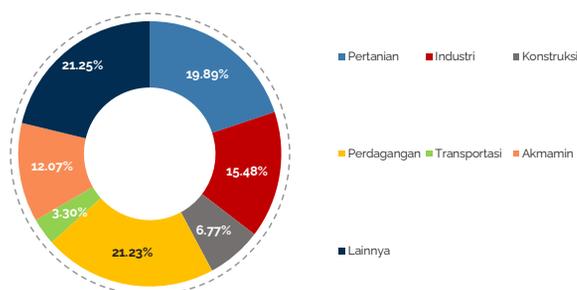
perkiraan kondisi lapangan usaha pada periode yang sama. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.26). Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi RT di Provinsi Bali relatif terjaga, khususnya seiring berlanjutnya stimulus bantuan sosial dari Pemerintah, seperti Program Sembako, Program Keluarga Harapan, dan Program Subsidi Upah bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan sosial Pemerintah juga sangat bermanfaat dalam menjaga kondisi keuangan masyarakat di masa pemulihan pasca pandemi. Meskipun demikian, optimisme RT sedikit tertahan akibat sentimen konflik geopolitik, dampak proteksionisme yang menyebabkan harga-harga komoditas strategis melonjak, serta isu-isu resesi yang turut mendorong perilaku *wait and see*.

4.3.3. Penyaluran Kredit RT

Pertumbuhan penyaluran kredit kepada RT di Bali terus membaik dan tumbuh positif pada triwulan laporan. Pada triwulan I 2023, kredit konsumsi RT masih tercatat tumbuh sebesar 3,85% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 2,57% (yoy) (Grafik IV.27). Membaiknya kredit RT terutama bersumber dari kredit kendaraan bermotor (KKB). Perbaikan penyaluran ini sejalan dengan berbagai pelonggaran kebijakan mobilitas masyarakat, berlanjutnya tren pemulihan ekonomi dan pariwisata, serta didorong beberapa insentif seperti kebijakan pelonggaran uang muka 0% serta penghapusan BBNKB II bagi kendaraan bermotor.

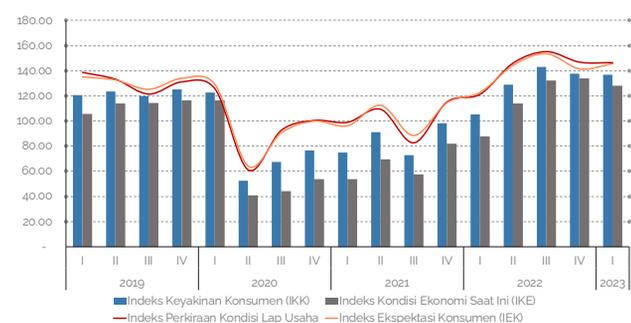
Sejalan dengan tingkat penyaluran kredit yang semakin membaik, kualitas penyaluran kredit juga

Grafik 4.24. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Periode Februari 2023



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.25. Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 4.26. Perkembangan Kredit RT



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia (diolah)

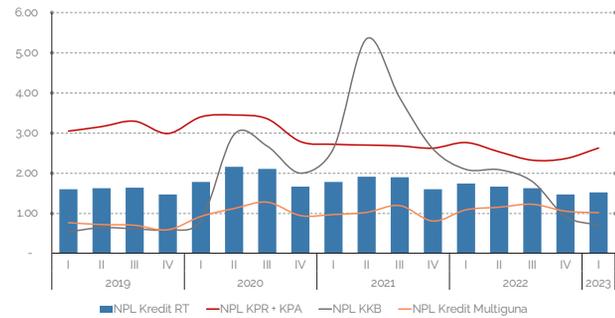
semakin membaik yang tercermin dari penurunan NPL yang senantiasa terjaga di bawah batas/*threshold* 5%.

Pada triwulan I 2023, risiko kredit RT terjaga dengan baik, tercermin dari rasio NPL yang rendah. Rasio NPL pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,52%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 1,47% namun tetap terjaga (Grafik IV.28). Berdasarkan jenis penggunaan, penurunan NPL bersumber dari turunnya NPL untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) sementara NPL KPR & KPA sedikit mengalami peningkatan, menahan perbaikan NPL kredit RT semakin jauh.

4.3.3.1. Penyaluran KPR dan KPA

Penyaluran KPR dan KPA pada triwulan I 2023 terpantau mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kredit KPR dan KPA tercatat mengalami kontraksi sebesar -3,18% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -3,91% (yoy). Berdasarkan jenis kreditnya, hal ini didorong oleh pertumbuhan KPA yang terakselerasi tumbuh positif 27,42% (yoy) dari 19,08% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan KPR juga membaik meski masih mengalami

Grafik 4.27. Perkembangan NPL Kredit RT



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

kontraksi, didorong perbaikan KPR untuk rumah dengan luas di bawah 21 m² dan 21 m² s.d 70 m² (Tabel IV.1).

Secara umum, kualitas penyaluran KPR dan KPA tetap terjaga meskipun NPL sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2023, rasio NPL KPR sedikit meningkat dari 2,36% pada triwulan sebelumnya menjadi 2,62%. Sementara itu, rasio NPL KPA membaik dari 3,39% pada triwulan IV 2022 menjadi 2,65% pada triwulan laporan. Meningkatnya NPL disinyalir terjadi akibat peningkatan suku bunga kredit yang diberikan oleh *developer* sehingga beberapa nasabah sedikit terhambat untuk melaksanakan tanggung jawab pembayaran.

4.3.3.2. Penyaluran KKB dan Kredit Multiguna

Penyaluran KKB pada triwulan I 2023 meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. KKB mampu tumbuh sebesar 33,53% (yoy), meningkat cukup tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 13,25% (yoy) (Tabel IV.3). Membaiknya penyaluran KKB ditopang oleh meningkatnya tingkat penyerapan kredit utamanya

Tabel 4.1. Perkembangan Kredit KPR+KPA

Jenis Kredit	g.Kredit (%.yoy)													Pangsa TW I 2023(%)
	2020				2021				2022				2023	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
KPR	4.93	0.83	-2.64	-2.97	-3.50	-2.94	-2.46	-1.08	-0.58	-6.10	-3.63	-4.06	-3.38	
RT. KPR <21	0.83	-0.32	-1.66	-0.46	-0.91	-3.46	-6.07	-9.48	-9.20	-34.81	-33.19	-32.21	-15.32	4.84
RT. KPR 21 sd 70	11.60	5.69	1.85	1.95	0.83	2.49	2.83	3.72	3.87	3.73	4.02	3.64	6.12	59.45
RT. KPR >70	-0.03	-2.87	-7.00	-8.15	-8.47	-8.95	-8.37	-4.94	-4.41	-15.53	-9.40	-10.28	-14.25	32.60
KPR Ruko/Rukan	-10.29	-13.86	-12.61	-13.08	-10.67	-9.84	-6.46	-12.86	-8.74	-4.96	-10.26	-11.59	-16.92	3.11
KPA	-15.45	-20.92	-16.21	-24.70	-25.31	-19.12	-8.80	-16.08	-13.33	-4.20	-12.80	19.08	27.42	
RT. KPA <21	-18.05	-35.64	-19.41	-52.64	-69.44	-74.14	-78.25	-78.81	-62.37	-52.95	-38.41	10.22	18.96	0.02
RT. KPA 21 sd 70	-15.52	-17.76	-14.13	-19.95	-19.36	-15.70	-7.74	-11.39	-15.51	-16.60	-20.05	4.84	15.95	0.46
RT. KPA >70	-13.87	-17.94	-18.43	-16.35	-13.83	1.54	32.92	-2.31	-0.08	23.19	0.69	44.73	46.09	0.37
KPR+KPA	4.70	0.58	-2.78	-3.19	-3.71	-3.09	-2.52	-1.20	-0.67	-6.08	-3.71	-3.91	-3.18	

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Tabel 4.2. Perkembangan NPL Kredit KPR+KPA

Jenis Kredit	NPL (%)												
	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
KPR	3.28	3.32	3.22	2.71	2.67	2.64	2.64	2.60	2.76	2.53	2.32	2.36	2.62
RT. KPR <21	1.05	0.64	0.56	0.55	0.27	0.51	1.03	2.38	2.93	1.09	0.92	0.45	1.32
RT. KPR 21 sd 70	2.18	2.19	2.15	1.85	1.92	1.75	1.65	1.51	1.40	1.42	1.43	1.51	2.18
RT. KPR >70	4.93	5.14	5.09	4.19	4.03	4.15	4.35	4.24	4.66	4.54	3.99	4.00	3.69
KPR Ruko/Rukan	3.61	3.34	2.71	2.70	2.96	3.37	2.50	2.38	3.37	3.36	2.28	2.48	2.02
KPA	16.33	17.47	17.27	13.37	9.90	10.97	7.51	6.05	4.27	2.85	3.28	3.39	2.65
RT. KPA <21	27.97	31.39	26.34	46.85	20.39	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43	8.25
RT. KPA 21 sd 70	20.62	21.70	21.75	12.99	13.13	14.98	12.11	8.00	5.23	3.50	4.35	4.13	2.84
RT. KPA >70	1.65	1.77	1.88	1.92	1.92	3.24	1.41	3.11	3.05	2.24	2.22	2.15	2.09
KPR+KPA	3.40	3.45	3.35	2.79	2.72	2.70	2.68	2.63	2.77	2.53	2.33	2.37	2.62

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Tabel 4.3. Perkembangan Kredit KKB dan Kredit Multiguna

Jenis Kredit	g.Kredit (%yoy)																2023	Pangsa TW I 2023 (%)
	2019				2020				2021				2022					
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
KKB	13.56	10.55	7.37	8.23	9.18	-2.06	-13.06	-25.48	-37.74	-39.62	-43.67	-37.45	-31.18	-22.30	-1.53	13.25	33.53	
Mobil	9.88	3.94	1.84	5.28	4.95	-2.15	-13.09	-25.30	-35.82	-37.98	-42.17	-35.99	-29.81	-20.23	-2.12	17.16	38.39	94.19
Sepeda Motor	57.17	88.43	94.57	44.61	28.10	-11.35	-31.76	-42.57	-55.79	-57.42	-57.58	-54.92	-49.98	-45.93	-40.07	-27.35	-9.89	3.18
Truk	-35.56	208.84	-20.84	8.66	24.85	-68.72	22.02	15.16	-23.49	-29.44	-22.96	-43.35	6.75	10.00	621.84	168.71	79.47	0.99
Lainnya	163.16	91.62	45.96	14.46	126.50	90.50	84.48	39.00	-39.37	-38.59	-52.16	-37.67	-35.66	-37.72	-22.91	-41.91	-40.31	1.64
RT Multiguna	3.00	5.99	6.40	8.36	10.10	7.09	18.94	14.62	0.50	-1.58	-13.41	-14.56	-3.54	0.19	0.91	2.96	2.55	

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Tabel 4.4. Perkembangan NPL Kredit KKB dan Kredit Multiguna

Jenis Kredit	NPL (%)																
	2019				2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I												
KKB	0.54	0.64	0.61	0.59	0.81	2.96	2.67	2.00	2.62	5.35	3.88	2.61	2.09	2.09	1.79	0.92	0.70
Mobil	0.48	0.53	0.52	0.50	0.71	2.95	2.41	1.90	2.67	5.70	3.93	2.66	2.06	2.00	1.47	0.80	0.63
Sepeda Motor	0.66	0.73	0.70	0.72	1.05	3.15	4.70	3.03	2.32	2.41	2.83	2.24	2.56	2.83	2.50	2.23	1.90
Truk	1.84	2.66	7.00	6.26	4.85	4.85	5.62	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00
Lainnya	2.42	3.70	3.69	2.88	1.97	2.62	4.39	2.13	2.10	2.71	5.05	2.24	2.63	4.02	13.77	5.05	2.84
RT Multiguna	0.77	0.72	0.71	0.60	0.93	1.12	1.28	0.95	0.98	1.03	1.20	0.81	1.09	1.16	1.23	1.23	1.02

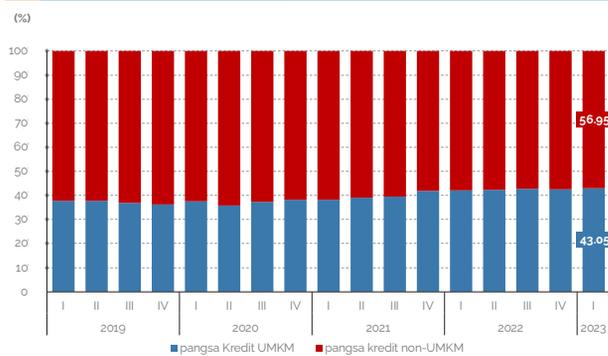
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

untuk tipe kendaraan mobil dan truk. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tetap baik mengindikasikan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung. Ke depan, semakin meningkatnya mobilitas masyarakat dan tren peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara diperkirakan akan terus mendorong peningkatan permintaan masyarakat atas kendaraan bermotor.

Peningkatan penyaluran KKB diikuti pula dengan membaiknya kualitas KKB dibandingkan triwulan sebelumnya dan terjaga di bawah *threshold* 5%. Pada triwulan I 2023, NPL KKB tercatat sebesar 0,70%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

tercatat 0,92% (Tabel IV.4). Secara lebih detail, terlihat bahwa perbaikan kualitas KKB didorong oleh perbaikan kualitas kredit untuk seluruh kategori kendaraan, terutama kredit truk dengan NPL 0,00%.

Lebih lanjut, pertumbuhan kredit multiguna tercatat sedikit melambat dengan risiko kredit tetap stabil dan terjaga di bawah *threshold* 5%. Kredit multiguna tumbuh 2,55% (yoy) pada triwulan I 2023 sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,96% (yoy). Sementara itu, rasio NPL kredit multiguna membaik dari 1,23% menjadi 1,02% mengindikasikan kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga.

Grafik 4.28. Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

4.4. AKSES KEUANGAN DAN UMKM

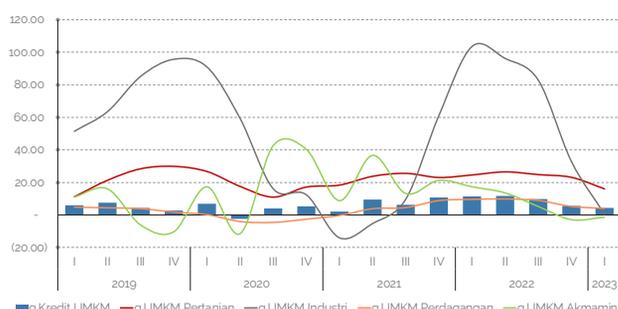
Eksposur perbankan terhadap UMKM pada triwulan I 2023 terkonfirmasi meningkat. Pada triwulan I 2023, pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Bali tercatat sebesar 43,05%, meningkat terbatas dari triwulan sebelumnya yang tercatat 42,56% (Grafik IV.29). Pangsa penyaluran kredit UMKM tetap terjaga dan secara agregat telah memenuhi standar kewajiban pemberian kredit/pembiayaan UMKM yang diatur oleh Bank Indonesia³.

Penyaluran kredit kepada UMKM tumbuh positif namun meskipun mengalami perlambatan pada triwulan I 2023. Kredit UMKM tumbuh sebesar 4,29% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,63% (yoy) (Grafik IV.30). Pertumbuhan positif penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bali didorong oleh pertumbuhan positif pada hampir semua LU utama (LU Pertanian, LU Akمامin, LU Perdagangan), sementara penyaluran kredit UMKM LU Industri Pengolahan mengalami perlambatan yang

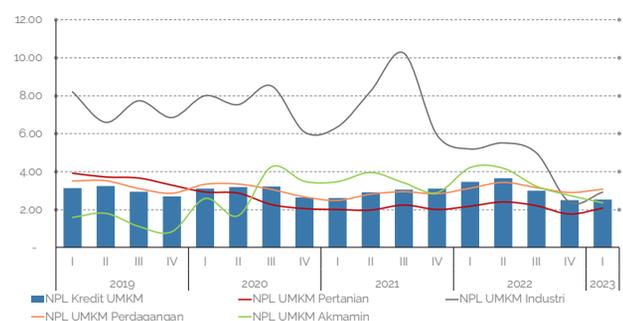
cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya.

NPL kredit UMKM masih tetap terjaga di bawah threshold 5%. NPL kredit UMKM pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 2,53%, tetap baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,51% (Grafik IV.31). Terjaganya risiko kredit UMKM di tengah peningkatan kinerja UMKM menjadi indikator semakin pulihnya kinerja UMKM seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan peningkatan kegiatan pariwisata Bali. Sejumlah sinergi kebijakan positif antara Pemerintah dan Bank Indonesia turut memberikan dampak positif terhadap kualitas kredit UMKM di Provinsi Bali. Adapun kebijakan restrukturisasi kredit UMKM yang dikeluarkan Pemerintah Bersama OJK dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19 juga terbukti mampu menahan laju peningkatan NPL kredit UMKM.

Secara spasial, kredit UMKM terbesar masih terkonsentrasi di Kota Denpasar, Badung, dan Gianyar (Tabel IV.5). Penyaluran kredit terutama dilakukan di 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Denpasar dengan pangsa 28,14%, Kabupaten Badung dengan pangsa 16,41%, dan Kabupaten Gianyar dengan pangsa 12,53% (Tabel IV.6). Tingginya penyaluran kredit pada daerah tersebut berkaitan erat dengan sentralisasi pusat destinasi wisata yang berada pada ketiga kab/kota tersebut. Secara agregat, NPL kredit UMKM di seluruh kabupaten/kota terjaga di bawah level 5%, dengan NPL terendah di Kabupaten Gianyar sebesar 0,65% dan tertinggi di Kabupaten Klungkung sebesar 4,18% (Tabel IV.7).

Grafik 4.29. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.30. Perkembangan NPL Kredit UMKM Sektoral

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

3. Berdasarkan PBI No.17/12/PBI/2015 disampaikan bahwa kredit/pembiayaan UMKM minimal 20% dari total penyaluran kredit.

Tabel 4.5. Perkembangan Nominal Kredit UMKM Spasial

Kab./Kota	Nominal (Triliun)												
	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kota Denpasar	12,38	12,17	12,48	12,51	12,60	12,56	12,55	12,85	12,85	12,97	12,86	12,93	13,04
Kab. Badung	6,73	6,55	6,57	6,64	6,64	6,76	6,68	7,04	7,44	7,54	7,56	7,54	7,60
Kab. Gianyar	4,78	4,66	4,60	4,57	4,71	4,76	5,05	5,48	5,61	5,65	5,71	5,79	5,81
Kab. Buleleng	4,21	4,10	4,10	4,24	4,37	4,70	4,81	4,96	5,04	5,18	5,23	5,24	5,32
Kab. Tabanan	3,68	3,63	3,77	3,95	4,04	4,16	4,33	4,45	4,48	4,65	4,65	4,73	4,75
Kab. Jembrana	2,00	1,99	2,05	2,11	2,14	2,21	2,27	2,45	2,56	2,75	2,80	2,86	2,89
Kab. Karangasem	2,18	2,14	2,17	2,11	2,12	2,17	2,27	2,49	2,48	2,58	2,65	2,69	2,70
Kab. Bangli	1,56	1,54	1,57	1,63	1,67	1,72	1,79	1,87	1,91	1,96	1,99	2,03	2,04
Kab. Klungkung	1,58	1,52	1,61	1,60	1,60	1,65	1,76	1,96	2,06	2,11	2,16	2,19	2,19
Total UMKM	39,09	38,32	39,02	39,36	39,90	40,69	41,50	43,55	44,427	45,40	45,61	46,00	46,33

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Tabel 4.6. Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Spasial

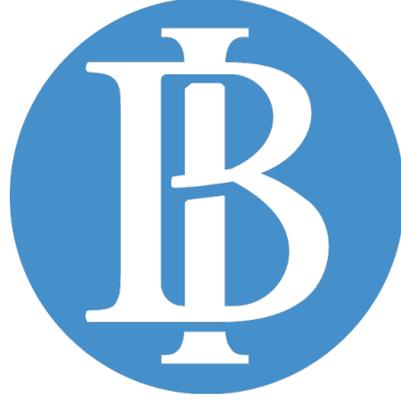
Kab./Kota	Pangsa (%)												
	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kota Denpasar	31,66	31,76	0,00	31,78	31,58	30,87	30,25	29,50	28,93	28,56	28,19	28,11	28,34
Kab. Badung	17,21	17,10	0,00	16,88	16,65	16,60	16,08	16,16	16,74	16,62	16,58	16,39	16,53
Kab. Gianyar	12,22	12,17	0,00	11,61	11,81	11,70	12,16	12,58	12,62	12,45	12,53	12,59	12,62
Kab. Buleleng	10,76	10,71	0,00	10,78	10,95	11,56	11,60	11,38	11,33	11,41	11,46	11,39	11,56
Kab. Tabanan	9,42	9,48	0,00	10,02	10,13	10,22	10,44	10,22	10,08	10,24	10,21	10,28	10,32
Kab. Jembrana	5,12	5,20	0,00	5,37	5,37	5,44	5,46	5,63	5,77	6,07	6,13	6,23	6,28
Kab. Karangasem	5,57	5,57	0,00	5,35	5,31	5,33	5,46	5,73	5,58	5,69	5,81	5,85	5,88
Kab. Bangli	4,00	4,03	0,00	4,15	4,19	4,24	4,32	4,30	4,30	4,32	4,36	4,41	4,44
Kab. Klungkung	4,05	3,97	0,00	4,05	4,02	4,05	4,23	4,51	4,64	4,66	4,73	4,77	4,75
Total UMKM	100,00	100,72											

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Tabel 4.7. Perkembangan NPL Kredit UMKM Spasial

Kab./Kota	NPL (%)												
	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kota Denpasar	2,93	3,57	3,38	2,64	2,35	3,29	3,78	3,37	3,57	3,86	3,59	2,88	3,25
Kab. Badung	4,07	4,12	3,79	2,84	3,44	3,29	2,84	4,51	5,85	6,02	3,10	2,51	1,59
Kab. Gianyar	1,40	1,90	1,22	0,85	0,73	1,38	1,36	1,37	1,26	1,04	0,85	0,65	0,69
Kab. Buleleng	6,13	5,91	5,07	4,28	4,10	4,13	4,05	4,29	4,49	4,76	4,48	4,04	3,73
Kab. Tabanan	1,96	1,92	1,71	1,46	1,71	1,45	1,87	1,60	1,64	2,04	1,96	1,70	1,89
Kab. Karangasem	3,47	4,29	4,16	5,07	4,62	4,75	4,86	1,19	1,75	2,41	4,47	3,75	4,12
Kab. Jembrana	2,30	2,18	1,84	1,34	1,17	1,21	1,45	4,51	4,81	4,70	2,01	1,59	2,16
Kab. Bangli	2,28	2,17	2,06	1,63	1,33	0,94	1,52	1,35	1,13	1,09	1,32	1,12	1,67
Kab. Klungkung	1,21	1,19	5,33	5,08	5,20	4,96	4,79	4,10	4,17	4,49	4,32	4,18	4,33
Total UMKM	3,10	3,37	3,20	2,64	2,60	2,91	3,04	3,12	3,46	3,65	2,99	2,51	2,54

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)



BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

- Transaksi sistem pembayaran tunai di Provinsi Bali menunjukkan aliran uang kartal perbankan pada posisi inflow ke Bank Indonesia. Selanjutnya, transaksi sistem pembayaran non tunai di Provinsi Bali yakni RTGS, SKNBI, Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit dan Uang Elektronik melanjutkan tren pertumbuhan sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi Provinsi Bali hingga triwulan I 2023.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai dengan berbagai program strategis, mulai dari inovasi layanan kas untuk penyetoran dan penukaran uang, hingga sosialisasi dan experience user QRIS di berbagai kegiatan.



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tantular
No. 4, Denpasar

Mei

2023

Transaksi pembayaran di Provinsi Bali melanjutkan tren peningkatan sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi Provinsi Bali hingga triwulan I 2023. Transaksi sistem pembayaran nilai besar seperti RTGS dan SKNBI, maupun sistem pembayaran nilai kecil/ritel seperti kartu ATM/Debit, kartu kredit, dan uang elektronik tercatat mengalami peningkatan. Selain itu, tren peningkatan pada media transaksi nontunai mengonfirmasi berlanjutnya tren transaksi cashless di masyarakat seiring dengan pulihnya kinerja perekonomian dan daya beli masyarakat pasca pandemi Covid-19. Sementara itu, aliran uang kartal perbankan menunjukkan posisi inflow, terutama disebabkan oleh normalisasi permintaan masyarakat pasca berakhirnya momen HBKN Natal dan tahun baru, serta pelaksanaan MICE event KTT G20.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai. Upaya yang dilakukan untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran tersebut antara lain dengan program "Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI)" dan program "QRIS in One Island" yang melibatkan berbagai stakeholder dan komunitas masyarakat.

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DI PROVINSI BALI

Aliran uang kartal perbankan di Provinsi Bali pada triwulan I 2023 menunjukkan posisi *net inflow*¹. Sesuai dengan pola historisnya, pasca mengalami *net outflow* pada triwulan IV 2022, aliran uang kartal pada triwulan laporan tercatat mengalami *net inflow* sebesar Rp1,80 triliun. Perkembangan *net inflow* tersebut mengindikasikan terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi pada triwulan laporan.

Posisi *net inflow* pada triwulan I 2023 terjadi seiring dengan adanya normalisasi permintaan uang kartal untuk pemenuhan kebutuhan aktivitas perdagangan dan konsumsi, pasca berakhirnya perayaan HBKN Natal dan tahun baru yang mendorong naiknya jumlah kunjungan wisatawan pada triwulan IV 2022. Lebih lanjut, terjadinya *net inflow* ditengarai juga disebabkan oleh berakhirnya pelaksanaan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Secara lebih rinci, aliran uang keluar (*outflow*) tercatat sebesar Rp2,26 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar Rp4,21 triliun. Sementara itu, pada aliran uang masuk (*inflow*) terjadi peningkatan dari Rp1,57 triliun pada triwulan IV 2022 menjadi Rp4,06 triliun pada triwulan laporan (Grafik 5.1).

1. *Net inflow* merupakan kondisi di mana aliran uang yang masuk ke kas Bank Indonesia lebih besar dibanding uang yang keluar dari kas Bank Indonesia.

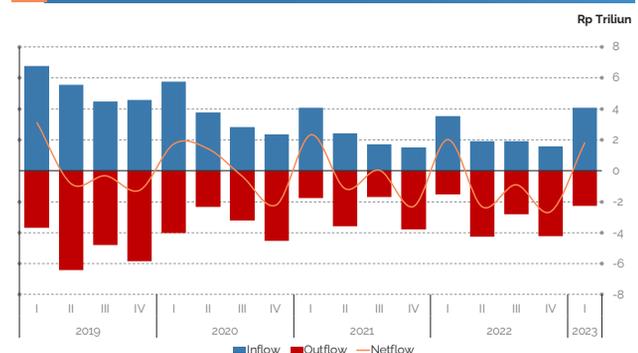
5.2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DI PROVINSI BALI

5.2.1. Sistem Pembayaran Bank Indonesia

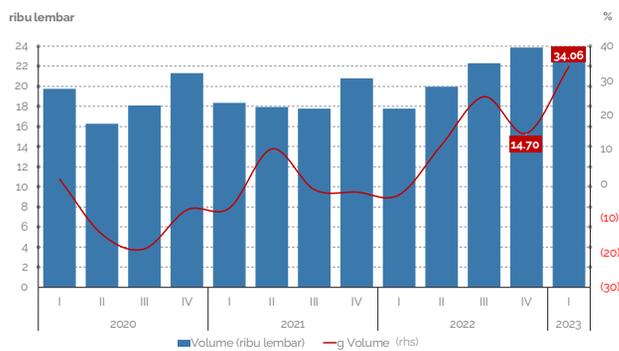
Transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*² di Provinsi Bali mengalami akselerasi pertumbuhan baik dari sisi volume maupun nilai transaksi. Dari sisi volume, transaksi BI-RTGS tumbuh sebesar 49,17% (yoy) pada triwulan I 2023, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,70% (yoy). Sedangkan dari sisi nominal, transaksi BI-RTGS tumbuh sebesar 34,06% (yoy) pada triwulan I 2023, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,07% (yoy). Peningkatan volume transaksi melalui BI-RTGS diperkirakan terjadi seiring dengan berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Provinsi

2. BI-RTGS merupakan infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. BI-RTGS digunakan untuk transfer dana dalam jumlah besar (>Rp100 juta).

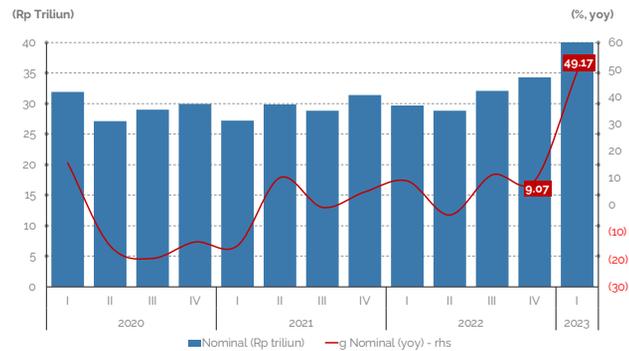
Grafik 5.1. Aliran Uang Kartal di Provinsi Bali



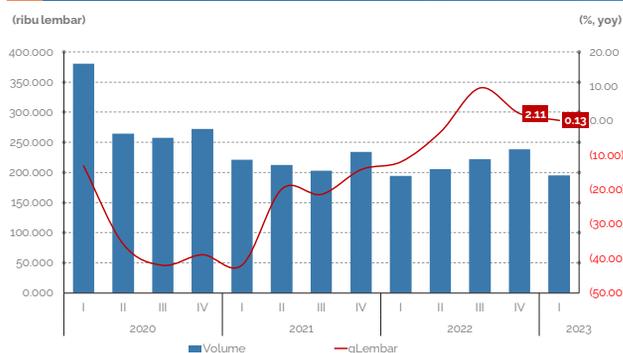
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2. Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Bali


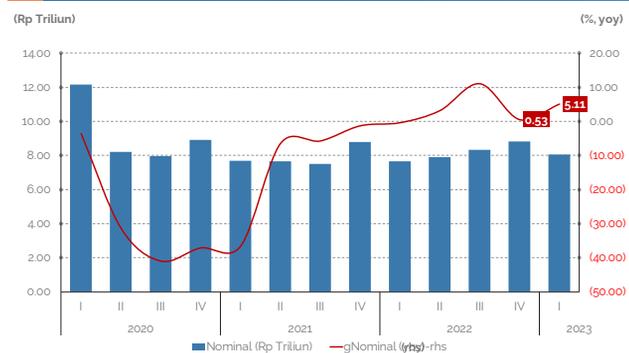
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Bali


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.4. Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Bali


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Bali


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Bali, di mana aktivitas mobilisasi penduduk maupun wisatawan sangat berkaitan dengan perputaran transaksi uang di Bali.

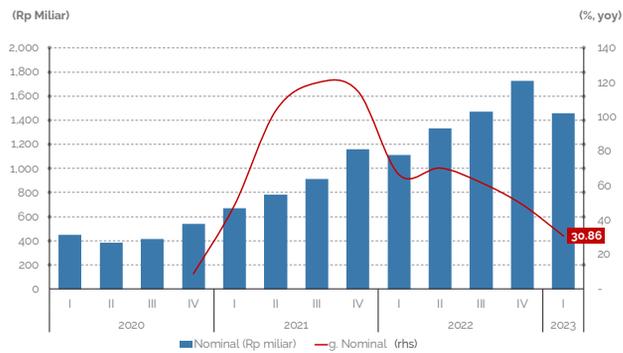
Nilai transaksi nontunai secara kliring melalui SKNBI³ di Provinsi Bali juga menunjukkan akselerasi pertumbuhan. Pertumbuhan nominal transaksi SKNBI tercatat mengalami peningkatan dari 0,53% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 5,11% (yoy) pada triwulan laporan, meski volume transaksi tumbuh melambat dari 2,11% (yoy) menjadi 0,13% (yoy). Pertumbuhan transaksi SKNBI yang tetap kuat sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, disertai peningkatan optimisme dan daya beli masyarakat Bali. Meskipun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi tersyalir tertahan seiring dengan hadirnya metode transaksi menggunakan BI-Fast maupun melalui QRIS.

3. SKNBI merupakan infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai sarana transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik (DKE) pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.

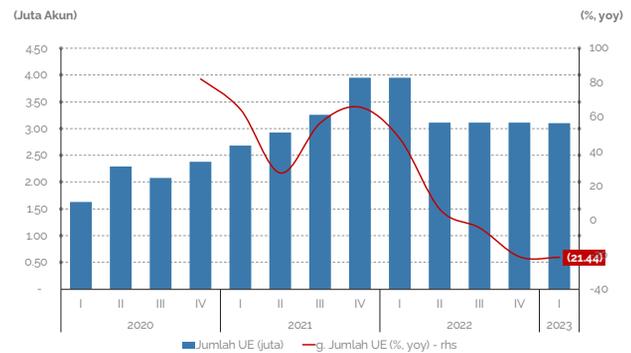
⁴ Sebagaimana Inmendagri No. 66 Tahun 2021.

5.2.2. Sistem Pembayaran Retail

Pada triwulan I 2023, pertumbuhan tahunan transaksi kartu ATM/Debit mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, di tengah akselerasi transaksi kartu kredit. Nominal transaksi kartu ATM/Debit triwulan I 2023 tercatat tumbuh sebesar 19,41% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang meningkat sebesar 115,51% (yoy). Melandainya pertumbuhan pada transaksi kartu ATM/Debit tersebut ditengarai oleh efek tahun dasar (*base effect*) pada tahun 2022, di mana transaksi kartu ATM/Debit telah mulai mengalami normalisasi pasca membaiknya kondisi pandemi Covid-19. Di sisi lain, transaksi kartu kredit tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 20,58% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -10,46% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, maka secara keseluruhan transaksi nontunai menggunakan kartu di Bali tercatat mengalami peningkatan. Meningkatnya transaksi nontunai menggunakan kartu didorong oleh terus berlanjutnya tren pemulihan daya beli masyarakat serta

Grafik 5.10. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik (UE) di Bali


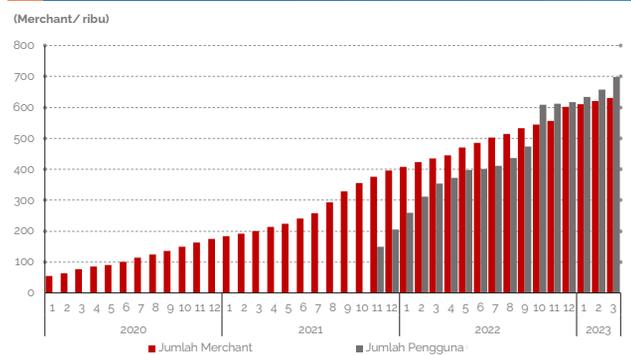
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.11. Perkembangan Jumlah Uang Elektronik (UE) di Bali


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.12. Perkembangan Transaksi QRIS di Bali


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13. Perkembangan Jumlah Merchant dan Pengguna QRIS di Bali


Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.2.3. Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTDBB)

Pada triwulan I 2022, nilai transaksi transfer dana domestik mengalami *net outgoing*, sedangkan transaksi transfer dana internasional mengalami *net incoming*⁴. Untuk transfer dana domestik, nominal transfer dana yang masuk ke Bali pada triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp262,47 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp366,43 miliar. Penurunan juga terjadi pada transaksi transfer dana *outgoing* dari Bali yang tercatat menurun dari Rp875,62 miliar pada triwulan IV 2022 menjadi Rp775,36 miliar pada triwulan laporan. Lebih lanjut, ditinjau dari sisi transfer dana internasional, nominal transaksi *incoming* dari luar negeri yang masuk ke Provinsi Bali tercatat sebesar Rp577,56 miliar pada triwulan laporan, meningkat dari triwulan sebelumnya yang mencapai Rp536,70 miliar.

Berlawanan dengan transaksi *incoming*, transaksi *outgoing* ke luar negeri dari Provinsi Bali tercatat menurun dari

Rp301,53 miliar pada triwulan IV 2022 menjadi Rp110,89 miliar pada triwulan laporan. Penurunan aktivitas transfer dana bukan bank disinyalir turut dipengaruhi oleh adanya *shifting* ke penggunaan transaksi pembayaran digital seiring dengan perluasan implementasi QRIS lintas negara (*cross border*) dengan Thailand dan Malaysia yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Selain itu, Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya dirumahkan selama pandemi Covid-19 juga sebagian telah kembali bekerja di luar negeri, sehingga mendorong peningkatan transfer dana internasional masuk ke Bali. Adapun data transaksi oleh PTDBB di Provinsi Bali sepanjang tahun 2020-2023 ditunjukkan pada Tabel 5.1.

5.3.

4. *Net outgoing*: transfer dana keluar Provinsi Bali menuju provinsi/negara lainnya lebih tinggi, *net incoming*: transfer dana ke dalam Provinsi Bali dari provinsi/negara lainnya lebih tinggi.

Tabel 5.1. Aktivitas transaksi domestik dan internasional pada PTDBB di Provinsi Bali pada tahun 2020-2022

Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Domestik (Rp Miliar)			Internasional (Rp Miliar)			
	Incoming	Outgoing	Net	Incoming	Outgoing	Net	
2020	TW I	40.44	97.04	-56.60	592.27	47.33	544.95
	TW II	39.92	89.03	-49.11	403.28	23.89	379.40
	TW III	54.09	89.70	-35.61	442.29	28.78	413.51
	TW IV	74.65	159.58	-84.92	413.55	25.34	388.20
2021	TW I	109.38	214.74	-105.35	391.92	26.59	365.33
	TW II	118.03	215.43	-97.41	387.47	49.30	338.18
	TW III	149.44	365.74	-216.30	467.75	36.22	431.53
	TW IV	124.73	508.12	-383.39	510.54	48.07	462.47
2022	TW I	124.79	559.88	-435.09	528.33	52.68	475.65
	TW II	323.74	806.41	-482.67	593.96	62.91	531.05
	TW III	663.55	1195.00	-531.45	596.96	372.53	224.42
	TW IV	366.43	875.62	-509.19	536.70	301.91	234.79

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

5.4. PERKEMBANGAN TRANSAKSI KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB) DI BALI

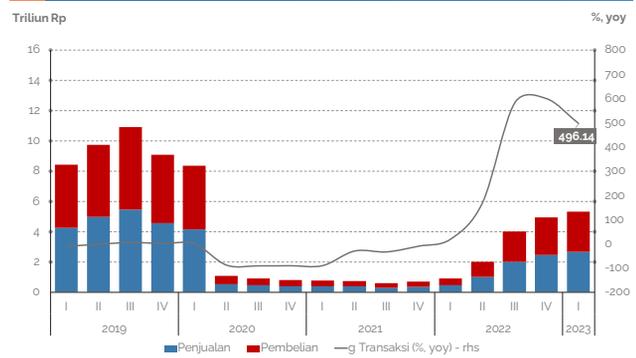
Aktivitas transaksi valuta asing di Provinsi Bali terus tumbuh tinggi pada triwulan I 2023 seiring dengan normalisasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali. Transaksi KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp 2,65 triliun dari sisi penjualan, serta Rp2,68 triliun dari sisi pembelian, dengan total transaksi mencapai Rp5,33 triliun. Secara tahunan, pertumbuhan nilai transaksi valas di Provinsi Bali pada triwulan I 2023 sebesar 496,14% (yoy), tumbuh tinggi meski melandai dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 598,85% (yoy) (Grafik 5.12). Peningkatan signifikan transaksi valas pada KUPVA BB berkorelasi positif dengan pemulihan kedatangan wisatawan mancanegara. Ke depannya dapat diproyeksikan bahwa pertumbuhan transaksi KUPVA BB akan terus berlanjut, terutama didukung prospek tingginya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke depan.

5.5. UPAYA DALAM MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

5.5.1. Sistem Pembayaran Tunai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mendukung ketersediaan uang beredar di masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi masyarakat Bali. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali senantiasa menjaga ketersediaan likuiditas di masyarakat dengan cara menyediakan layanan setoran dan pembayaran

Grafik 5.14. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Bali



Sumber: Bank Indonesia, diolah

perbankan, penukaran uang, serta pelaksanaan remise secara rutin. Selain itu, sebagai strategi menjaga ketersediaan Uang Rupiah di masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2023, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan program "Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI)" dari tanggal 27 Maret hingga 18 April 2023. Melalui program SERAMBI, layanan penukaran tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia melalui mobil kas keliling di pusat keramaian, namun juga melalui kerja sama dengan 11 bank untuk membuka layanan penukaran di 206 titik kantor cabang perbankan seluruh Bali.

Dalam rangka perluasan dan pengembangan edukasi Rupiah dengan berfokus pada peningkatan kecintaan, kebanggaan dan pemahaman terhadap Rupiah secara masif, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali aktif melaksanakan kegiatan kampanye edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah kepada masyarakat di wilayah Bali dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi

bersama *stakeholders*. Selama periode laporan, kegiatan edukasi secara tatap muka telah dilaksanakan sebanyak 29 kali kepada lebih dari 22 ribu orang yang dilakukan di pasar, banjar-banjar, sekolah, komunitas masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan perbankan dan Pemerintah Daerah dalam setiap *event* seni budaya. Selain kegiatan secara tatap muka, Bank Indonesia juga telah melakukan sosialisasi melalui media sosial dan telah bekerjasama dengan asosiasi pusat perbelanjaan di Bali.

5.5.2. Sistem Pembayaran Nontunai

Secara garis besar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mendorong perluasan sistem pembayaran transaksi nontunai melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan transaksi Pemerintah Daerah dan pendekatan sistem pembayaran ritel. Pada transaksi Pemerintah Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali tergabung ke dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten/ Kota dan Provinsi Bali. Melalui TP2DD, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bertugas untuk melakukan asesmen digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah di Bali, dan berkoordinasi secara aktif untuk meningkatkan transaksi pembayaran nontunai pada penerimaan dan belanja daerah. Adapun kegiatan TP2DD pada triwulan I 2023 antara lain meliputi:

1. High Level Meeting (HLM) TP2DD Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Pj. Bupati Buleleng. Pada HLM tersebut, kegiatan TP2DD dirangkaikan dengan kegiatan digitalisasi kawasan Pantai Penimbangan Buleleng dan pasar murah berbasis QRIS.
2. *Launching* Pos Gate MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) Kabupaten Karangasem yang dipimpin oleh Bupati Karangasem. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka digitalisasi pengawasan Pajak MBLB Karangasem.
3. *Launching* e-Parkir dan Buleleng *Card* yang dipimpin oleh Pj Bupati Buleleng dalam rangka HUT Kota Singaraja ke-419. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari HLM TP2DD

Kabupaten Buleleng untuk mendigitalisasikan retribusi parkir tepi jalan umum.

4. *High Level Meeting* (HLM) TP2DD Kabupaten Tabanan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Tabanan. HLM ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan program kerja digitalisasi retribusi parkir di Tabanan.

Pada sistem pembayaran ritel, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyusun 3 (tiga) strategi besar, yaitu:

1. Program “QRIS *in One Island*” yang bertujuan untuk memperluas cakupan penggunaan QRIS di seluruh wilayah Bali. Program ini meliputi sosialisasi & edukasi, *showcase* transaksi QRIS, *on-boarding* pengguna & *merchant* QRIS, dan pelaksanaan kegiatan lainnya. Strategi penyelenggaraan *flagship* program “Bali *Digital Innovation Festival* (BALIGIVATION) 2023” menjadi salah satu implementasi dari strategi tersebut.
2. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung program elektronifikasi transportasi daerah guna meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat untuk menggunakan kanal pembayaran nontunai yang direncanakan dilakukan pada moda transportasi massal (contoh bis) di Bali.
3. Kolaborasi dan sinergi dengan kegiatan bersama komunitas lokal juga turut meningkatkan jangkauan elemen masyarakat di Bali. Pada triwulan I 2023, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali telah berkolaborasi dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menyelenggarakan Festival Imlek bersama, berkolaborasi dengan Yowana Desa Belega menyelenggarakan Festival Bala Aga dan memeriahkan Festival Ogoh-ogoh dengan menampilkan Ogoh-ogoh CBP dan QRIS pada malam pengrupukan.



Mei 2023

BOKS 3

**Implementasi Deklarasi G20 2022 Bali:
Transisi Menuju Transisi Energi
Berkelanjutan, Transformasi Digital, dan
Arsitektur Kesehatan Global di Provinsi Bali**

Dalam mengatasi tantangan global yang mendesak, deklarasi G20 pada November 2022 di Bali menekankan terhadap isu transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global. Pada tanggal 28 Februari 2023, Provinsi Bali secara resmi menerbitkan Pedoman Teknis untuk Bangunan Gedung Hijau melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 879 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau dalam Rangka Implementasi Bali. Pedoman Teknis ini merupakan bagian penting dari implementasi Peraturan Gubernur (PerGub) Bali No. 45/2019 tentang Bali Energi Bersih yang mewajibkan adanya upaya konservasi energi melalui pengembangan bangunan hijau dengan tujuan mencapai bangunan berenergi nol (*zero energy building*). Dalam rangka mewujudkan mandat tersebut, pedoman ini memberikan panduan bagi penyelenggaraan bangunan gedung untuk mencapai efisiensi energi listrik dan penggunaan sumber daya air. Selain itu, pedoman ini juga mendorong penggunaan energi terbarukan dengan menerapkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada bangunan gedung. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pembangunan gedung di Provinsi Bali dapat lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta berkontribusi dalam mencapai tujuan Bali sebagai provinsi yang berfokus pada energi bersih dan berkelanjutan.

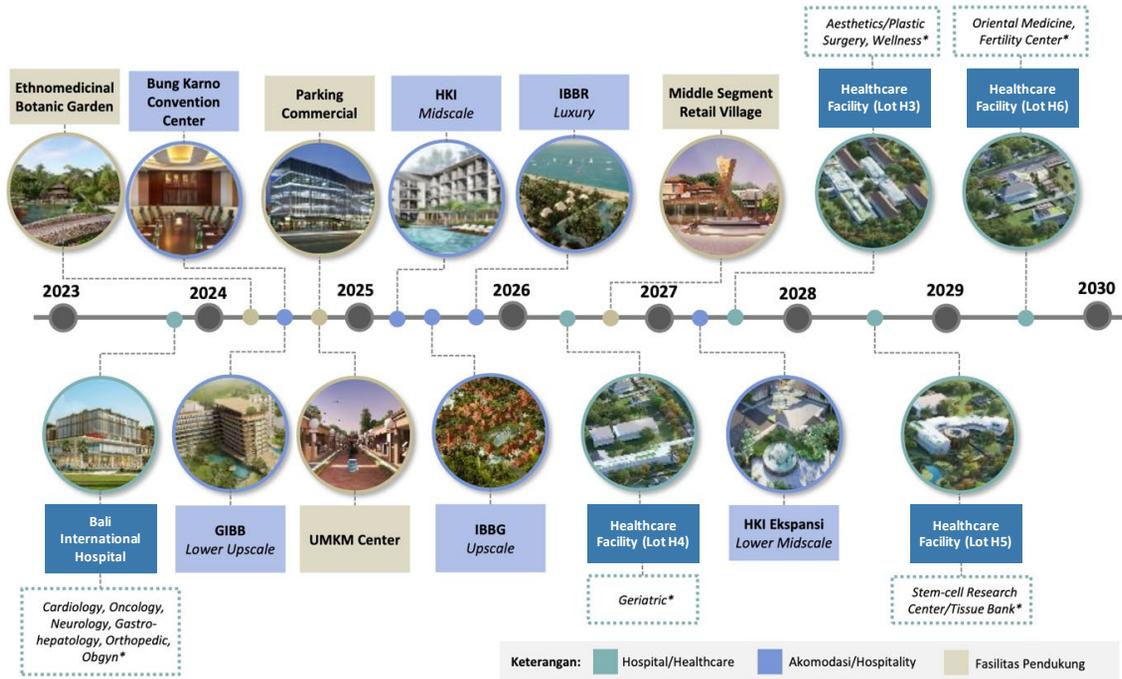
Pada Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Gubernur Bali menghadiri pertemuan dengan salah satu agensi Amerika Serikat yang berfokus pada pembangunan internasional. Diplomasi ini menghasilkan beberapa poin penting terkait dengan program Sinar yang dilaksanakan oleh agensi tersebut di Bali dan Indonesia. Relevansi program Sinar yang bertujuan mendorong penggunaan energi bersih dengan berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) diharapkan mampu bersinergi dengan program yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Pertemuan

ini juga memperkuat upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal senada juga disampaikan oleh pihak *World Bank Group*, yang berfokus dalam upaya mempercepat proses konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Selain itu pertemuan ini juga berupaya untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam sektor transportasi di Bali.

Komitmen Gubernur Bali dalam mendorong transisi energi berkelanjutan juga ditunjukkan dengan adanya diplomasi lanjutan dengan pihak Bloomberg Philanthropies pada 16 Maret 2023. Dalam pertemuan ini, terjadi komitmen untuk mendukung pencapaian *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2045 dengan melibatkan pelaku bisnis internasional dalam mendukung pembiayaan program Gubernur Bali terhadap implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dan kendaraan listrik berbasis baterai.

Implementasi dalam transformasi digital didorong oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan ditetapkannya peraturan Gubernur Bali No 24 Tahun 2021 mengenai sistem penyusunan produk hukum berbasis wilayah dengan digitalisasi. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fasilitasi berbasis digitalisasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) dan Rancangan Peraturan (Ranper) DPRD Kabupaten/Kota, untuk mewujudkan tertib administrasi, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyusunan produk hukum. Sistem pemerintahan digital juga terus didorong oleh Pemerintah Provinsi Bali, sejalan dengan upaya optimalisasi P3DN untuk mendorong penyedia produk lokal yang dimuat dalam E-Katalog. Upaya ini memberikan dampak terhadap UMKM lokal agar terlibat dalam pengadaan yang mayoritas di etalase sektor barang dan jasa. Per bulan Februari 2023, perkembangan belanja melalui katalog

Grafik Boks II.1 Liniwaktu Pembangunan KEK Kesehatan Sanur



Sumber: FGD (diolah)

lokal provinsi Bali sudah mengalami peningkatan dari sisi nilai transaksi jika dibandingkan pada tahun 2022.

Persetujuan usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur diharapkan dapat mendukung pengembangan arsitektur kesehatan global di Provinsi Bali.

Diprakirakan sekitar 4% hingga 8% penduduk Indonesia yang sebelumnya mencari perawatan kesehatan di luar negeri akan beralih ke KEK Sanur, dengan jumlah pasien diperkirakan mencapai 123 ribu hingga 240 ribu orang. Secara keseluruhan, diharapkan penghematan devisa mencapai Rp86,0 triliun hingga tahun 2045, sementara penambahan devisa pada periode yang sama mencapai Rp19,6 triliun.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, trotoar, dan pemasangan pipa untuk KEK Sanur seluas 41 hektar juga telah rampung sepenuhnya. Pembangunan hotel saat ini sudah mencapai 35% pada awal tahun dan diharapkan akan selesai pada bulan Agustus 2023. Selain itu, sekitar 15% hotel di kawasan akan dilengkapi dengan saluran oksigen untuk mendukung perawatan pasien. Beberapa kamar juga dilengkapi dengan dapur untuk keluarga pasien yang tinggal dalam jangka waktu lama. Dalam pembangunan jangka panjang, KEK Sanur juga didorong untuk dalam penyediaan *Convention Centre*, Pusat UMKM dan segmentasi desa retail.



BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Februari 2023 dalam tren menurun didukung oleh pembukaan kembali kegiatan usaha di tengah aktivitas pariwisata yang semakin membaik dan tercermin pada tren *job vacancy index* yang kian membaik.
- Kondisi kesejahteraan masyarakat di Bali juga menunjukkan peningkatan yang terkonfirmasi dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), serta membaiknya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di Bali.



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tantular
No. 4, Denpasar

Mei

2023

Tingkat kesejahteraan Bali terus membaik sejalan dengan tren perbaikan ekonomi Bali. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Februari 2023 semakin menurun, didukung oleh pembukaan kembali kegiatan usaha di tengah aktivitas pariwisata yang semakin membaik. Perbaikan TPT juga tercermin pada tren job vacancy index yang kian membaik. LU utama dengan pertumbuhan serapan tenaga kerja tertinggi adalah LU Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, Transportasi dan Pergudangan, serta Akmamin, sementara LU dengan pangsa serapan tenaga kerja terbesar adalah Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan, Akmamin, dan Konstruksi. Sejalan dengan membaiknya TPT, kondisi kesejahteraan masyarakat di Bali juga menunjukkan peningkatan, yang terkonfirmasi dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), serta membaiknya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di Bali. Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2022 juga menunjukkan tren peningkatan.

6.1. KETENAGAKERJAAN

Tabel 6.1. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Bali sampai dengan Agustus 2022

KEGIATAN UTAMA	2019		2020		2021		2022		2023
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
Penduduk Usia Kerja (15+ thn) (Jt Orang)	3.31	3.40	3.43	3.46	3.48	3.51	3.48	3.56	3.53
Angkatan Kerja (15-65 thn) (Jt Orang)	2.54	2.51	2.64	2.57	2.57	2.58	2.68	2.74	2.73
Bekerja (Jt Orang)	2.51	2.47	2.61	2.42	2.43	2.44	2.55	2.61	2.62
Pengangguran (Rb Orang)	30.26	39.29	32.99	144.50	139.14	138.67	129.68	131.47	101.82
Bukan Angkatan Kerja (Rb Orang)	772.39	891.91	787.25	887.21	915.17	928.57	794.90	824.60	805.83
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76.68	73.77	77.03	74.32	73.71	73.54	77.14	76.86	77.19
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	119	157	125	563	542	537	484	480	373

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Pada Februari 2023, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali terus melanjutkan tren perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Membaiknya ketenagakerjaan di Provinsi Bali tercermin dari penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun dari 4,80% pada Agustus 2022 menjadi 3,73% pada Februari 2023 (Tabel 6.1). Penurunan TPT terutama didukung oleh *reopening* sejumlah lapangan kerja pada LU terkait pariwisata, seiring terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan terjaganya kunjungan wisatawan domestik pada triwulan I 2023. Berdasarkan informasi dari Asosiasi *Tour and Travel* (ASITA) Provinsi Bali, hingga triwulan I 2023 kapasitas utilisasi Biro Perjalanan Wisata (BPJ) telah mencapai 70% dari periode sebelum pandemi, sedangkan objek amenities dan atraksi yang beroperasi telah mencapai 90%. Selama periode Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023, peningkatan serapan tenaga kerja terbesar terjadi pada LU Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan, Akmamin, dan Konstruksi (Tabel 6.5).

Dampak COVID-19 terhadap pengangguran semakin menurun. Total penduduk yang terdampak COVID-19

pada posisi Februari 2023 tercatat sejumlah 113,86 ribu orang atau 3,22% dari total penduduk usia kerja di Provinsi Bali. Angka ini membaik dibandingkan dengan posisi bulan Agustus 2022 yang mencatat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 mencapai 151,21 ribu orang atau 4,24% dari total penduduk usia kerja di Provinsi Bali. Penurunan dampak COVID-19 terjadi pada jumlah pengangguran, bukan angkatan kerja karena COVID-19, maupun jumlah penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebagaimana tercermin pada Tabel 6.2.

Berdasarkan jenjang pendidikannya, TPT penduduk lulusan SMP ke bawah dan SMA tercatat menurun, sementara penduduk lulusan setingkat SMK, diploma, dan universitas (S1) tercatat meningkat (Tabel 6.3). Penurunan TPT penduduk lulusan SMP dan SMA sejalan dengan meningkatnya jumlah pekerja bebas sektor informal yang tidak menetapkan standar / kualifikasi tertentu bagi tenaga kerjanya. Pada Februari tercatat bahwa TPT penduduk lulusan SMP dan SMA masing-masing sebesar 2,77 dan 3,86%, menurun dibandingkan dengan TPT pada bulan Agustus 2022 masing-masing sebesar 5,75% dan 4,71%.

Tabel 6.2. Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja (Ribuan Orang)

Komponen	Ags-20	Feb-21	Ags-21	Feb-22	Ags-22	Feb-23	Perubahan Feb 2023 - Ags 2022	
							ribu orang	persen
Pengangguran karena Covid-19	98.18	58.83	48.89	35.81	7.32	3.13	-4.19	-57.24
Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19	34.52	32.26	33.41	27.57	13.56	7.74	-5.82	-42.92
Sementara tidak bekerja karena Covid-19	72.19	40.08	38.15	24.3	3.78	4.73	0.95	25.13
Penduduk Bekerja yang mengalami penjurangan jam kerja karena Covid-19	648.25	525.78	593.75	317.87	126.55	98.26	-28.29	-22.35
Total	853.14	656.95	714.20	405.55	151.21	113.86	-37.35	-24.70
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.455.13	3.481.60	3.509.09	3.477.74	3.563.14	3.532.46		
% terhadap PUK	24.69%	18.87%	20.35%	11.66%	4.24%	3.22%		

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Tabel 6.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2019		2020		2021		2022		2023
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
SMP ke bawah (%)	0.56	0.55	0.37	5.50	4.47	4.14	3.22	5.75	2.77
SMA (%)	1.55	2.01	1.41	7.79	5.82	6.47	4.25	4.71	3.86
SMK (%)	2.01	2.92	2.46	10.12	8.58	8.02	9.22	3.66	6.40
Diploma I / II / III (%)	2.86	4.13	3.88	13.15	11.18	6.91	5.27	3.91	4.05
Universitas (%)	1.58	2.09	1.81	5.26	9.43	4.05	6.33	3.37	4.03
TOTAL	8.56	11.70	9.93	41.82	39.48	29.59	28.29	21.40	21.11

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Tabel 6.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2019		2020		2021		2022		2023
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
SMP ke bawah (ribu orang)	1.229	1.163	1.221	1.146	1.082	1.093	1.232	1.155	1.294
SMA (ribu orang)	522	550	597	529	555	534	513	571	486
SMK (ribu orang)	355	327	351	337	326	360	380	402	378
Diploma I / II / III (ribu orang)	99	121	128	109	136	122	123	148	123
Universitas (ribu orang)	305	308	311	302	328	331	305	331	344
TOTAL (Ribuan Orang)	2.509	2.469	2.607	2.423	2.427	2.440	2.553	2.607	2.625

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Sebagian besar pekerja di Provinsi Bali memiliki tingkat pendidikan SMP ke bawah. Jumlah pekerja lulusan setingkat SMP ke bawah tercatat mencapai 1,29 juta pada periode Februari 2023 atau 49,29% dari total pekerja (Tabel 6.4). Sementara itu TPT pada kelompok SMK, Diploma, dan Universitas disinyalir meningkat seiring dengan adanya permintaan/kebutuhan tenaga kerja pada level Pendidikan yang lebih rendah. Banyaknya masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah perlu direspons dengan upaya peningkatan kualitas teknis agar mampu bersaing di masa depan. Salah satu upaya peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan memanfaatkan program pemerintah "kartu prakerja"¹. Di sisi lain, pekerja dengan tingkat pendidikan Diploma merupakan golongan pekerja dengan jumlah paling kecil yakni 123 ribu orang (pangsa 4,05%).

Sejumlah LU utama menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, kecuali pada LU Pertanian

1. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi dari Pemerintah Pusat berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

dan Perdagangan. Sejalan dengan membaiknya kinerja pariwisata, jumlah serapan tenaga kerja pada LU terkait pariwisata (Tabel 6.5), yaitu LU Transportasi, Konstruksi, dan Akmamin tercatat meningkat dengan pertumbuhan pada masing-masing LU sebesar 10,75% (yoy), 3,21% (yoy), dan 1,85% (yoy). Di sisi lain LU Perdagangan dan Pertanian mengalami kontraksi pertumbuhan tenaga kerja masing-masing sebesar -3,16% (yoy) dan -2,96% (yoy). Peningkatan jumlah tenaga kerja LU terkait pariwisata didukung dengan *reopening* sejumlah lapangan usaha seperti hotel, restoran, dan kafe sehingga menyerap sejumlah besar tenaga kerja yang sebelumnya masih menganggur. Di sisi lain, LU Pertanian mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sejak Agustus 2022 dan berlanjut pada Februari 2023 seiring dengan preferensi masyarakat lokal yang lebih memilih kembali ke LU penunjang pariwisata di tengah prospek pariwisata yang membaik. Sementara itu tenaga kerja LU Konstruksi mengalami peningkatan seiring dengan terus berlanjutnya sejumlah proyek strategis pemerintah sehingga dibutuhkan penambahan

Tabel 6.5. Penduduk Bali yang Bekerja Menurut LU (Ribu Orang)

Lapangan Usaha 17 Sektor	2019		2020		2021		2022		2023
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	543	463	507	546	564	534	599	519	503
Pertambangan dan Penggalian	15	10	7	9	9	8	5	6	16
Industri Pengolahan	386	369	396	382	305	394	391	404	422
Pengadaan Listrik dan Gas	4	6	6	6	3	4	3	7	5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5	12	5	8	3	7	5	9	9
Konstruksi	163	162	179	159	155	155	160	176	182
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	457	481	502	496	535	511	554	553	536
Transportasi dan Pergudangan	79	77	97	60	88	58	53	86	95
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	324	328	316	236	220	234	233	315	320
Informasi dan Komunikasi	11	13	7	14	23	17	18	17	22
Jasa Keuangan dan Asuransi	84	71	69	62	67	63	72	63	65
Real Estate	-	4	8	3	6	3	3	4	0
Jasa Perusahaan	54	59	70	43	33	34	40	51	41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	120	125	122	114	112	137	117	126	101
Jasa Pendidikan	95	100	107	103	101	109	103	97	119
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38	55	56	51	59	56	79	60	47
Jasa Lainnya	131	135	152	131	145	118	116	115	140
Jumlah	2,510	2,469	2,607	2,423	2,428	2,440	2,553	2,607	2,625

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

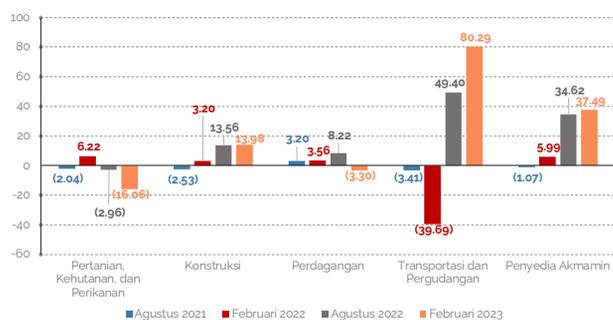
jumlah tenaga kerja di Bali. Sementara itu, jumlah tenaga kerja pada LU Pertanian saat ini terus melanjutkan tren penurunan yang disinyalir terjadi seiring dengan belum optimalnya regenerasi petani yang telah berusia lanjut dengan petani-petani muda, sehingga secara keseluruhan jumlah petani mengalami penurunan. Lebih lanjut, LU Administrasi Pemerintahan mengalami kontraksi jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan yaitu -19,37% (yoy) yang disinyalir terjadi seiring dengan cukup banyaknya pegawai di Bali yang telah memasuki masa pensiun.

Secara pangsa sektoral, LU Perdagangan, Pertanian, dan Industri Pengolahan menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali pada periode Februari 2023. Tingginya jumlah tenaga kerja pada LU Perdagangan disinyalir sejalan

dengan tingginya kebutuhan transaksi barang dan jasa di tengah pemulihan sektor pariwisata di Provinsi Bali. Sementara itu peningkatan tenaga kerja dan pangsa yang cukup signifikan terjadi pada LU Industri Pengolahan yang disinyalir terjadi seiring dengan terus bertambahnya jumlah industri lokal (kriya, tekstil, hingga makanan olahan) yang dapat digunakan sebagai *souvenir* buah tangan ke negara asalnya masing-masing.

Mayoritas pekerja di Provinsi Bali bekerja pada sektor informal. Kondisi ini berbeda dengan periode sebelum pandemi di mana ketenagakerjaan lebih didominasi oleh kelompok pekerja formal. Pada Februari 2023, persentase jumlah pekerja informal tercatat sebesar 54,51%, sementara jumlah pekerja formal sebesar 45,50%. Jumlah persentase pekerja formal yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya disinyalir dipengaruhi oleh terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja pada LU Administrasi Pemerintahan pada jumlah yang cukup besar sepanjang periode Agustus 2022 – Februari 2023. Di sisi lain jumlah tenaga kerja industri pengolahan rumahan seperti kriya dan tekstil semakin mengalami peningkatan pada periode Februari 2023, sehingga turut mendorong penambahan pangsa jumlah tenaga kerja informal di Provinsi Bali.

Grafik 6.1. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama



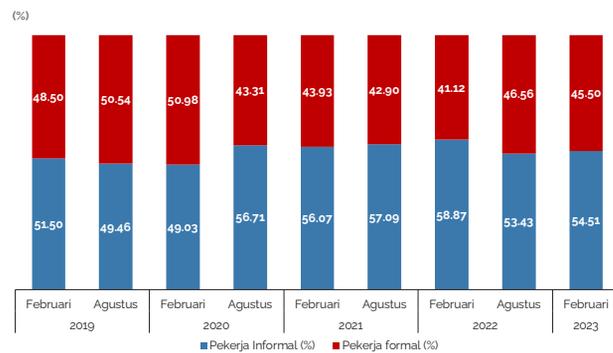
Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Tabel 6.6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (dalam %)

Status Pekerjaan Utama	2019		2020		2021		2022		2023
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Berusaha sendiri (%)	15,35	16,51	15,82	16,08	15,17	16,15	15,46	17,22	15,53
Berusaha dibantu buruh tidak tetap (%)	17,66	14,92	16,12	17,47	20,76	18,29	21,57	15,88	18,58
Pekerjaan bebas di nonpertanian (%)	3,77	4,42	3,55	4,41	3,30	3,97	3,81	4,01	4,49
Pekerja bebas di pertanian (%)	1,63	2,54	1,83	2,86	1,51	1,92	1,29	2,43	1,40
Pekerja tak dibayar (%)	13,09	11,07	11,71	15,89	15,33	16,76	16,74	13,89	14,51
Pekerja Informal (%)	51,50	49,46	49,03	56,71	56,07	57,09	58,87	53,43	54,51
Berusaha dibantu buruh tetap (%)	3,65	3,71	3,93	2,91	3,68	2,96	1,85	2,91	3,07
Buruh/karyawan (%)	44,85	46,83	47,05	40,40	40,25	39,94	39,27	43,65	42,43
Pekerja formal (%)	48,50	50,54	50,98	43,31	43,93	42,90	41,12	46,56	45,50
TOTAL (%)	100								

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 6.2. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

6.2. KESEJAHTERAAN

6.2.1. Perkembangan Angka Kemiskinan

Sejalan dengan berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Bali, kondisi kesejahteraan masyarakat Bali pada September 2022 tercatat meningkat. Hal ini terkonfirmasi dari persentase penduduk miskin pada September 2022 yang tercatat sebesar 4,53%, atau sejumlah 205,36 ribu orang, menurun dibandingkan periode Maret 2022 yang tercatat sebesar 4,57% atau sejumlah 205,68 ribu orang (Tabel 6.7).

Berdasarkan daerah tinggal, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat menurun di tengah peningkatan di daerah pedesaan. Pada bulan September 2022, persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan adalah sebesar 4,12%, lebih rendah dibandingkan periode Maret 2022 sebesar 4,23%. Sementara itu di wilayah pedesaan, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 5,58% dari total penduduk di pedesaan, atau meningkat dibandingkan dengan periode Maret 2022 dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,39%.

Penurunan tingkat kemiskinan di Bali terjadi seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat hingga menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2022. Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan juga didorong oleh stimulus program pengentasan kemiskinan seperti Penyaluran program bantuan pemerintah dalam bentuk Bansos PKH, Program Sembako, dan BLT-BBM.

6.2.2. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Berdasarkan data September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)² Provinsi Bali tercatat sebesar 0,56, lebih rendah dari data periode Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,63. Kondisi ini menjelaskan bahwa rata-rata total pengeluaran penduduk miskin di Bali berada semakin dekat dengan garis kemiskinan (Rp515,037 per kapita per bulan), sehingga tingkat pengeluaran penduduk miskin di Bali membaik dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan mulai meningkatnya pendapatan masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami akselerasi. Seiring dengan hal tersebut, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)³ juga menurun dari 0,13 pada Maret 2022 menjadi 0,10 pada September 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Provinsi Bali semakin menyempit dan kesenjangan pengeluaran yang dialokasikan per bulannya semakin menipis.

2. Indeks P1 merupakan Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan atau jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

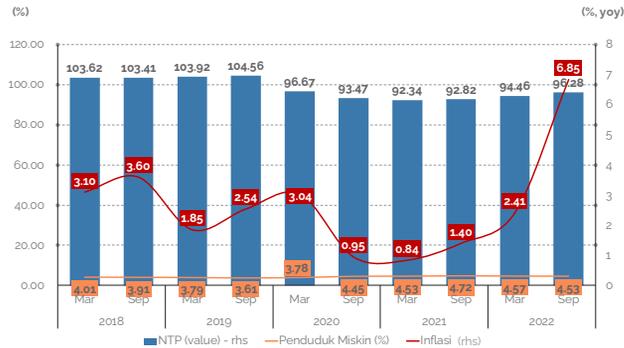
3. Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 6.7. Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bali 2018 – 2022

Keterangan	2018		2019		2020		2021		2022	
	Maret	September								
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	171.76	168.34	163.85	156.91	165.19	196.92	201.97	211.46	205.68	205.36
Persentase Penduduk Miskin (%)	4.01	3.91	3.79	3.61	3.78	4.45	4.53	4.72	4.57	4.53
- Kota	3.32	3.36	3.29	3.04	3.33	4.04	4.12	4.33	4.23	4.12
- Desa	5.38	5.08	4.88	4.86	4.78	5.40	5.52	5.68	5.39	5.58
Garis Kemiskinan (Rp)	382.598	388.451	400.624	412.906	429.834	438.167	452.221	461.532	485.022	515.037
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.69	0.52	0.54	0.50	0.52	0.61	0.68	0.76	0.63	0.56
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1.18	0.12	0.11	0.10	0.10	0.12	0.15	0.17	0.13	0.10

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 6.3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Penduduk di Provinsi Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, indeks P1 dan P2 pada September 2022 di perkotaan tercatat lebih rendah dibanding wilayah pedesaan. Nilai indeks P1 di perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,446, sedangkan di daerah pedesaan tercatat sebesar 0,858. Demikian juga dengan indeks P2 di periode yang sama, daerah perkotaan mencatat indeks P2 sebesar 0,075, lebih rendah dibandingkan dengan indeks P2 di daerah pedesaan sebesar 0,170. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Provinsi Bali di wilayah perkotaan lebih dekat dengan garis kemiskinan dibanding penduduk miskin di daerah pedesaan. Di sisi lain, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi atau cenderung lebih heterogen dibanding daerah perkotaan.

6.2.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Bali pada periode September 2022 menunjukkan sedikit penurunan. Hal ini tercermin dari indeks rasio gini yang tercatat sebesar 0,362 pada September 2022, lebih rendah dibandingkan periode Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,363. Kondisi ini menunjukkan sedikit menurunnya kesenjangan ekonomi antar penduduk di Provinsi Bali. Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks rasio gini di daerah perkotaan pada September 2022 tidak mengalami perubahan yakni tetap sebesar 0,371. Sementara di daerah pedesaan, indeks rasio gini pada September 2022 tercatat sebesar 0,282, lebih rendah dibandingkan periode Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,294. Penurunan rasio gini masyarakat di Provinsi Bali sejalan dengan semakin mengecilnya distribusi pendapatan pada kelompok penduduk 20% teratas di Provinsi Bali, yaitu sebesar 44,06% pada September 2022, menurun dibanding periode Maret 2022 sebesar 44,28%. Namun demikian, menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali masih termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

6.2.4. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Bali pada triwulan I-2023 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 6.8. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Periode	Kota	Desa	Kota+Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2021	0.653	0.753	0.682
September 2021	0.710	0.878	0.759
Maret 2022	0.618	0.641	0.625
September 2022	0.446	0.858	0.563
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2021	0.154	0.156	0.154
September 2021	0.148	0.226	0.171
Maret 2022	0.137	0.109	0.129
September 2022	0.075	0.170	0.102

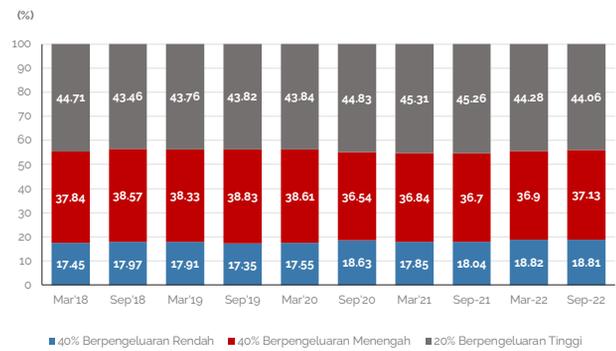
Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 6.4. Perkembangan Rasio Gini Bali dan Nasional



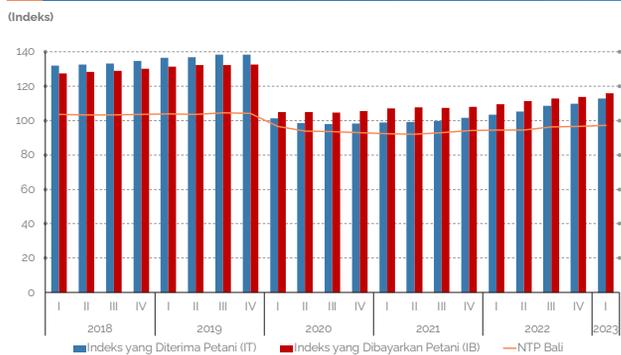
Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 6.5. Distribusi Pendapatan per Kapita Penduduk



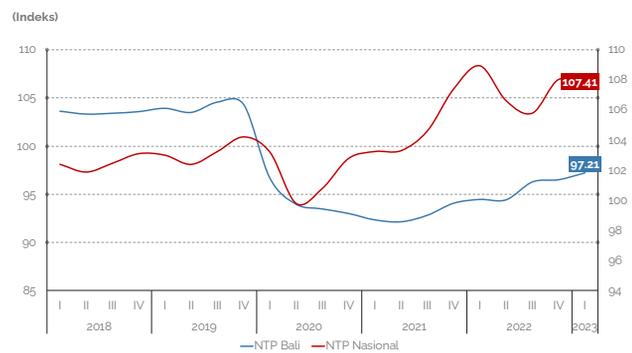
Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 6.6. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)



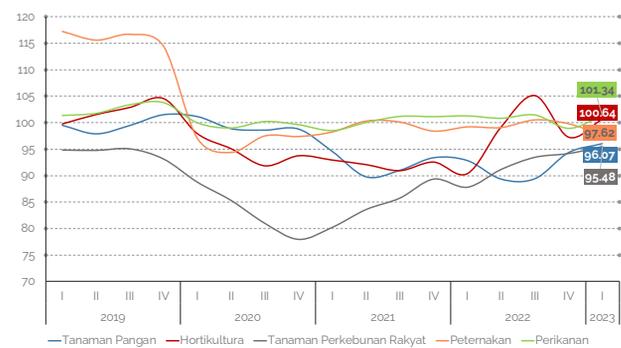
Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 6.7. Penerbangan NTP Bali dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 6.8. Pertumbuhan NTP Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 6.9. Perbandingan IT dan IB Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Sepanjang triwulan I 2023 rata-rata indeks NTP Provinsi Bali tercatat sebesar 97,21, meningkat dibandingkan rata-rata periode triwulan IV 2022 sebesar 96,51 dan sejalan dengan tren membaiknya tingkat pertumbuhan LU Pertanian pada triwulan laporan dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun demikian indeks NTP Bali pada triwulan I 2023 masih belum mampu mencapai angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu, nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga petani baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun sisi pembiayaan

produksi pertanian. Apabila ditinjau dari subsektornya, hampir semua subsektor mengalami peningkatan indeks NTP pada triwulan I 2023, kecuali subsektor peternakan. Dari 5 (lima) subsektor yang ada, subsektor hortikultura dan perikanan menjadi subsektor yang telah berhasil mencapai indeks NTP di atas 100.

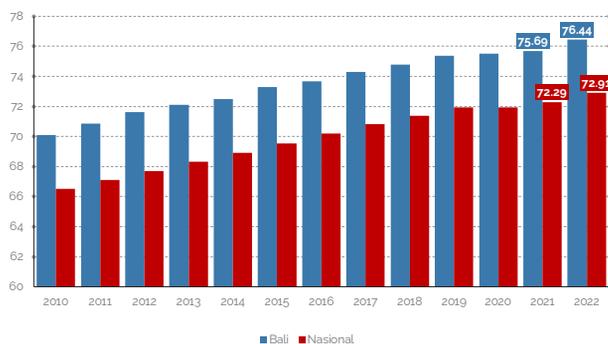
Indeks yang diterima petani (IT) lebih kecil dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani (IB) atau berada dalam kondisi defisit. Pada triwulan I 2023, indeks yang diterima petani sebesar 112,75, naik

9,12% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, indeks yang dibayar petani (IB) tercatat sebesar 115,88, meningkat 5,93% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan, pengeluaran petani tercatat masih lebih tinggi dibandingkan penerimaan petani.

6.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2022 semakin meningkat dan lebih tinggi dibandingkan nasional. IPM Bali tahun 2022 tercatat sebesar 76,44, lebih tinggi dibanding 75,69 pada tahun sebelumnya dan IPM nasional sebesar 72,91. Peningkatan IPM Bali didorong oleh peningkatan hampir pada seluruh indikator pembentuk IPM, yaitu Umur Harapan hidup Saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 36 basis poin (yoy), 8 basis poin (yoy), dan 33 basis poin (yoy). Sejalan dengan itu, indikator pengeluaran per kapita tercatat menurun 122 basis poin (yoy). Peningkatan IPM mengindikasikan perekonomian Bali semakin inklusif. Meskipun perekonomian terkena dampak yang besar akibat penurunan aktivitas pariwisata, namun peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap dapat didorong.

Grafik 6.10. Perbandingan Indeks IPM Bali dengan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)



BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN

- Perekonomian Bali pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,50% – 5,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh hingga 4,84% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh berlanjutnya pelonggaran kebijakan restriksi mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID-19, serta meningkatnya optimisme kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Bali sepanjang tahun.
- Tekanan inflasi Bali diproyeksikan menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional 3%±1% (yoy). Ke depan tetap perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan antisipatif untuk mencegah peningkatan tekanan harga lebih lanjut.



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tantular
No. 4, Denpasar

Mei

2023

Perekonomian Bali pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,50% – 5,30% (yoy), berpotensi mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh 4,84% (yoy). Ekonomi Bali diproyeksikan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan optimisme semakin meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Bali. Dari sisi pengeluaran, meningkatnya konsumsi RT dan konsumsi pemerintah, serta tetap terjaganya pertumbuhan ekspor jasa menjadi salah penggerak pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2023. Sementara dari sisi lapangan usaha, LU Transportasi, LU Perdagangan, dan LU Pertanian diperkirakan mengalami akselerasi dan menjadi penggerak utama, sementara LU Akmamin dan Perdagangan tetap tumbuh meskipun sedikit melandai dibandingkan tahun 2022 sehingga tetap mendukung naiknya pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2023.

Sejalan dengan ekonomi Provinsi Bali yang diperkirakan tumbuh positif pada 2023, tekanan inflasi Bali diproyeksikan menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional 3%±1% (yoy). Ke depan tetap diperlukan langkah-langkah antisipatif yang strategis serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan pelaku usaha, guna mencegah terjadinya lonjakan tekanan harga lebih lanjut sehingga kenaikan tekanan inflasi hingga akhir tahun dapat dikendalikan.

7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA DAN NASIONAL

7.1.1. PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA 2023

Perekonomian dunia pada tahun 2023 diproyeksikan tumbuh kuat ditopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang, meskipun sedikit mengalami revisi ke bawah dibandingkan proyeksi pada periode.

Berdasarkan proyeksi pada April 2023, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 2,8% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi pertumbuhan pada periode Januari 2023 yang tumbuh mencapai 2,9% (yoy). Publikasi *World Economic Outlook* (WEO) dari IMF pada April 2023 menyajikan informasi proyeksi ekonomi negara maju yang diperkirakan tumbuh 1,3% (yoy), lebih tinggi dari prakiraan Januari 2023 yang tumbuh sebesar 1,2% (yoy). Di sisi lain, proyeksi ekonomi negara berkembang tahun 2023 tumbuh lebih tinggi dibandingkan negara maju, yakni sebesar 3,9% (yoy), meski sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi Januari 2023 yang tumbuh sebesar 4,0% (yoy). Penyesuaian proyeksi ekonomi dunia pada bulan April dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti efek kumulatif dari pandemi Covid-19 selama 3 (tiga) tahun terakhir, invasi Rusia terhadap Ukraina yang menimbulkan rangkaian konflik geopolitik, gangguan rantai pasok dunia secara berkepanjangan, serta lonjakan

harga komoditas dan inflasi. Berbagai tantangan tersebut membuat sejumlah bank sentral melakukan kebijakan pengetatan untuk mencegah terjadinya instabilitas makroekonomi pada tahun 2023. Di sisi lain, negara Tiongkok yang telah melakukan *reopening* aktivitas masyarakat pasca pandemi Covid-19 berpotensi turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Prospek ekonomi India sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi juga terus meningkat didukung dengan permintaan domestik yang semakin kuat. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) tertahan sejalan dengan dampak kebijakan moneter ketat dan peningkatan risiko stabilitas sistem keuangan (SSK) pada periode berjalan.

Tingkat hutang global tetap tinggi di tengah guncangan stabilitas komoditas ekonomi global akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Akibat pandemi dan gejolak ekonomi selama tiga tahun terakhir, mayoritas utang swasta dan publik berbagai negara di dunia mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Kebijakan moneter yang ketat oleh negara maju utama telah menyebabkan kenaikan tajam dalam biaya pinjaman dan memunculkan kekhawatiran tentang keberlanjutan utang beberapa negara berkembang. Tingkat rata-rata dan distribusi *spread* negara berkembang

meningkat secara signifikan pada 2022, sebelum turun pada awal 2023. Dampak ketidakstabilan di pasar keuangan terhadap *spread* di negara-negara berkembang belum terlalu signifikan, namun terdapat risiko nyata peningkatan yang tak terduga dalam beberapa bulan mendatang apabila kondisi keuangan global semakin ketat. Sementara itu, dampak invasi Rusia terhadap Ukraina masih terasa hingga periode berjalan. Meskipun demikian, ekonomi Eropa tahun 2022 lebih kuat dari yang diperkirakan. Di luar Eropa, harga makanan dan energi turun pada triwulan IV 2022, sehingga menurunkan tekanan bagi konsumen dan negara-negara yang mengimpor komoditas. Untuk mempertahankan harga yang tetap rendah dan stabil, penting bagi negara-negara global untuk menghindari guncangan pasokan negatif selanjutnya.

Penghapusan kebijakan Zero-Covid Policy dan pembukaan border di Tiongkok berpotensi mendorong laju pertumbuhan ekonomi dunia. Tiongkok yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi dunia diperkirakan akan mengalami percepatan ekonomi yang cukup besar di tahun 2023. Berdasarkan proyeksi IMF di WEO April 2023, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan sebesar 5,2% (yoy), relatif tetap dibandingkan proyeksi sebelumnya yang juga sama-sama sebesar

5,20% (yoy). Penghapusan kebijakan *Zero-Covid* yang ditempuh oleh Pemerintah Tiongkok pada tahun 2023 juga berpotensi mendorong aktivitas kegiatan ekonomi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi domestik. Percepatan aktivitas ekonomi dan perdagangan Tiongkok berdampak pada peningkatan permintaan dunia yang turut berkontribusi mendorong laju ekonomi dunia.

Fenomena *pent up demand* global sejalan dengan berangsur pulihnya perekonomian dunia berisiko meningkatkan tekanan inflasi global menjadi lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tabungan masyarakat yang siap untuk dipergunakan (*idle asset*) dan berlanjutnya insentif fiskal diiringi oleh pelonggaran kebijakan restriksi mobilitas berpotensi mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang signifikan dalam waktu yang lebih pendek. Perbaikan kinerja perekonomian negara maju juga dapat memberikan efek tumpah (*spillover effect*) ke negara berkembang melalui perdagangan internasional dan pariwisata, sehingga turut meningkatkan permintaan agregat negara berkembang. Hal ini diperkirakan akan semakin meningkatkan risiko tekanan inflasi global.

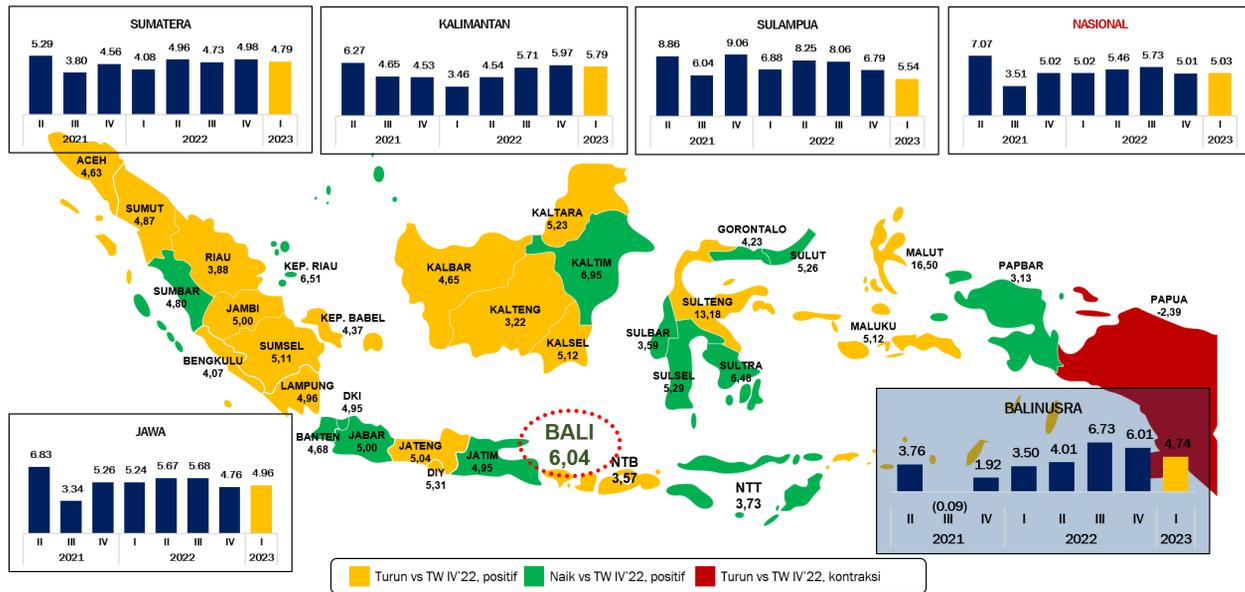
Negara mitra dagang utama Provinsi Bali seperti Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Australia, Thailand, dan Taiwan belum menunjukkan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Amerika

Tabel 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

	YOY (%)								Delta Perubahan dari Proyeksi Sebelumnya	
	Estimasi			Proyeksi		Proyeksi		2023		
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024			
World Output	-31	6.2	3.4	2.9	3.1	2.8	3.0	-0.1	-0.1	
Advanced Economies	-45	5.4	2.7	1.2	1.4	1.3	1.4	0.1	0.0	
United States	-34	5.9	2.0	1.4	1.0	1.6	1.1	0.2	0.1	
Euro Area	-6.3	5.3	3.5	0.7	1.6	0.8	1.4	0.1	-0.2	
Germany	-4.6	2.6	1.9	0.1	1.4	-0.1	1.1	-0.2	-0.3	
France	-7.9	6.8	2.6	0.7	1.6	0.7	1.3	0.0	-0.3	
Japan	-45	2.1	1.4	1.8	0.9	1.3	1.0	-0.5	0.1	
United Kingdom	-9.3	7.6	4.1	-0.6	0.9	-0.3	1.0	0.3	0.1	
Emerging Market and Developing Economies	-2.0	6.7	3.9	4.0	4.2	3.9	4.2	-0.1	0.0	
Emerging and Developing Asia	-0.8	7.4	4.3	5.3	5.2	5.3	5.1	0.0	-0.1	
China	2.2	8.4	3.0	5.2	4.5	5.2	4.5	0.0	0.0	
India	-6.6	8.7	6.8	6.1	6.8	5.9	6.3	-0.2	-0.5	
Emerging and Developing Europe	-1.8	6.9	0.7	1.5	2.6	1.2	2.5	-0.3	-0.1	
Russia	-2.7	4.7	-2.2	0.3	2.1	0.7	1.3	0.4	-0.8	
World Trade Volume (goods and services) 6/	-7.9	10.4	5.4	2.4	3.4	2.4	3.5	0.0	0.1	
Commodity Prices (US dollars)										
Oil	-32.7	65.8	39.8	-16.2	-7.1	-24.1	-5.8	-7.9	1.3	
Nonfuel	6.7	26.4	7.0	-6.3	-0.4	-2.8	-1.0	3.5	-0.6	

Sumber: IMF - World Economic Outlook Januari 2023

Gambar 7.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan I 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Serikat yaitu sebesar 1,6% (yoy), meski lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 1,4% (yoy). Lebih lanjut, proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris juga mengalami kontraksi pada 2023, yaitu sebesar -0,3% (yoy), namun sedikit membaik dibandingkan proyeksi pada Januari 2023 dengan besaran -0,6% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang lebih terbatas dipengaruhi oleh permintaan domestik yang lebih rendah sebagai dampak dari kenaikan energi dunia serta sejumlah sentimen ekonomi negatif global yang turut membebani aktivitas konsumsi dan investasi swasta. Hal ini pula yang selanjutnya berpotensi meningkatkan risiko penurunan aktivitas perdagangan masing-masing negara terhadap provinsi Bali.

7.1.2. PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2023

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan masih terus berlanjut, di tengah perbaikan ketahanan eksternal dan tekanan inflasi yang terus melandai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia tumbuh kuat mencapai 5,03% (yoy) pada triwulan I 2023, meningkat dari capaian triwulan IV 2022 yang sebesar 5,01% (yoy). Pada tahun 2023, optimisme perbaikan pemulihan ekonomi Indonesia diprakirakan

masih akan terus berlanjut ditopang oleh menguatnya perekonomian domestik, terutama tingginya ekspor, konsumsi RT, dan konsumsi Pemerintah yang semakin baik. Lebih lanjut, peningkatan mobilitas, perluasan sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha yang semakin tinggi juga turut mendukung potensi pertumbuhan Indonesia sepanjang tahun 2023. Namun demikian, potensi tertahannya konsumsi rumah tangga akibat risiko kenaikan inflasi dari ketetapan pasar tenaga kerja masih harus diwaspadai.

Dari sisi pengeluaran, ekonomi Indonesia ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tetap tinggi. Kinerja positif konsumsi rumah tangga terutama didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan semakin longgarnya kebijakan pembatasan mobilitas dan pencabutan kebijakan PPKM, semakin meningkatnya ketersediaan lapangan kerja seiring dengan semakin terkendalnya penyebaran pandemi Covid-19, serta dampak positif dari rangkaian kegiatan atau *event* internasional. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja ekspor Indonesia juga meningkat ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat serta hilirisasi komoditas strategis nasional yang semakin terakselerasi.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh kinerja positif seluruh LU. Pada triwulan I 2023, seluruh LU menunjukkan pertumbuhan positif, dengan sejumlah LU mengalami akselerasi yang cukup signifikan seperti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga didukung kinerja yang baik dari LU yang berkontribusi cukup besar, seperti Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; serta Transportasi dan Pergudangan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti oleh wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

Pertumbuhan ekonomi nasional ke depan hingga akhir tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh positif.

Berbagai indikator dini hingga Mei 2023 dan hasil survei Bank Indonesia, seperti keyakinan konsumen, dan penjualan eceran terus membaik. Penghapusan kebijakan PPKM dan pelonggaran mobilitas masyarakat lebih lanjut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi sehingga menopang perbaikan ekonomi secara keseluruhan di tahun 2023. Dari sisi eksternal, kinerja neraca perdagangan hingga April 2023 tetap surplus dipengaruhi ekspor nonmigas yang cukup kuat. Lebih lanjut, investasi juga diperkirakan meningkat sejalan dengan perbaikan kinerja *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur di tengah melambatnya perekonomian global. **Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2023 dalam kisaran 4,5% - 5,3% (yoy).**

Di sisi lain, tekanan inflasi nasional pada tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, serta inflasi IHK dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran $3\pm 1\%$ pada triwulan III 2023.

Tingkat inflasi nasional per April 2023 tercatat sebesar 4,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,97% (yoy). Perkembangan positif inflasi IHK tidak terlepas dari koordinasi kebijakan pengendalian inflasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya melalui

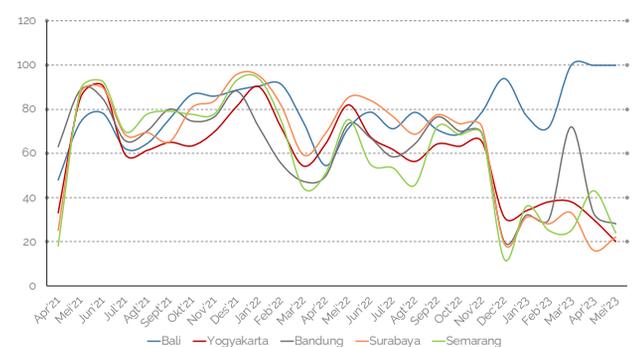
Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, tekanan inflasi IHK diperkirakan semakin menurun dan berada dalam rentang $3\pm 1\%$ pada triwulan III 2023, didorong oleh prakiraan mulai terkendalnya harga energi dan pangan global, penguatan ketahanan pangan strategis dalam negeri, serta dukungan sejumlah respons kebijakan moneter untuk mengantisipasi tekanan harga ke depan.

7.1.3. PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI BALI 2023

Seiring dengan terus berlanjutnya pemulihan ekonomi global, proyeksi ekonomi Bali pada tahun 2023 diperkirakan juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

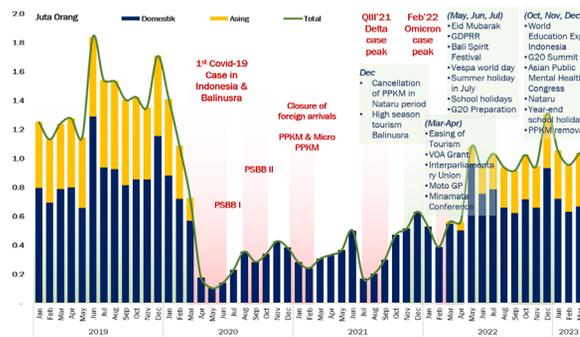
Dengan mencermati perkembangan ekonomi global maupun nasional, *prompt indicator*, hasil survei dan liaison hingga periode bulan laporan, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2023 diperkirakan tetap terjaga dan tumbuh pada kisaran 4,50% - 5,30% (yoy) ditopang oleh berlanjutnya tren pemulihan kinerja pariwisata Bali serta didorong oleh perbaikan kinerja pertanian pada tahun berjalan. Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh perbaikan kunjungan wisatawan seiring dengan kebijakan pelonggaran mobilitas dan pencabutan PPKM, serta penambahan rute, maskapai, serta frekuensi *direct flight* domestik dan internasional ke Provinsi Bali. Selain itu, berlanjutnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur, serta tetap terjaganya antusiasme wisman untuk kembali berkunjung ke Bali akan menjadi katalis peningkatan kunjungan wisman. Pada tahun 2023,

Grafik 7.1. Perkembangan Pencarian Google Indonesia Travel



Sumber: Google Trends, diolah

Grafik 7.2. Event Analysis Kunjungan Wisatawan Ke Bali



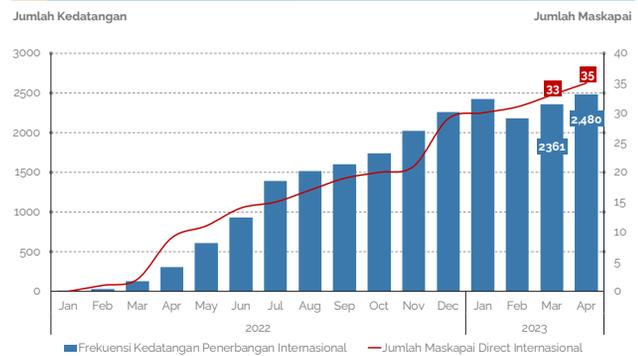
Sumber: KPw BI Provinsi Bali

peningkatan kunjungan wisatawan juga ditopang oleh penyelenggaraan MICE event berskala nasional maupun internasional sehingga turut mendorong meningkatnya kunjungan wisman ke Bali. Minat berwisata ke Bali masih tinggi tercermin dari hasil pengolahan *big data Google Trend* yang menunjukkan tren pencarian destinasi wisata Bali yang tetap tinggi pada triwulan I 2023 dan masih berlanjut ke triwulan selanjutnya.

Optimisme perbaikan kinerja pariwisata juga didukung kebijakan-kebijakan yang mempermudah masuknya wisatawan ke Bali. Wisatawan domestik diperkirakan pulih lebih cepat, seiring telah dicabutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui penerbitan Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 tahun 2022¹. Seiring dengan pencabutan PPKM dan pencabutan kewajiban *rapid test* / PCR untuk penerbangan, aktivitas mobilisasi masyarakat dan wisatawan menjadi jauh lebih lancar baik dari maupun ke Provinsi Bali. Lebih lanjut, kemudahan *travel* internasional ke Bali juga semakin meningkat, yang terkonfirmasi dari penambahan jumlah penerima *Visa on Arrival* (VOA) sebanyak 92 negara, 10 negara penerima Bebas Kunjungan Visa (BKV), hingga pemberian *Second Home Visa* atau izin tinggal terbatas yang merupakan program visa jangka panjang untuk penduduk mancanegara yang ingin tinggal dalam waktu lama di Indonesia (masa tinggal 5 hingga 10 tahun). Provinsi Bali juga terus mendorong pengembangan destinasi wisata alternatif yang saat ini semakin diminati oleh wisatawan mancanegara seperti

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa dan Bali, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Grafik 7.3. Jumlah International Direct Flight Ke Bali hingga April 2023



Sumber: Angka Pura I, diolah

digital nomad, retirement tourism, serta *health and wellness tourism*. Dengan demikian, Provinsi Bali diharapkan mampu menjaring wisatawan mancanegara dengan latar belakang dan karakter yang lebih luas dengan preferensi kebutuhan berwisata yang lebih beragam. Pada keseluruhan tahun 2023, diperkirakan kunjungan wisatawan mancanegara Bali mencapai 4,7 juta orang.

Seiring dengan berbagai stimulus kebijakan Pemerintah, jumlah maskapai yang melayani rute internasional *direct flight* ke Provinsi Bali juga bertambah hingga mencapai 35 maskapai yang menjangkau 17 negara dan 29 kota. Kunjungan wisatawan pada tahun 2023 berpotensi meningkat seiring dengan dibukanya penerbangan dari Tiongkok sebagai salah satu negara dengan penyumbang wisatawan mancanegara terbesar bagi Bali, serta masuknya maskapai dan rute baru *direct flight* internasional ke Provinsi Bali. Lebih lanjut, reaktivasi berbagai maskapai dan rute penerbangan internasional, termasuk aktivasi penerbangan pesawat terbesar di dunia (Airbus A1380) dari dan ke Bali juga turut mendorong jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Namun demikian, potensi penambahan kunjungan wisatawan juga dapat tertahan oleh berbagai risiko, seperti dampak lanjutan dari isu dan potensi pengurangan VOA untuk negara kantong wisman tertentu, isu penerapan pajak turis dan retribusi tambahan untuk turis, kebijakan perlintasan masyarakat, perkembangan ekonomi global, serta perkembangan tren suku bunga global dan domestik yang turut mempengaruhi pola konsumsi masyarakat secara global. Selain itu, risiko resesi dan ketidakpastian ekonomi global juga menyebabkan sebagian besar masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam mengalokasikan

Grafik 7.4. Indeks Keyakinan Konsumen (sd Apr'23)


Sumber : KPw BI Provinsi Bali

Grafik 7.5. Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (sd Apr'23)


Sumber : KPw BI Provinsi Bali

Grafik 7.6. Indeks Ekspektasi Penghasilan (sd Apr'23)


Sumber : KPw BI Provinsi Bali

Grafik 7.7. Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (sd Apr'23)


Sumber : KPw BI Provinsi Bali

dana yang dimiliki, sehingga tendensi berwisata dalam jarak jauh dan waktu yang lama mengalami penurunan.

SISI PENGELUARAN

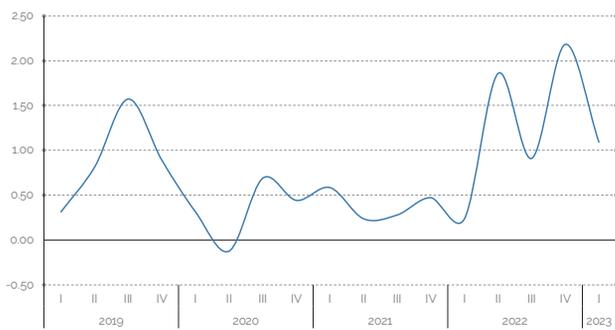
Kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan melanjutkan tren perbaikan pertumbuhan, meski terdapat risiko yang perlu mendapat perhatian.

Pertumbuhan ini didorong oleh ekspektasi meningkatnya daya beli masyarakat yang lebih optimis dari prakiraan sebelumnya di tengah berlanjutnya tren pemulihan ekonomi, serta masih berlanjutnya sejumlah insentif fiskal pemerintah juga berpotensi mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. Kondisi ini juga tercermin pada Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di mana perkembangan indeks pendukung menunjukkan tren peningkatan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Penghasilan, dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama menunjukkan tren yang positif dan meningkat pada triwulan II 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi peningkatan konsumsi seiring dengan optimisme perbaikan aktivitas

perekonomian di tengah pemulihan pasca pandemi Covid-19. Peningkatan konsumsi juga didorong oleh ekspektasi penghasilan yang lebih tinggi ke depan, sehingga dapat mendorong daya beli. Di sisi lain, Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja menunjukkan sedikit penurunan pada triwulan II 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mencerminkan potensi konsumsi yang lebih tinggi ditahan akibat ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit ke depan, terutama untuk lapangan pekerjaan dengan pengeluaran Rp3,1 juta – Rp5 juta. Perkembangan seluruh indeks dapat dilihat pada Grafik VII.5 – VII.8.

Kinerja konsumsi pemerintah pada tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.

Prakiraan akselerasi konsumsi pemerintah pada tahun 2023 terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan dari PAD seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi dan aktivitas pariwisata di Provinsi Bali, serta optimalisasi penarikan pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan memanfaatkan kanal atau sistem pembayaran digital. Pagu anggaran belanja tahun 2023

Grafik 7.8. Hasil Likert Scale Proyeksi Investasi satu tahun ke depan

Sumber: KPw BI Provinsi Bali - Survei Liaison Investasi

yang bersumber dari APBN dan APBD juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, sehingga konsumsi pemerintah juga diproyeksikan semakin meningkat pada tahun 2023.

Kinerja ekspor luar negeri Bali diproyeksikan tumbuh positif, didorong ekspor jasa yang semakin meningkat serta masih kuatnya permintaan dari negara mitra dagang utama. Kinerja ekspor diprakirakan tetap tumbuh tinggi pada tahun 2023 meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pengaruh *base effect* tingginya pertumbuhan ekspor jasa pada 2022. Kinerja ekspor jasa pada tahun 2023 diprakirakan akan terus melanjutkan tren positif seiring dengan optimisme pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali. Selain itu, kinerja ekspor barang juga diprakirakan akan tumbuh positif seiring dengan masih kuatnya permintaan yang berasal dari negara mitra dagang utama sejalan dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksikan akan berlanjut di tahun 2023 (*World Economic Outlook* periode April 2023).

Kinerja investasi pada tahun 2023 diprakirakan tumbuh positif, namun terdeselerasi seiring dengan prakiraan terus berlanjutnya rencana investasi baik dari sisi swasta maupun Pemerintah. Terdapat sejumlah proyek infrastruktur besar tahun 2023, di antaranya proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Konservasi pantai Kuta, Bali *International Hospital*, Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan Sanur, pengembangan Pelabuhan Bena, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, pembangunan kawasan suci Pura Besakih, pembangunan jalan baru Singaraja – Mengwitani, Pembangunan *Bali Solar Power Plant*, Pembangunan Bendungan Sidan,

Pembangunan Menara Turyapada, serta pembangunan preservasi jalan dan jembatan. Namun, realisasi investasi pada proyek-proyek tersebut diprakirakan lebih lambat akibat *stance wait and see* konstruksi menjelang tahun politik 2024. Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei *liaison* investasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, kegiatan prakiraan investasi satu tahun ke depan di Provinsi Bali menunjukkan perlambatan investasi sepanjang tahun 2023. Hal ini mengindikasikan level optimisme pelaku usaha terhadap investasi di Bali menurun dan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya.

LAPANGAN USAHA

Kinerja LU terkait pariwisata di antaranya LU transportasi, akamin, dan perdagangan masih akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2023, didukung dengan semakin meningkatnya aktivitas wisman maupun wisnus, baik *leisure* maupun *business traveler*. Pertumbuhan LU Akmamin dan Transportasi pada tahun 2023 diprakirakan tetap impresif didukung dengan prospek peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Aksesibilitas diprakirakan meningkat didukung pembukaan kembali rute penerbangan *direct flight* ke Bali serta penambahan frekuensi penerbangan rute yang sebelumnya telah tersedia untuk memenuhi *demand* wisatawan global yang terus meningkat. Hingga Mei 2023 maskapai internasional yang membuka rute penerbangan *direct flight* telah mencapai 36 maskapai, dan diprakirakan semakin bertambah hingga akhir tahun 223. Pertumbuhan LU Transportasi juga didukung kualitas infrastruktur konektivitas yang sangat baik, tercermin dari penghargaan "*Best Airport of 15 to 25 Million Passengers in Asia Pacific*" yang diterima oleh Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada *Airport Service Quality (ASQ) Award* pada April 2023. Atas capaian tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali turut meraih predikat *Airport Council International (ACI) World Director General's Roll of Excellence*, yaitu predikat yang disematkan kepada bandara yang mampu meraih penghargaan ASQ Award di 5 tahun berbeda, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kemudian LU Akmamin diprakirakan juga akan tetap tumbuh tinggi seiring dengan ekspektasi meningkatnya

Tabel 7.2. Daftar destinasi wisata terpopuler di dunia tahun 2023 menurut *Trip Advisor*

No	Kategori	Penerima Penghargaan	Lokasi
1		Soekarno Hatta International Airport	Tangerang
2		Bali Safari and Marine Park	Gianyar
3	2 nd ASEAN Public Toilet Award	Desa Wisata Adat Sasak Ende (Sade)	Lombok Tengah
4		Kuta Beach	Badung
5		The Berawa	Badung
6		Gaya Spa Wellness Wolter Monginsidi	Jakarta
7		Ayana Resort Bali	Badung
8	2 nd ASEAN Spa Service Award	Revivo Wellness Resort Bali	Badung
9		Acqua Spa	Denpasar
10		Apurva Spa Kempinski Bali	Badung
11		Desa Wisata Pentingsari	Yogyakarta
12		Desa Wisata Pemuteran	Buleleng
13	3 rd ASEAN Community Tourism Award	Desa Wisata Wae Rebo	Manggarai
14		Desa Wisata Tamansari	Banyuwangi
15		Desa Wisata Silokek	Sijunjung
16		Desa Wisata Nglinggof	Maluku Tenggara
17		Desa Wisata Dieng Kulon	Banjarnegara
18	4 th ASEAN Homestay Award	Desa Wisata Nusa	Lhoknga
19		Desa Wisata Malangga	Tolitoli
20		Desa Wisata Undisan	Bangli

jumlah kunjungan wisman dan wisnus hingga akhir tahun 2023, meskipun berpotensi sedikit melandai dibandingkan tahun 2022. Ekspektasi terjaganya kunjungan wisman ke Bali juga didukung dengan diberikannya sejumlah penghargaan kepada beberapa DTW di Bali dalam *ASEAN Tourism Award 2023*, di mana Indonesia berhasil memperoleh 20 penghargaan (Tabel VII.2).

Seiring dengan cukup banyaknya penghargaan yang diperoleh DTW di Bali, ekspektasi terhadap semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan maupun pelaku *business leisure* juga akan semakin bertambah, khususnya seiring dengan terus dilakukannya perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata dan MICE di Bali. Upaya Pemerintah untuk mendorong naiknya aktivitas PPLN melalui perluasan VOA, e-VOA, VEA, hingga *home visa/retirement visa* terhadap negara-negara kantong wisman akan berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisman ke provinsi Bali. Gencarnya penyaluran vaksinasi dan *booster* pada tahun 2023 juga turut mendukung naiknya *level of confidence to travel* baik wisnus maupun wisman. Meskipun demikian, pada tahun 2023 kinerja LU Transportasi dan Akmamin akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi ekonomi dan geopolitik global, yang mengakibatkan mayoritas wisatawan terindikasi menahan konsumsinya hingga situasi ekonomi menjadi lebih kondusif. Prakiraan sedikit melambatnya pertumbuhan LU Akmamin pada tahun

2023 diperkirakan terjadi seiring dengan penurunan jumlah pelaksanaan MICE pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya saat rangkaian rangkaian acara KTT G20 berlangsung sepanjang tahun.

Kinerja LU Konstruksi pada tahun 2023 diperkirakan mengalami deselerasi yang dipengaruhi oleh penurunan intensitas pembangunan infrastruktur di Bali pasca pelaksanaan rangkaian kegiatan KTT G20 pada tahun 2022. Pertumbuhan positif LU Konstruksi akan ditopang oleh berlanjutnya pengerjaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai sejak tahun 2022 dan diikuti dengan proyek-proyek pembangunan baru pada tahun 2023 pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Konservasi pantai Kuta, Bali International Hospital, Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan Sanur, pengembangan Pelabuhan Benoa, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, pembangunan kawasan suci Pura Besakih, pembangunan jalan baru Singaraja – Mengwitani, Pembangunan Bali Solar Power Plant, Pembangunan Bendungan Sidan, Pembangunan Turyapada serta pembangunan preservasi jalan dan jembatan. Meskipun demikian, proyek-proyek yang ada saat ini umumnya bersifat *multiyears* dan akumulasi nilai proyek pada tahun berjalan diperkirakan mengalami deselerasi jika dibandingkan dengan nilai proyek pada tahun sebelumnya.

Sementara itu kinerja LU Pertanian diperkirakan akan tumbuh positif dan terakselerasi dibandingkan tahun sebelumnya. Akselerasi pertumbuhan LU pertanian didukung oleh peningkatan alokasi pupuk bersubsidi secara nasional, dukungan kondisi cuaca pada tahun 2023 yang diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya, terjadinya fenomena iklim El Nino ringan yang berpengaruh positif terhadap aktivitas nelayan di Bali, upaya program perluasan lahan pemerintah, serta penggunaan bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga ketahanan pasokan. Secara khusus, dalam mengantisipasi dampak El Nino ringan pada subsektor tanaman pangan, optimalisasi bendungan untuk aerasi wilayah persawahan di Provinsi Bali perlu terus didorong.

7.1.4. RISIKO PERTUMBUHAN EKONOMI

Masih cukup tingginya ketidakpastian global berpeluang menghambat laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 perlu diantisipasi. Tertahannya pemulihan ekonomi global akibat rencana pengetatan moneter dan stabilitas sistem keuangan (SSK) Amerika Serikat berpotensi mempengaruhi pemulihan ekonomi negara-negara global, termasuk Indonesia. Rencana Amerika Serikat untuk menahan peningkatan suku bunga global lebih lanjut di tengah fenomena *government debt ceiling* / tingkat utang Amerika Serikat yang sangat tinggi berpotensi menyebabkan pelaku usaha dan investor global mengambil *stance wait and see*, sehingga terdapat risiko tertahannya investasi yang masuk dan menahan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional Bali.

Lebih lanjut, pelaksanaan proyek-proyek investasi di Bali ditengarai cenderung mengambil posisi *wait and see* menjelang masuknya periode pemilihan umum 2024. Periode pemilu dapat berdampak pada pelaksanaan proyek-proyek investasi, baik proyek Pemerintah maupun sektor swasta. Perubahan pemimpin pada tingkat nasional maupun regional berpotensi menyebabkan perubahan kebijakan-kebijakan investasi dan infrastruktur, seperti pengubahan, penundaan, atau pembatalan proyek-proyek yang sedang berjalan. Kemudian periode pemilu umumnya disertai dengan

peningkatan pengeluaran pemerintah dan berpotensi mempengaruhi dana yang tersedia untuk investasi. Hal ini menyebabkan kondisi investasi yang cukup dinamis menjelang pemilihan umum 2024, sehingga para pelaku konstruksi ditengarai akan cenderung mengambil posisi *wait and see* hingga proyek investasi dapat dilanjutkan pada kondisi yang lebih stabil.

Risiko lain yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi di Bali adalah akselerasi pertumbuhan konsumsi RT yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang/jasa yang di-supply untuk memenuhi permintaan di pasar. Konsumsi RT Provinsi Bali tumbuh tinggi pada triwulan I 2023 dan berbeda dengan pola historisnya. Hal ini menunjukkan pemulihan perekonomian yang lebih cepat dari prakiraan, diiringi dengan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Namun di sisi lain, permintaan yang tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan *supply* barang di pasar berisiko menahan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Untuk memenuhi permintaan di pasar, barang/jasa harus di *supply* dari dalam wilayah atau produk impor. Tingginya konsumsi rumah tangga di Bali dapat menyebabkan ketergantungan yang signifikan terhadap impor barang konsumsi. Jika ketersediaan dan harga barang impor mengalami fluktuasi atau jika nilai tukar mata uang mengalami perubahan yang merugikan, maka hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga barang konsumsi dan mengganggu daya beli rumah tangga. Selain itu, risiko distribusi juga dapat menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali terus berlanjut, termasuk distribusi barang nasional maupun internasional.

7.1.5. PRAKIRAAN INFLASI 2023

Tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan cukup tinggi sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian, terutama pariwisata. Penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 30 Desember 2022 dan tren peningkatan kedatangan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, diperkirakan semakin mendorong pemulihan ekonomi Bali, terutama kinerja sektor pariwisata. Selanjutnya sejalan dengan peningkatan aktivitas

ekonomi Bali, pendapatan masyarakat Bali pada tahun 2023 juga diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga berpotensi mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Pada akhirnya, kenaikan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dan kenaikan pendapatan masyarakat Bali akan berdampak pada meningkatkan tekanan inflasi dari sisi permintaan (*demand pull inflation*).

Penurunan inflasi negara maju yang lebih lambat berpotensi menyebabkan penurunan tekanan *imported inflation* ke Provinsi Bali yang lebih lambat juga.

Keketatan pasar tenaga kerja negara maju menyebabkan proses disinflasi menjadi lebih lambat di tengah kebijakan pengetatan kebijakan moneter. Hal ini menyebabkan potensi penurunan tekanan *imported inflation* yang lebih lambat melalui perdagangan barang/jasa internasional Provinsi Bali dengan mitra dagang negara maju, dimana negara asal barang impor (*partner dagang utama*) Provinsi Bali berasal dari beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan Singapura. Tekanan harga barang impor ini kemudian dapat menyebabkan inflasi di Provinsi Bali, karena biaya produksi yang lebih tinggi akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Hal ini dapat menahan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi di Provinsi Bali.

Fenomena El Nino berpotensi meningkatkan risiko inflasi. Fenomena ini berdampak pada curah hujan wilayah Bali yang menurun pada periode September – Oktober – November. Pengurangan curah hujan rata-rata ini berkisar -9% hingga -77% dari kondisi normal, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang membutuhkan pasokan air yang terjaga. Untuk itu, perlu dilakukan optimalisasi sistem irigasi, serta memanfaatkan bendungan yang telah selesai dibangun sebelumnya.

Pengetatan kebijakan moneter domestik berpotensi menahan inflasi lebih tinggi. Pengetatan kebijakan moneter juga terjadi di Indonesia, tercermin dari suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang telah meningkat 225 bps menjadi 5,75% sejak Januari 2022 hingga Januari 2023, dan dipertahankan hingga Mei 2023. Kenaikan BI7DRR tersebut ditujukan untuk

menjaga stabilitas makroekonomi sehingga proses pemulihan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan, meski dalam jangka pendek cenderung menahan peningkatan permintaan yang berlebihan.

TPID Provinsi Bali dan TPID Kabupaten/Kota di Bali semakin intensif melakukan sinergi dan kolaborasi pengendalian inflasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi, TPID telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut: (1) melaksanakan operasi pasar setiap hari dan meningkatkan volume operasi pasar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk menjaga stabilitas harga; (2) meningkatkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan pasokan, baik antardaerah di Bali maupun dengan daerah di luar Bali; (3) mendorong peningkatan peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai *off taker* komoditas pangan untuk menjaga ketersediaan stok dan meningkatkan kesejahteraan petani; (4) mendorong peningkatan pembiayaan Perbankan kepada petani yang menjadi mitra Perumda; (5) mendorong kolaborasi antar Perumda se-Bali dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga; (6) mendorong kerjasama Perumda se-Bali dengan Bulog dalam distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan komoditas lainnya; (7) meningkatkan komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. Selain itu, untuk mempermudah pengawasan, pengaturan, dan intervensi Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, maka Pemerintah Provinsi Bali juga telah mempersiapkan rencana pembangunan pasar induk dengan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi.

Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali pada tahun 2023 diperkirakan akan semakin menurun dan berada

dalam rentang target nasional $3\pm 1\%$ (yoy). Tekanan kenaikan inflasi pada tahun 2023 diperkirakan bersumber dari peningkatan permintaan, namun tekanan dari sisi *supply (imported inflation)* diperkirakan semakin menurun. Selain itu, faktor *base effect* tingginya inflasi pada tahun 2022 akibat kenaikan harga BBM subsidi dan non subsidi pada September 2022 turut mendorong penurunan

inflasi pada tahun 2023. Sementara itu, upaya TPID dalam pengendalian inflasi tahun 2023 juga diperkirakan lebih besar dampaknya dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Dengan mempertimbangkan prakirakan kondisi *demand, supply*, faktor global, dan upaya pengendalian inflasi oleh TPID, Bank Indonesia optimis inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali akan kembali pada kisaran sasaran $3\pm 1\%$ mulai semester II 2023 dan berlanjut hingga akhir tahun.



DAFTAR ISTILAH

Administered Price (AP)

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

Akselerasi

Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/Kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Cash Inflows

Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.

Cash Outflows

Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.

Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ekspor

Keseluruhan barang dan atau jasa yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Faktor Fundamental

Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran-lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.

Faktor Non Fundamental

Faktor nonfundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (*volatile foods*), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (*administered price*).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank konvensional.

Impor

Seluruh barang dan atau jasa yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Imported inflation

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi inti

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental (merupakan Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *administered prices* dan *volatile food*).

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Kliring

Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kontraksi

Pertumbuhan yang negatif.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kualitas kredit

Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.

Melambat

Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.

mtm (month to month)

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Net Cashflows

Selisih bersih antara jumlah *cash inflows* dan *cash outflows* pada periode yang sama yang terdiri dari: *net cash outflows* bila *cash outflows* lebih tinggi dibandingkan dengan *cash inflows*, dan *net inflows* bila terjadi sebaliknya.

Non Performing Loan (NPL)

Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto merupakan Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. Terdiri atas PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Perusahaan

Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.

qtq (quarter to quarter)

Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Saldo Bersih

Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".

Sektor Ekonomi Dominan

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS)

Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulanan.

Survei Konsumen (SK)

Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.

yoy (year on year)

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Trisno Nugroho

Penanggung Jawab

G.A Diah Utari

Koordinator Penyusun

Wahyu Ari Wibowo

Editor

Abdul Khalim

Rahmad Hadi Nugroho

Tim Penulis

Willy Kristian

Reffi Marizka

Imanda Mulia Rahman

Bagas Naufal Prayitno

Desainer

Gungde Maha Jaya

Supporting

Riska Astari

Surya Wirasdyartha

Anak Agung Ayu Mas Radha Rani Dewi

Kontributor

Tim Implementasi KEKDA

Tim Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP-PUR

Produksi dan Distribusi

Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah dan Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Grup Perumusan dan Implementasi KEKDA (Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah)

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988

Email : kpw Bali-kpkwp@bi.go.id

Website : www.bi.go.id



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar - 90235
Telp : 62 - 361 - 248982, Fax : 61 - 361 - 34993 - 222988
Website : <https://www.bi.go.id>